

- LOCAL COVER

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Local cover

TESIS

W4
Te. 01/05
M_{oh}
P

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 UNTUK TERCAPAINYA PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO



MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MAHSINA, SE
090114360M

PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN
PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 UNTUK
TERCAPAINYA PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Manajemen
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Oleh :

MAHSINA, SE
090114360M

**PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN
PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Tanggal 5 Januari 2004

Tesis Ini Telah Disetujui
Tanggal 5 Januari 2004

Oleh:
Pembimbing,



Dr.rer.pol. Debby Ratna Daniel, SE, Ak.
NIP: 131 287 544

Co. Pembimbing,



Drs. Basuki, M.Com (Hons), Ph.D., Ak
NIP : 131 558 571

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Manajemen



Dr. Sri Gunawan, M.Com., DBA
NIP: 131 653 420

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Telah Dijuji Pada

Tanggal 5 Januari 2004

PANITIA PENGUJI TESIS :

1. Drs. Ec. Achmadi, MS.
2. Dr. rer. pol Debby Ratna Daniel, SE., Ak.
3. Drs. Basuki, M.Com (Hons), PhD, Ak.
4. Drs. Bambang Suhardito, MSi, Ak.
5. Dra. Wiwik Supratiwi, M.B.A., Ak.
6. Drs. M. Nasich, MT, Ak.

ABSTRAK

Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah daerah. Konteks keuangan daerah secara konkret memang mendeskripsikan suatu proses akuntansi. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) telah memperluas cakupan akuntansi keuangan daerah kedalam suatu sistem yang lebih besar yakni sistem informasi keuangan daerah. Pedoman pelaksanaan tata usaha keuangan yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian untuk mencapai prinsip tersebut maka APBD memerlukan alat pengendali, pelaporan dan analisis yang disebut dengan akuntansi.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem integral sistem informasi keuangan daerah berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah perancangan sistem informasi keuangan daerah yang berdasar pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas?”.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ruang lingkup penelitian ini adalah 1) sistem dan prosedur penerimaan kas dan 2) sistem dan prosedur pengeluaran kas. Sistem dan prosedur penerimaan kas terbagi dalam subsistem sistem informasi pendapatan dan subsistem sistem informasi penerimaan perhitungan pihak ketiga, sedangkan sistem dan prosedur pengeluaran kas terbagi dalam subsistem sistem informasi pengeluaran beban tetap (umum) dan subsistem sistem informasi pengeluaran perhitungan pihak ketiga sampai dengan munculnya keluaran berupa Laporan Pertanggungjawaban.

Metode yang dipergunakan adalah metode *waterfall*. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa standar penelitian yang dipergunakan dalam design sistem ini bersifat given (mutlak, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002). sehingga tidak ada review atas prospek dan kesesuaian metode dengan obyek di masing-masing pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan rangkaian aplikasi antara lain : Visio 2002 untuk tahapan analisa *system flow*, Sybase Power Designer versi 6.32 bit *Power Analyst, 1991-1997* untuk tahapan analisa *data flow diagram* dan Sybase Power Designer versi 7.5 *Data Architech, 1991-2002* untuk tahapan analisa *conceptual data model* dan *physical data model*.

Sehingga hasil akhir penelitian merupakan tahapan design yang terbagi dalam subsistem-subsistem dari konteks umum sistem informasi keuangan daerah. Terdapat 4 (empat) tahapan metode *waterfall* yang menjadi teknik analisis dalam pembahasan ini yakni *system flow*, *data flow diagram*, *conceptual data model* dan *physical data model*. *System flow*, menunjukkan prosedur manual dari sistem informasi keuangan daerah, intinya keluaran dokumen dari proses yang terjadi dalam sistem flow ini menjadi terminal data sistem; *Data flow diagram*, menunjukkan arus data dan batas-batas kewenangan dari 'external entity' dalam sistem informasi keuangan daerah sampai munculnya *data storage* (database). *Conceptual data model*, menggambarkan obyek-obyek data atau fungsional dari semua proses dalam sistem informasi keuangan daerah yang terangkai menjadi sistem terintegrasi. *Physical data model_entity relationship*, menggambarkan alur atau hubungan dari suatu *data storage* dari tiap proses yang terangkum dalam tabel-tabel database melalui id dari field *primary* dan juga menampakkan tipe data dari masing-masing field dalam tabel database.

Kata kunci : Sistem. akuntansi keuangan daerah. waterfall method

ABSTRACT

Local government financial information system is a new 'case' for local government. The context of local government finance is to describe an accounting process. The management, responsibility and controlling of Local Budgeting of Income and Expenditure (APBD) has widen the boundary of local government financial accounting into a larger system, local government financial information system. Ministry of Home Affairs's Regulation No. 29/ 2002 (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) became a guidance in achieving transparency and accountability principles of local government finance. Thus, in order to achieve those principles, the APBD will needs controlling, reporting and analysing tools called accounting.

The objective of this research was to develop an integrated system of local government information system based on Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 so the principles of transparency and accountability achieved. The problem formulation of research was "How is the form of design of local government information system accordance to the Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 so that the principles of transparency and accountability can be achieved.

Based on the Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 the boundary of research was 1) the system and procedures of cash receipt and 2) the system and procedures of cash disbursement. The system and procedures of cash receipt was divided into 2 (two) subsystems, there were income information system, and income of third party calculations information system. Whereas the system and procedures of cash disbursement was divided into 2 (two) subsystems which were general cash disbursement information system, and cash disbursement of third party information system. The process will result an output known as responsibility report (LPJ).

Using *waterfall method*, this study analyse the result of system in 4 (four) steps of design technique. The method used by the consideration that there is no review for the prospect and customization related with its implementation on local government, Finance Division of kabupaten Situbondo local government. It means that the '*benchmarking*' of system implemented is '*absolute*' (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002). This research use integrated applications which are: Visio 2002 for system flow analysis, Sybase Power Designer 6.32 bit Power Analyst. 1991-1997 for data flow diagram analysis, Sybase Power Designer 7.5 version Data Architech. 1991-2002 for conceptual data model analysis and physical data model analysis.

The result of this research was an integrated design phases which describe each subsystem of local government financial information system. There were 4 (four) phase of *waterfall method* which implemented on this research, there were system flow, data flow diagram, conceptual data model and physical data model. A system flow show you a manual procedures of the system, it means that the output of the process will became system terminal data. Data flow diagram show the data flow on schematic diagram of a boundary of authority from each external entity until it stores on database. Conceptual data model, describe the object of data or functional object from all process in form of an integrated system. Physical data model, describe the flow and the relationship of a table from storage data which indicate a process of a system through field primary ID. This table will show you type of the data of each field, so the table identified phisicly.

Key words : *system, Local government financial accounting, waterfall method*

KATA PENGANTAR

Penelitian ini ditujukan untuk membantu pengembangan profesionalisme aparatur pemerintahan melalui implementasi peraturan pemerintah yang lebih jelas dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mengambil topik bidang keuangan yang menjadi dasar objek pengukuran kinerja suatu pemerintahan dalam mengelola sumber keuangannya. Judul dari penelitian ini adalah **Perancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Untuk Tercapainya Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo**. Penelitian ini diarahkan untuk memberi wawasan yang luas atas konsep Keuangan Daerah berbasis kinerja, dimana APBD menjadi tolok ukur monitoring.

Penelitian ini juga memberikan wacana fungsi pengelolaan, pengendalian dan objek pengawasan atas beberapa aspek keuangan dalam keuangan daerah. Secara garis besar penelitian mengambil objek proses penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik itu kas maupun non kas (dalam hal ini adalah objek PFK atau Perhitungan Pihak Ketiga). Penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi pemerintahan daerah atas beberapa manual prosedur (yang berkaitan dengan otorisasi dan kewenangan suatu bagian di lingkungan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo) dan format *computerized base information system* pengelolaan keuangan daerah. Penambahan unit verifikasi sebagai unit pengontrol dalam proses pengeluaran kas menjadi pokok perhatiandalam penelitian ini. Adanya fungsi validasi atas penerimaan kas daerah terpisah dengan dengan unit kas daerah menjadi fungsi pengendalian tanpa adanya gangguan birokrasi dari tiap fungsi (*optimalizing organization functions*).

Mengenalkan sesuatu yang baru kepada tingkatan aparatur di lingkungan pemerintahan kabupaten bukan hal yang mudah termasuk antisipasi atas berbagai karakteristik daerah. Ditambah pula akuntansi merupakan pengetahuan yang luas dan kompleks dan kesalahan pemahaman dalam pendekatan belajar dan adaptasi dapat menimbulkan kesalahan persepsi atas berbagai konsep pokok akuntansi dan aturannya. Hal ini diperparah dengan kondisi dimana negara ini belum memiliki suatu standar akuntansi pemerintahan dan aturan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 mengenai **Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang berlaku saat ini dalam mengelola keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan suatu persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata Dua (S2) dan meraih gelar Master of Sains (MSi.) program studi Ilmu Manajemen. Beribu-ribu terimakasih saya ucapkan dan tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kelalaian yang telah diperbuat selama proses penelitian ini:

1. Ibu Dr.rer.pol Debby Ratna Daniel, SE, Ak., selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, dukungan, dorongan, semangat, kritik dan saran yang telah diberikan selama ini.
2. Bapak Drs. Basuki, M.Com (Hons), PhD, Ak., selaku dosen Co-Pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, dukungan, dorongan, semangat, kritik dan saran yang telah diberikan selama ini.
3. Seluruh dosen/ staff pengajar program studi Ilmu Manajemen, terima kasih atas segala bimbingan yang diberikan selama ini.

4. Bapak Drs. Suhanwar, selaku kepala Bagian Anggaran, Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Seluruh Staff Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan karunia dan rahmatnya yang tiada terhingga yang tak akan pernah terbayangkan sebelumnya hambamu ini dapat melakukannya dan menyelesaikan studi sampai dengan program magister ini. Selain kepada pihak – pihak yang telah saya sebutkan di kata pengantar, saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama yang saya sebutkan dibawah ini, sambil tak lupa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang telah dibuat:

1. Bapak **H. Muhtadi** dan Ibu **Hj. Sri Hatiyatik**, Ibu dan Bapak tercinta, yang sangat saya sayangi dan saya hormati, terima kasih atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, dukungan, bimbingan, perhatian, saran dan kritik yang selalu diberikan mulai ananda dalam kandungan hingga saat – saat amat membanggakan yang takkan pernah terlupakan, atas do'a dan ketulusanmu ini semoga apa yang telah ananda raih dapat memberikan manfaat *rahmatan lilalamin* bagi semuanya. **Mas Jalil** (Eko Priyono) yang selalu menyertai di saat – saat indah dan sedih selama aku menempuh pendidikan ini dan selalu setia mulai saat pacaran, menikah, hamil, melahirkan dan hingga saat ini dimana merupakan momen tersulit yang tak akan bisa aku bayangkan tanpamu disisiku yang selalu memberikan perhatian, ketulusan do'a dan harapan, dukungan, kesempatan dan ijinmu, kritik, saran dan maaf yang tak akan pernah dapat terkatakan. Ananda buah hatiku **Ilham Ramadhani** yang selalu menyertai saat dimana orang lain menganggap sulit untuk dapat menyelesaikan ini semua,yang selalu membuat bunda dan ayahmu tertawa dan rukun selalu dalam menjalani semuanya, tiada kata yang dapat terungkap untukmu selalu yang tak pernah membuat bunda patah

semangat untuk terus maju dan tak pernah berhenti menghadapi aral.. **Subaida**, **ST** adikku yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan dukungan, doa dan bantuan jagain Ilham. Thanks, *I love you all ... and I am very gratefull being the part of this happy family*

2. Temen-temen Limaxer ... *I love you all for any helps and support me 'till I finished this al.* Terutama manajer nich ..., mas **Luthfi** dan kepada pak direktur **Riyanarto Sarno** *thanks for giving me a chance*, mas endra sarannya oke banget.
3. Sobatku tercinta selalu **Rama**, **Wiwik**, aku kangen banget n' **Shinta** *Thanks for supporting me always.*
4. Seluruh teman-teman angkatan 2001 program studi Ilmu Manajemen (**bu made**, **bu mega**, **pak joko**, **yunus**, **shanti**, **erma**, **evita**, **rifky**, **pak lukman**, **bu ika**, **mas imron**, **nanin**, **mbak anik**, **mbak yuli**, **mahmud**, **mbak ika**, **bu handri**, **mbak vero**, **dedi**, **mbak rini**, **lian**, **mbak dyah**, **nira**, **mbak hamidah**, **mbak resti**, **hayat**, **pak pingo**) terima kasih atas kebersamaan, keceriaan dan kehebohan selama 2 tahun ini !!!.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002	10
2.2.2 Manajemen Keuangan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah	20
2.2.3 Keuangan Daerah	23
2.2.4 Akuntansi Keuangan Daerah	26
2.2.5 Posisi Akuntansi Daerah Dalam Manajemen Keuangan Daerah	30
2.2.6 Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah	30
2.2.7 Sistem Informasi Keuangan	32

2.2.8 Sistem Informasi Berbasis Komputer	42
2.2.9 System Development Life Cycle	43
BAB III KONSEPTUAL PENELITIAN	
3.1 Kerangka Konseptual penelitian	48
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Jenis Penelitian	53
4.2 Lokasi Penelitian	55
4.3 Pembatasan Masalah	55
4.4 Desain Penelitian	56
4.5 Sumber Data	58
4.6 Proses Pengumpulan Data	60
4.7 Teknik Analisis	61
4.8 Kualitas Desain Penelitian	65
4.9 Keterbatasan Penelitian	67
BAB V HASIL PEMBAHASAN	
5.1 Gambaran Bagian Keuangan Kabupaten Situbondo	69
5.2 Hasil Pembahasan	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	132
6.2 Saran	134

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR SINGKATAN****DAFTAR PERTANYAAN****LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Keuangan Daerah	25
Gambar 2.2 Posisi Anggaran Dalam Akuntansi	33
Gambar 2.3 What is System	35
Gambar 2.4 Proses Pengubahan Data Menjadi Informasi Menggunakan Komputer	36
Gambar 2.5 The Parts of An Information System	37
Gambar 2.6 Model of a Financial Information System	40
Gambar 2.7 System Development Life Cycle	43
Gambar 2.8 The Context of System Analysis	45
Gambar 3.1 Proses Analisa Desain Sistem Sistem Informasi Keuangan Daerah	48
Gambar 3.2 Alur dan Struktur Sistem Informasi Keuangan Daerah	49
Gambar 3.3 Alur Konsep Penelitian dalam Konteks Financial Information System (FIS)	52
Gambar 4.1 Metode Studi Kasus	54
Gambar 4.2 System Development Life Cycle-Waterfall Model	62
Gambar 5.1 <i>Flow system</i> Sistem Informasi Keuangan Daerah	74
Gambar 5.2 Diagram konteks Sistem Informasi Keuangan Daerah (Level 0)	92
Gambar 5.3 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Penerimaan Kas (level 1)	95
Gambar 5.4 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Pengeluaran Kas (Level 1)	97
Gambar 5.5 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Penerimaan Kas _ Pendapatan (Level 2)	99
Gambar 5.6 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Penerimaan Kas _	

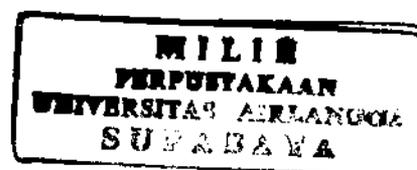
	PFK (Level 2)	100
Gambar 5.7	DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Penerimaan Kas _ Pendapatan (Level 3)	102
Gambar 5.8	DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Penerimaan Kas _ PFK (Level 3)	104
Gambar 5.9	DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Pengeluaran Kas _ Umum (Level 2)	106
Gambar 5.10	DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Penerimaan Kas _ PFK (Level 2)	107
Gambar 5.11	DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Pengeluaran Kas _ Umum (Level 3)	110
Gambar 5.12	DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _ Penerimaan Kas _ PFK (Level 3)	111
Gambar 5.13	CDM Sistem Informasi Keuangan Daerah	126
Gambar 5.14	PDM Sistem Informasi Keuangan Daerah	131

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Elemen-elemen Laporan Keuangan Dalam Berbagai Dasar Akuntansi	21
Tabel 4.2 Deskripsi Desain Penelitian	52
Tabel 5.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo	63

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Good governance memiliki karakteristik diakui oleh masyarakat atau mempunyai legitimasi, berakuntabilitas, mempunyai kemampuan untuk memformulasikan kebijakan dan menyediakan jasa, menghormati hak-hak asasi manusia, serta menjunjung dan menegakkan hukum. Penerapan prinsip *good governance* ini menuntut adanya *re-engineering system* manajemen keuangan pemerintahan. *Re-engineering system* manajemen keuangan pemerintahan yang sehat itu diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintahan yang transparan, akuntabel, yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum dibidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah. *Re-engineering system* manajemen keuangan pemerintahan ini dilakukan sejak dari proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem informasi dan audit.

Begitu pula dengan penerapan otonomi daerah seutuhnya, membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak dibarengi dengan kesiapan

daerah itu sendiri dalam mengelola dan mengatur kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Salah satu daerah contoh dari hasil penelitian ICDHRE (*Islamic Centre for Democracy and Human Rights Empowerment*) dalam format 'Catatan Terhadap Rencana Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah Jombang' yang bertajuk 'SULITNYA MENILAI KINERJA BUPATI JOMBANG' (<http://www.ngo.or.id/icdhre/apbd2002>) di mana dapat disimpulkan antara lain:

1. Jombang tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra). Padahal rencana strategis (Renstra) tersebut sangat diperlukan, karena pemerintah daerah sebagai organisasi publik berhadapan langsung dengan lingkungan yang senantiasa berubah secara drastis dan menuntut perubahan paradigmatik dalam sistem manajemennya. Bahkan, rencana strategis (Renstra) berfungsi untuk "menuntun" manajer/pemimpin dan karyawan pemerintah daerah dalam mencapai kinerja strategis atau untuk mencapai tujuan jangka panjang dari pembangunan di Jombang. Bisa dibayangkan bila Pemerintah Daerah Jombang tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra) pembangunan/ pemberdayaan daerah : "Apa yang mereka lakukan selama ini ?". "Hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jombang atas pembangunan yang dimotori oleh Bupati ?"
2. Jombang hanya memiliki Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah tahun 2001-2005 yang memberikan arah dasar-dasar pola kebijakan pembangunan daerah. Sedangkan dalam implementasinya pola dasar tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2001-2005. Terlepas dari apakah dua landasan pembangunan daerah tersebut sudah mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Jombang atau tidak, jika dianalisis dengan pendekatan *Balance Scorecard* (Kaplan dan Norton,

diperkenalkan oleh mereka pada tahun 1992) dua landasan pembangunan tersebut kering strategi, ukuran pencapaian, dan inisiatif strategis.

3. Dari data APBD tahun anggaran 2002 ini dapat dibaca secara jelas arah kebijakan pembangunan daerah Jombang yang akan dituju. Dari total APBD, 71,72 % atau Rp. 222.988.273.880,00 dialokasikan untuk belanja rutin, sedangkan 28,28 % atau Rp. 87.942.391.120,00 untuk Belanja Pembangunan.

Contoh diatas adalah merupakan salah satu bentuk permasalahan yang timbul yang sehubungan dengan diterapkannya otonomi daerah yang tidak dibarengi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan terutama sekali mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan artikel yang dimuat dalam www.jawapos.co.id dalam workshop Peningkatan Kemampuan dan Kinerja DPRD eks Karisidenan Besuki (Situbondo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi) yang digelar oleh Universitas Jember (UNEJ), yang dipaparkan oleh Dr. Soepomo Prodjoharmono bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum menunjukkan nuansa keadilan hal ini ditunjukkan dengan hampir 70 persen alokasi APBD dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan, anggaran terbesar pada pos anggaran gaji pegawai dan dana perjalanan dinas.

Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri dihadapkan atas berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah ini yang antara lain:

1. Kurangnya kesiapan aparatur pemerintan daerah Kabupaten Situbondo mengenai pengetahuan manajemen keuangan daerah terutama sekali akuntansi keuangan daerah yang merupakan wacana baru bagi pemerintah daerah.

2. Sistem dan prosedur manual tidak dapat secara tepat dan cepat memproses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan penyusunan, realisasi sampai dengan pelaporan.
3. Peraturan pemerintah mengenai kewajiban daerah untuk membuat suatu Laporan Pertanggungjawaban yang berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi suatu dilema tersendiri mengingat belum adanya aturan yang jelas atas standar akuntansi yang ada maupun petunjuk teknis lainnya.
4. Belum adanya sistem informasi keuangan daerah yang berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002.

Kondisi diatas menyebabkan kurangnya fungsi pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance*. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan dimana terlihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah.

Di samping fungsi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi dapat menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan suatu konsep yang luas, yang mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan (Makalah Semiloka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Departemen Keuangan, 2001:2).

Pencapaian prinsip transparansi dan akuntabilitas ini dapat dilihat dari berbagai indikator dari elemen fungsional yang ada di pemerintahan. Pendapat mengenai ini adalah :

"... dari sudut pandang akuntansi menurut *Committe on Concepts of Accounting Applicable to the Public Sector* dari *American Accounting Association* untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi ini harus melaporkan empat hal yaitu:

- ❑ Akuntabilitas sumber – sumber keuangan
- ❑ Akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif.
- ❑ Akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi
- ❑ Akuntabilitas untuk hasil program dan efektivitasnya."

(Makalah Semiloka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Departemen Keuangan, 2001:2).

Pendapat lain mengenai akuntabilitas ini adalah :

"... sudut fungsional, J.D Steward dalam tulisannya *'The Role of Information in Public Accountability'*, akuntabilitas terdiri dari lima tingkat yang berbeda, yaitu:

- ❑ *Policy Accountability*, akuntabilitas atas pilihan – pilihan kebijakan yang dibuat.
- ❑ *Program Accountability*, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/ hasil dan efektifitas yang dicapai.
- ❑ *Performance Accountability*, akuntabilitas atas pencapaian kegiatan yang efisien
- ❑ *Process Accountability*, akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan – tindakan yang ditetapkan.
- ❑ *Prohibity and legality Accountability*, akuntabilitas atas kejujuran dan legalitas penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang – undang yang berlaku."

(Makalah Semiloka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Departemen Keuangan, 2001:3).

Untuk itu perlu dibangun prosedur, teknik, metode, dan standar akuntansi yang layak dalam suatu sistem informasi keuangan daerah berbasis komputer, yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Dengan adanya **Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah**

Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka setiap pemerintah daerah telah memiliki aturan yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang tepat diperlukan untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut diatas rumusan masalah yang dapat diangkat adalah “bagaimanakah perancangan sistem informasi keuangan daerah yang berdasar pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas?.”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengembangkan rancangan sistem informasi keuangan daerah berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini akan memberikan input bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi tata pelaksanaan anggaran daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan evaluasi bagi institusi atas beberapa kebijakan pemerintah dapat menunjang pengembangan wawasan ilmu pengetahuan.

1.4.3 Bagi Peneliti

1. Merupakan sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat di Pasca Sarjana Ilmu Manajemen

2. Memperluas pandangan dan wawasan peneliti tentang fenomena kebijakan pemerintah dari aspek keuangan yang berlaku berdasarkan konsep-konsep keilmuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian terkait dengan implikasi penerapan otonomi daerah yang menuntut adanya *re-engineering system*. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah, menetapkan tujuan penelitian, analisa manfaat hasil penelitian dan konteks sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori – teori yang berhubungan dengan topik tesis yaitu mengenai referensi penelitian pengembangan sistem informasi keuangan maupun evaluasi hasil implementasi akuntansi keuangan daerah oleh PUSLITBANGWAS dan PUSINFOWAS BPKP. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, otonomi daerah, keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, sistem informasi keuangan dan *system development life cycle*.

BAB III. KONSEPTUAL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka penelitian dari sisi konsep - konsep yang akan diterapkan dalam penelitian ini, yang terdiri pertama, dari teknik analisis yang dipergunakan yakni mengenai langkah – langkah pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Kedua, Alur dan struktur Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan Kepmendagri

Nomor 29 Tahun 2002 yang menggambarkan ruang lingkup konteks bahasan yang dilakukan.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah - langkah dan aturan – aturan yang digunakan dalam menghasilkan tujuan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pembatasan masalah, desain penelitian, sumber data, proses pengumpulan data dan teknik analisis yang dilakukan.

BAB V. HASIL PEMBAHASAN

Bab ini memberikan analisis terhadap data yang dihasilkan pada bab IV sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan dirancang pada bab III berupa *system flow*, *data flow diagram*, *conceptual data model* dan *physical data model* dalam konteks pembahasan sistem penerimaan kas dan sistem pengeluaran kas sampai keluarnya laporan keuangan.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan atas pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya disusun saran dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan oleh instansi pemerintah daerah terutama Bagian Keuangan di pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian pertama dilakukan oleh PUSLITBANGWAS yang diketuai oleh Syafri A. Baharuddin (2001) mengenai **Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah**. Adapun persamaan konteks penelitian ini adalah penelitian ini mengambil topik sistem informasi keuangan daerah yang merupakan suatu wacana baru dalam pemerintahan daerah kaitannya dengan akuntansi pemerintahan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

- Penelitian ini mengevaluasi penerapan sistem akuntansi keuangan yang diterapkan oleh BAKUN yang terancang dalam format SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) berdasarkan pada ketentuan PP Nomor 105 Tahun 2000, yang saat ini telah digantikan perannya oleh ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sebagai acuan dasar bagi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menghasilkan suatu simpulan bahwa sistem informasi keuangan yang ada, belum dapat memenuhi kebutuhan daerah atas pelaporan yang dikehendaki oleh pemerintahan.
- Penelitian ini bukan merupakan suatu pengembangan sistem informasi, melainkan evaluasi dari penerapan sistem informasi keuangan daerah (berbasis pada PP 105 Tahun 2000, yang lebih dikenal dengan SAKD) di berbagai daerah sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi prospek pengembangannya baik dari sisi sistem maupun metode akuntansi yang berlaku selanjutnya (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).

Sedangkan penelitian kedua dari Andre Devaux dan Govert Gijbers (1998), dengan judul *Implementing INFORM and CIPFIS at PROINPA*". Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mencoba mengembangkan suatu sistem informasi keuangan daerah dan penerapannya pada objek di lingkungan pemerintahan, tepatnya kementerian pertanian *The National Potato Research Program of Bolivia (PROINPA)*, yang merupakan salah satu badan dibawah kementerian pertanian Bolivia.

Adapun perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Penelitian ini mencoba menerapkan *Management Information System (MIS)* yang dikenal dengan INFORM (sistem lama) yang diintegrasikan dengan sistem informasi keuangan yang dikenal dengan CIPFIS (*the International Potato Center Financial Information System*) (sistem baru) dimana sistem informasi keuangan ini memonitor seluruh aktifitas suatu proyek penelitian dari alokasi anggaran yang dilaksanakan (direalisasikan) di PROINPA.
- Penekanan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahapan perencanaan dari siklus hidup pengembangan sistem (*system development life cycle*), yakni menganalisa kebutuhan sistem (*requirement*) dari sistem yang telah ada (INFORM) untuk kemudian dianalisa lebih lanjut mengenai pengembangan integrasi dengan sistem yang baru (CIPFIS) di PROINPA.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

2.2.1.1 Dasar Pertimbangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 mendasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 112 Ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan Kepala daerah;
- b. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;
- c. Demi terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, maka perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas perlu ditetapkan pedoman tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Menteri.

2.2.1.2 Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum terbentuknya Kepmen Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ini, terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);

- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, pasal 27 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) yang berbunyi :
- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan suatu sistem informasi keuangan daerah.
 - (2) Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- i. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri;



2.2.1.3 Pengelola Keuangan Daerah

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini maka obyek dari pengelolaan keuangan daerah ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya disingkat dengan APBD. Pejabat yang berwenang mengelola keuangan daerah ini adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan istilah Bendaharawan Umum Daerah mungkin merupakan istilah baru yang sebelumnya belum pernah ada dalam konteks keuangan daerah. Bendaharawan Umum Daerah ini adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah (dalam hal ini Kepala Daerah) untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

Obyek keuangan daerah dalam hal ini APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan daerah dan merupakan hak daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
2. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.
3. Pembiayaan, berisi pos pembebanan dari suatu transaksi yang berisi transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus keuangan daerah.

2.2.1.4 Kebijakan Akuntansi

Tujuan dari kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. Pelaporan keuangan daerah yang dimaksud adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang beberapa hal antara lain :

1. Bahwa periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.
2. Periode Berkenaan adalah periode akuntansi selama satu tahun anggaran yang sedang berlangsung.
3. Kebijakan Umum, kebijakan umum disini berisi tentang :
 - a. Pelaporan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut;
 - c. Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan/ di-disclosure dalam pelaporan keuangan;
 - d. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir;

- e. Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
 - f. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
 - g. Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), nota perhitungan APBD, neraca dan laporan arus kas.
4. Ada beberapa asumsi dasar dalam penerapan akuntansi keuangan daerah yang berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu :
- a. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian (*cash basis modified*), yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
 - b. Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam periode berjalan dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan yang telah menjadi hak dan kewajiban, yang sampai dengan periode akhir akuntansi bersangkutan penerimaan maupun pengeluaran kas (Belanja Non Modal/ Investasi) dari transaksi dan kejadian tersebut belum terealisasi.

5. Beberapa aturan dalam pengakuan bersangkutan yang menjadi dasar transaksi atau kejadian keuangan antara lain :

a. **Pendapatan.**

(1) Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat nilai penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Pengembalian/ koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada *i* dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana umum.

b. **Belanja**

(1) Belanja Modal harus diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima hak kepemilikannya telah berpindah.

(2) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

c. **Pembiayaan**

(1) Definisi pembiayaan disini adalah segala transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi.

(2) Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan (baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dan pusat pertanggungjawaban (unit organisasi pemerintah daerah)).

d. Aktiva

- (1) Beberapa hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aktiva.
- (2) Metode penyusutan (depresiasi) yang diterapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah jika ada.
- (3) Khusus untuk belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

e. Hutang

- (1) Bagian Lancar Hutang jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (2) Hutang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (3) Hutang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (4) Hutang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.

f. **Ekuitas Dana**

- (1) Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana dicadangkan dan
- (2) Ekuitas dana umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

2.2.1.5 Referansi Dokumen Dalam Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

1. Penerimaan Kas

- a. Setiap penerimaan kas akan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- b. Bank akan mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang sah.
- c. STS ini kemudia akan divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan atas kebenaran hukum penerimaan kas yang masuk. Kemudian akan dijadikan referensi resmi oleh Bagian Pembukuan untuk dilakukannya pencatatan akuntansi.
- d. Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) (misal : PFK) dibukukan sebagai pengurang Pos Belanja Daerah tersebut.

2. Pengeluaran Kas

- a. Pengeluaran kas atas bebean APBD harus berdasarkan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan.
- b. Berdasarkan SKO tersebut pengguna anggaran akan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

- c. Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui (telah diverifikasi) dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

2.2.1.6 Jenis Laporan

KEPMEN Nomor 29 Tahun 2002 ini menghasilkan laporan pertanggung jawaban yang terdiri dari:

1. Laporan Perhitungan Anggaran

Laporan Perhitungan Anggaran berisi mengenai perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan, laporan ini juga sekaligus menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi entitas secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Neraca

Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran (tahun fiskal).

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

4. Nota Perhitungan Anggaran

Nota Perhitungan Anggaran memuat realisasi Pendapatan Daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan disertai dengan kinerja keuangan daerah, mencakup antara lain:

- a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan, berdasarkan Rencana Strategik;

- b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
- d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
- e. Posisi Dana Cadangan

2.2.2 Manajemen Keuangan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah

Dalam menghadapi globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu disusun suatu rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu prakondisi dalam pentas perekonomian internasional dan perekonomian nasional. Secara garis besar manajemen keuangan daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah (Mardiasmo, 2002:104).

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* (reformasi anggaran). Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. *Traditional budget* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan yang hanya berdasarkan pada anggaran tahun sebelumnya. Konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru, hal ini sering bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti

ini APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Hal ini menunjukkan terlalu dominannya peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya dominansi ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa pemerintah daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah daerah. *Performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasikan pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas dan *value for money* (Mardismo, 2002:105).

Beberapa prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:106):

2.2.2.1 Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang *holistic* dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

2.2.2.2 Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

2.2.2.3 Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh Anggaran Daerah cenderung terabaikan.

2.2.2.4 Kejujuran

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika moral manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektifitas dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.

2.2.2.5 Informasi

Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang *cost*, *output*, *impact* suatu kebijakan adalah sangat penting.

2.2.2.6 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi mengisyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan

tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2.2.3 Keuangan Daerah

2.2.3.1 Definisi dan Jenis Informasi

Yang dimaksud dengan Keuangan Daerah disini adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).

Selanjutnya berdasarkan beberapa hal yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

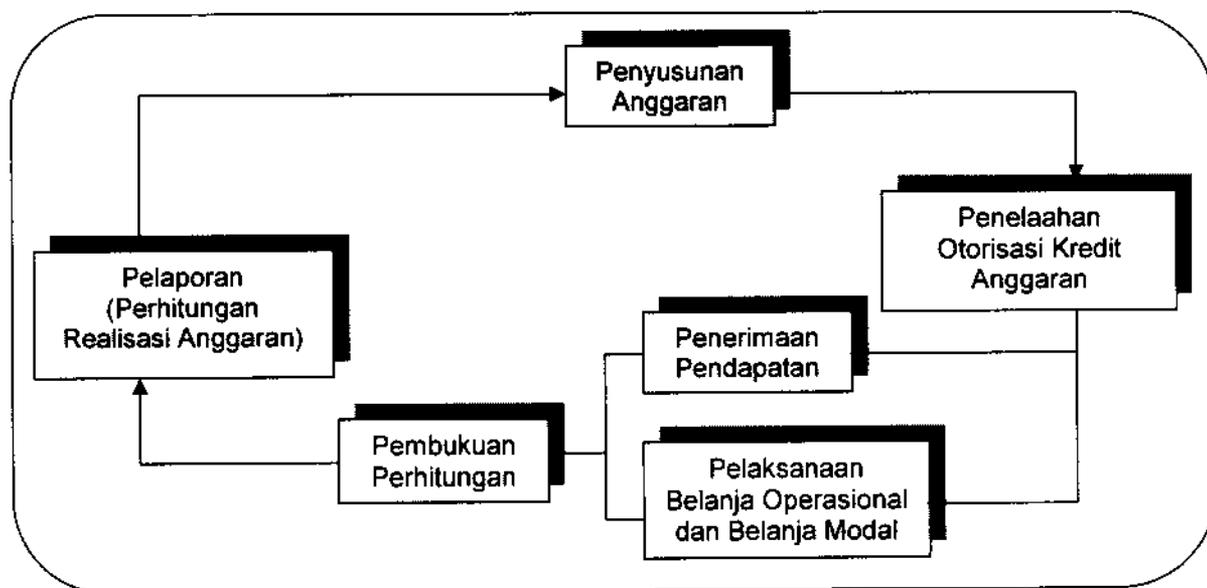
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Bendaharawan Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

5. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
7. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
10. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
12. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
13. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut

dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

2.2.3.2 Siklus Keuangan Daerah

Dari siklus dibawah ini digambarkan mengenai siklus keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran.



Gambar 2.1 Siklus Keuangan Daerah

(Tim Pokja IV, *Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah*, 2001:1-2)

Penyusunan anggaran ini dimulai dengan menganalisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun lalu yang menghasilkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD akan dibahas dengan DPRD dan menjadi Perda APBD. Selanjutnya akan dilakukan penelaahan proses otorisasi kredit anggaran. Pada proses berikutnya terjadi proses Penerimaan pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Operasional dan Belanja Modal, untuk kemudian dilakukan proses pembukuan dan perhitungan berdasarkan pada terjadinya proses penerimaan pendapatan dan pelaksanaan belanja operasional dan belanja modal berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dan disetujui, sehingga akan keluar output yang berupa pelaporan dalam

hal ini proses perhitungan realisasi anggaran. (Tim Pokja IV, *Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah*, 2001:1-2).

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2002:108) yang merujuk pendapat Bingham et.al (1991) mengenai siklus anggaran daerah terdiri dari atas *planning and preparation, approval and ratification, implementation* dan *reporting and evaluation*. Tahap *budget preparation* melibatkan analisis perkembangan anggaran atau taksiran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia (*planning and preparation*). Setelah tahap ini, perkiraan anggaran akan disampaikan pada lembaga legislatif untuk memperoleh tanggapan dan atau persetujuan atau ratifikasi (*approval and ratification*). Setelah diperoleh persetujuan, tahap berikutnya, anggaran tersebut kemudian dilaksanakan (*implementation*), dan akhirnya memasuki tahap pelaporan dan pelaksanaan tersebut di evaluasi dalam rangka mengukur kinerja pemerintah daerah dengan unit-unitnya (*reporting and evaluation*).

2.2.4 Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.4.1 Pengertian dan Peranan Akuntansi

Akuntansi dapat dipandang dari dua sudut pandang berbeda, pertama sudut pandang bidang studi, akuntansi dapat diartikan sebagai:

“seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono, 1994:7)”. Definisi di atas didasarkan pada pemikiran bahwa akuntansi masuk dalam bidang pengetahuan teknologi. Kalau suatu struktur akuntansi sebagai hasil perekayasaan telah diaplikasikan kedalam lingkungan tertentu maka akuntansi dapat dipandang secara sempit sebagai :

“proses atau kegiatan yang dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, peringkasan dan penyajian data keuangan yang dicatat berdasarkan kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 1994:6)”.

Pengertian Akuntansi menurut *Accounting Principles Board* didefinisikan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternatif arah tindakan (Halim, 2002:46)”.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa akuntansi tersebut merupakan suatu pemrosesan data bagi para pengelola suatu entitas ekonomi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat dikomunikasikan kepada para pengguna untuk pengambilan keputusan. Keluaran yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut berupa informasi keuangan.

2.2.4.2 Akuntansi Keuangan daerah

Berdasarkan definisi yang disajikan baik mengenai keuangan daerah dan akuntansi daerah di atas, maka nampak bahwa yang diakuntansikan dalam akuntansi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Untuk dapat memahami secara menyeluruh akuntansi keuangan daerah, pembahasan mengenai akuntansi keuangan daerah ini meliputi 3 (tiga) hal meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Halim, 2002: 46).

2.2.4.2.1 Akuntansi Penganggaran

Akuntansi penganggaran menjelaskan bagaimana APBD disusun, bagaimana menghitung biaya yang direncanakan untuk suatu kegiatan, menghitung output yang

dihasilkan dan bagaimana konsep 3E (ekonomis, efisiensi dan efektifitas) sebagai *value of money* (Halim, 2002:46).

2.2.4.2.2 Pelaksanaan Akuntansi

a. *Cash Basis Modified*

Sistem pengakuan dan sistem pencatatan pada pelaksanaan akuntansi secara umum terdapat pada dua titik ekstrim, yaitu dasar akrual dan berdasarkan kas. Namun diantaranya terdapat dua jenis lagi yaitu *cash basis modified* dan *accrual modified*. Akuntansi keuangan daerah yang menggunakan dasar *Cash Basis Modified*, mengakui seluruh transaksi pada APBD selama tahun berjalan dengan metode *Cash Basis*, namun pada akhir tahun anggaran transaksi tersebut diakrualkan.

Untuk melihat perbedaan keempat sistem tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Elemen-elemen Laporan Keuangan Dalam Berbagai Dasar Akuntansi

Dasar Akuntansi	Fokus Pengukuran	Elemen-elemen Laporan Keuangan
<i>Cash Basis</i>	Saldo Kas (dan perubahannya)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan kas • Pengeluaran kas • Saldo kas
<i>Modified Cash Basis</i>	Sumber daya keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan kas + piutang • Pengeluaran kas + utang • Saldo kas dan setara kas
<i>Modified Accrual</i>	Total sumber daya keuangan (dan perubahannya)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Pengeluaran
<i>Full Accrual</i>	Sumber daya ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> • Aset (Finansial dan fisik) • Kewajiban/ utang • Aktiva bersih (ekuitas)

Sumber : Halim, 2002: 52

b. Sistem *Double Entry*

Ada dua pendekatan dalam penyelenggaraan pembukuan yakni tata buku tunggal (*Single Entry bookkeeping*) dan tata buku berpasangan/ ganda (*Double Entry bookkeeping*).

Perubahan dari sistem *single entry* ke *double entry* ini disebabkan sistem *single entry* memiliki kelemahan:

- (1) Sistem *single entry* tidak mencatat perubahan aset.
- (2) Pencatatan akuntansi dan anggaran dilakukan secara terpisah-pisah yang mengakibatkan pelaporannya tidak bersesuaian dengan yang lain karena tidak menggunakan perkiraan yang standar.
- (3) Pengelompokan perkiraan tidak dirancang untuk menganalisis efektifitas pembiayaan suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian atau pengeluaran proyek/program.
- (4) Pada akuntansi aset tetap, tidak dibedakan belanja modal dan belanja operasional
- (5) Adanya sistem pelaporan yang dikembangkan untuk kebutuhan intern masing-masing unit organisasi pemerintahan.
- (6) Tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintahan untuk menjaga kewajaran dan keseragaman perlakuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
- (7) Keterbatasan-keterbatasan akuntansi pemerintahan yang ada untuk memberikan informasi yang sesuai dengan peningkatan dan kompleksitas transaksi keuangan negara.

(Halim, 2002:53)

Dengan sistem *double entry*, penjelasan secara singkat adalah bahwa dengan sistem ini mencatat setiap transaksi dua kali dan pada dua tempat, dicatat pada sisi aktiva juga pada sisi pasiva. Sehingga dengan sistem ini pemerintah daerah dapat menyusun neraca dan arus kas.

2.2.4.2.3 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu kegiatan/ proses untuk meyakinkan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencananya. Dengan pengendalian, pemerintah daerah dapat (1) mengenali masalah yang ada untuk kemudian melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan dan (2) mengenali hasil yang dicapai secara efisien dan efektif untuk kemudian memberi penghargaan seperlunya (Halim, 2002:55-56).

2.2.5 Posisi Akuntansi Daerah Dalam Manajemen Keuangan Daerah

Mengelola keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah (Halim, 2002:4). sebab segala aktivitas daerah (pemerintah daerah) mayoritas terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas yang notabene tersaji dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kegiatan pengelolaan anggaran daerah dimaksud meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan atau pengendalian anggaran. Kegiatan pengelolaan tersebut merupakan kegiatan manajemen keuangan daerah.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah ini diawali pada tahun anggaran dengan disahkannya perkiraan (*forecast*) kebutuhan akan uang kas yang berbasis pada antisipasi komitmen yang dibuat baik atas kebutuhan rutin maupun kebutuhan modal atau pembangunan. Anggaran yang telah disahkan dan mulai dilaksanakan harus dikendalikan. Proses ini tentunya akan memerlukan suatu pencatatan dan pelaporan yang disebut juga 'akuntansi'. Dengan demikian, sangat jelas posisi akuntansi (keuangan) daerah dalam Manajemen Keuangan Daerah yang menyangkut fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengarahan/ pelaksanaan (*actuating*) dan fungsi pengendalian (*controlling*) (Halim, 2002:5).

2.2.6 Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah

Beberapa jenis informasi keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 seperti yang telah dijelaskan diatas, maka APBD tersebut diatas memerlukan alat pengendali, pelaporan dan analisis yakni akuntansi. Agar dapat dikendalikan maka pelaporan akuntansi mencakup pelaporan selama dalam pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan. Selama dalam pelaksanaan diperlukan

pelaporan akuntansi manajemen, dan saat akhir pelaksanaan diperlukan pelaporan akuntansi keuangan (Halim, 2002:7).

Pelaporan disuatu Pemerintahan Daerah yang termasuk dalam akuntansi sektor publik merupakan sebuah elemen kunci pada akuntabilitas pemerintah daerah tersebut. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas pengguna laporan keuangan. Pengguna tersebut dapat mencakup rakyat atau masyarakat umum (DPRD, pembayar pajak/ retribusi, kreditur atau rekanan, LSM dan lain sebagainya)

Pelaporan akuntansi manajemen yang berarti untuk kepentingan manajemen keuangan di Pemerintah Daerah terfokus pada laporan pelaksanaan anggaran yang sedang dijalankan. Laporan – laporan ini digunakan untuk pengendalian anggaran.

Untuk melaksanakan proses pelaksanaan dan pengendalian anggaran diperlukan sebuah sistem akuntansi yang biasanya menjadi tanggung jawab Bagian Keuangan di lingkungan Sekertariat Daerah. Posisi sebagai alat bantu untuk mengendalikan anggaran dan pelaporan akhir atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran serta analisisnya itulah yang diemban oleh akuntansi. Hasim dan Allan menunjukkan (Halim, 2002:5) posisi akuntansi terlihat jelas dalam rerangka pengendalian, proses-proses sentral terhadap pengelolaan anggaran dan khususnya kas, dan proses-proses di bagian yang bertanggung jawab secara teknis. Posisi anggaran melalui sistem akuntansi terlihat jelas terletak pada dua proses yakni pengendalian anggaran dan pelaporan (Posisi anggaran dalam sistem akuntansi; Gambar 2.2).

Dalam gambar dijelaskan bahwa setelah anggaran disetujui dan disahkan, untuk kemudian untuk proses pelaksanaan program pembangunan maka akan terjadi realisasi anggaran. Dalam proses realisasi anggaran ini, diperlukan suatu kontrol/ pengendalian dan monitoring. Berkaitan dengan fungsi inilah akuntansi diperlukan mulai dari proses penerimaan sampai dengan pengeluaran dan hal – hal yang

berkaitan dan mempengaruhi berbagai transaksi penerimaan dan pengeluaran ini (misalnya : pajak, suku bunga dan lain-lain). Proses monitoring dan pengendalian terhadap anggaran ini berjalan sampai dengan keluarnya laporan keuangan (Laporan Pertanggung Jawaban/ LPJ) dan tinjauan atas kinerja anggaran itu sendiri yang dilakukan oleh DPRD sehingga dapat dilakukan revisi proyeksi atas penetapan anggaran dan program pembangunan pemerintah pada periode berikutnya.

2.2.7 Sistem Informasi Keuangan

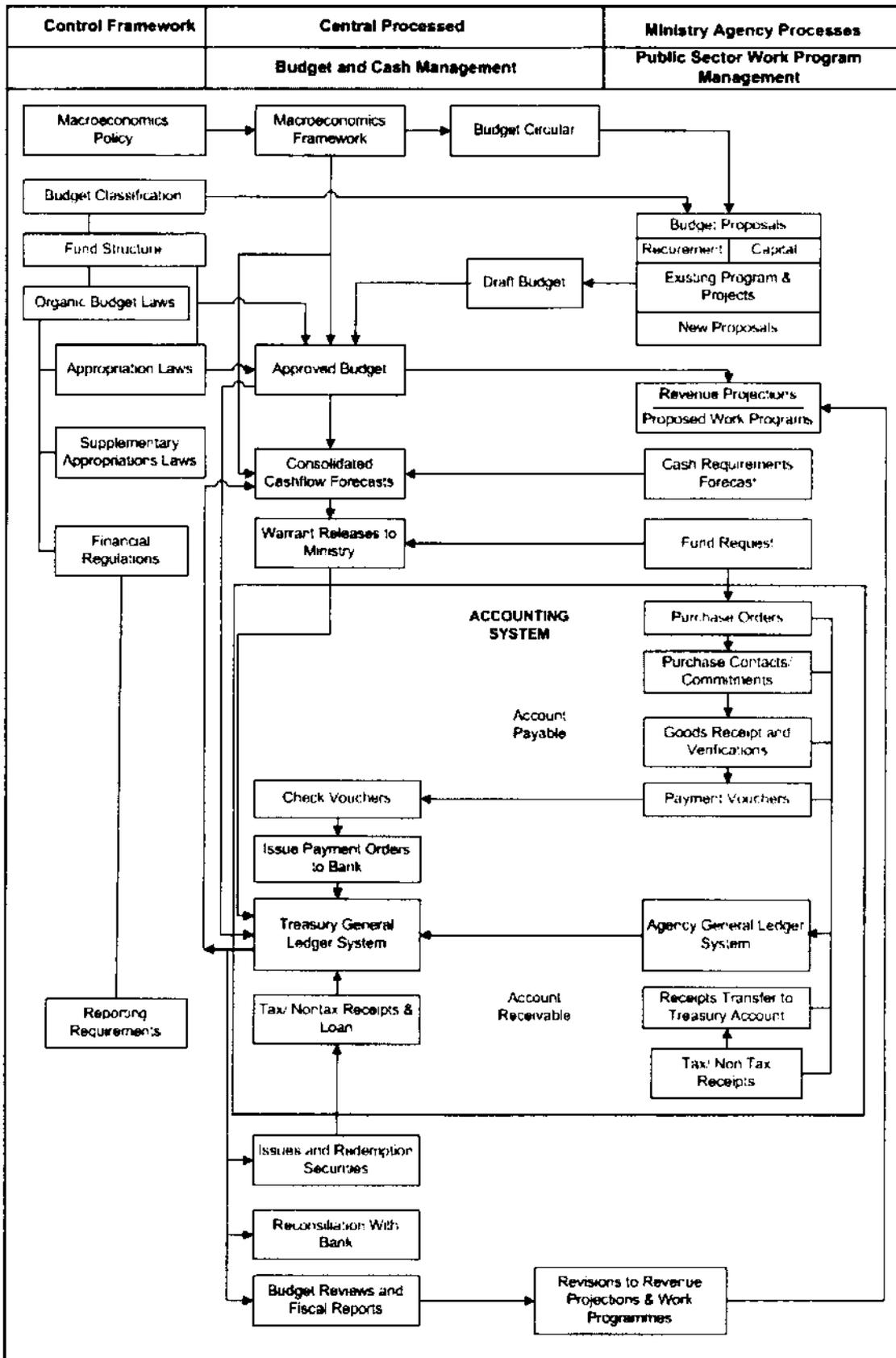
2.2.7.1 Sistem

Untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem (Kusumah, 1985: 2), adalah sebagai berikut: "**Suatu sistem** adalah suatu jaringan sejumlah prosedur yang saling berhubungan, yang dikembangkan sesuai dengan suatu pola (rencana) guna melaksanakan aktivitas utama perusahaan/ organisasi. Suatu prosedur adalah operasi terus menerus yang berurutan yang biasanya menyangkut beberapa orang atau satu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi perusahaan yang berulang-ulang".

Definisi sistem lainnya adalah: "**Suatu Sistem** adalah suatu *entity* (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu" (Baridwan, 1993:3). Sistem juga berarti kombinasi dari sumber-sumber yang bekerjasama mengubah masukan (input) menjadi keluaran (ouput) untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu (Edwards, 1993 :7).

Sedangkan pengertian sistem yang lain (Mcleod, 2001:9), yakni :

"A system is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving objective. An organisation such as a firm or a business area fits this definition. The organisation consist of the resources that we identified earlier, and they work toward achieving particular objectives that are specified by the owners or management".



Gambar 2.2 Posisi Anggaran dalam Sistem Akuntansi

(Sumber : Halim. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. 2002 : 6)

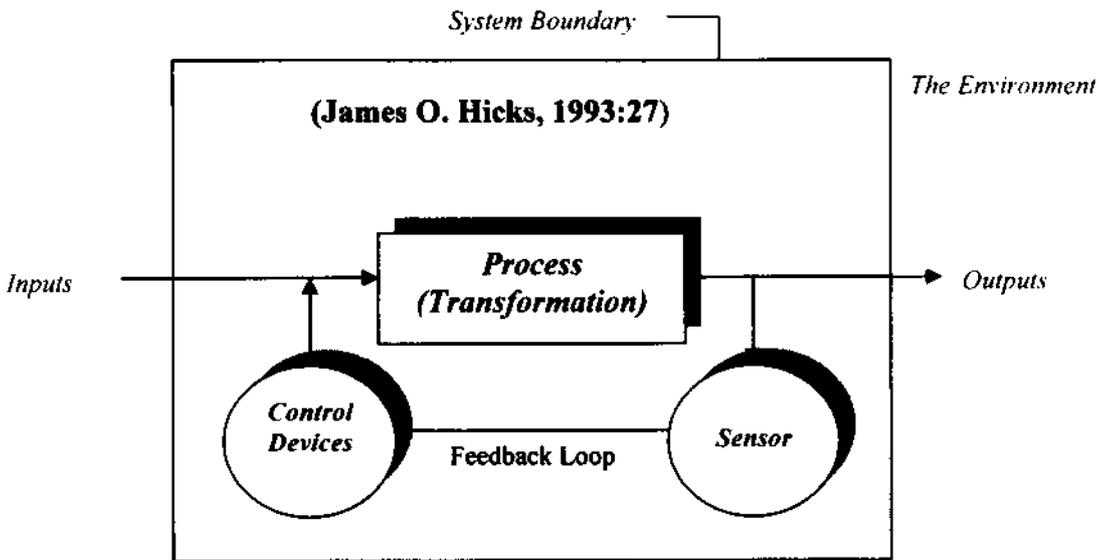
Dari definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sistem terdiri dari sub sistem yang saling terkait satu dengan lainnya dan tiap-tiap subsistem bekerja dengan pola tertentu yang terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga didukung oleh pendapat lain yang senada sebagai berikut :

“A **system** is a network of related procedures developed according to one integrated scheme performing a major activity of business. A procedure is a sequence clerical operations, usually involving several people in more department established to ensure uniform handling of a recarring transaction of a business” (Cole, 1985:3).

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa segala bentuk komponen, elemen (baik itu dalam hal konsep, metode dan aturan tertentu) yang membentuk suatu prosedur untuk pencapaian suatu tujuan tertentu sudah dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Lebih dalam lagi kumpulan prosedur-prosedur yang dimaksud dapat pula terintegrasi membentuk suatu sistem baru yang lebih besar hingga prosedur terkecil yang disebut subsistem.

Pendapat lain yang menegaskan definisi sistem secara detil adalah sebagai berikut :
“A system is defined as a set of interacting components that operate within a boundary for some purpose” (Hicks, 1993:27).

Gambar 2.3 menegaskan bahwa sistem merupakan suatu interaksi dalam suatu proses transformasi antar berbagai komponen dalam suatu lingkup *boundary system* yang ditetapkan atas berbagai hal yang menyangkut tipe data (*types*) dan tingkatan arus (*flow rates*) dari suatu input (masukan) yang sebelumnya telah melalui suatu pengontrol (“*control devices*”) dan output yang juga telah melalui suatu proses *sensor* dimana kalau seandainya tidak sesuai dengan tujuannya akan dikembalikan untuk diproses lebih lanjut sampai tujuan yang ditargetkan tercapai.



The
Environment

Gambar 2.3. What is System ?

(Sumber : Hicks. Management Information System, 1993:27)

2.2.7.2 Informasi

Berbicara mengenai informasi tidak terlepas dari bahasan mengenai data ini sendiri. informasi berarti fakta-fakta yang sangat berguna yang telah diorganisir dan dilaporkan. Suatu informasi bagi seseorang, mungkin merupakan data bagi orang lain yang diolah lagi menjadi informasi.

Beberapa ahli menyatakan hubungan data dan informasi sebagai berikut:

“Data consist of facts and figures that are relatively meaningless to the user. Information is processed data, or meaningfull data” (McLeod, 2001: 12)

Informasi merupakan keluaran (*output*) dari suatu proses pengolahan data biasanya sudah tersusun baik dan mempunyai arti bagi yang menerimanya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh manajemen (Baridwan, 1993:4)

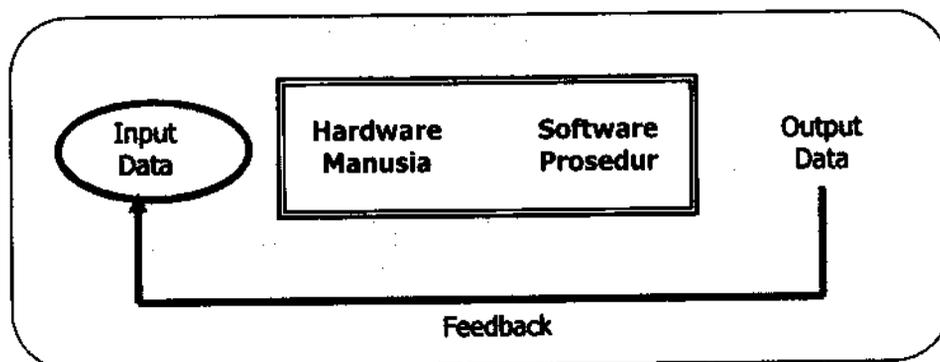
Sumber data berasal dari:

1. Sumber internal, berupa data orang/ karyawan, ada produk/ jasa dan data pemrosesan yang disimpan didalam organisasi.

2. Sumber eksternal, berasal dari berbagai sumber diluar dari entitas organisasi seperti CD ROM, internet, pusat statistik swasta maupun pemerintah, bank dan lain-lain.
3. Data pribadi/ personal, berasal dari kontribusi yang diberikan pengguna/ karyawan berdasarkan keahlian mereka untuk keperluan khusus.

Data diluar organisasi umumnya disimpan di suatu database yang memungkinkan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengakses dan menggunakannya menurut ketentuan dan kebijaksanaan yang telah disepakati bersama. Data yang merupakan input sistem perubahan data diolah oleh manusia sebagai komponen sistem, sesuai prosedur yang ada dengan bantuan hardware dan software menjadi informasi (*output*). Hasil output menjadi *feedback* yang berfungsi sebagai data masukan yang akan diolah untuk keperluan lain.

Pengubahan data menjadi informasi yang menggunakan komputer adalah sebagai berikut (Gambar 4):



Gambar 2.4. Proses Pengubahan Data Menjadi Informasi menggunakan Komputer

Sumber : Perry, System Analyse and Design, 1993:7

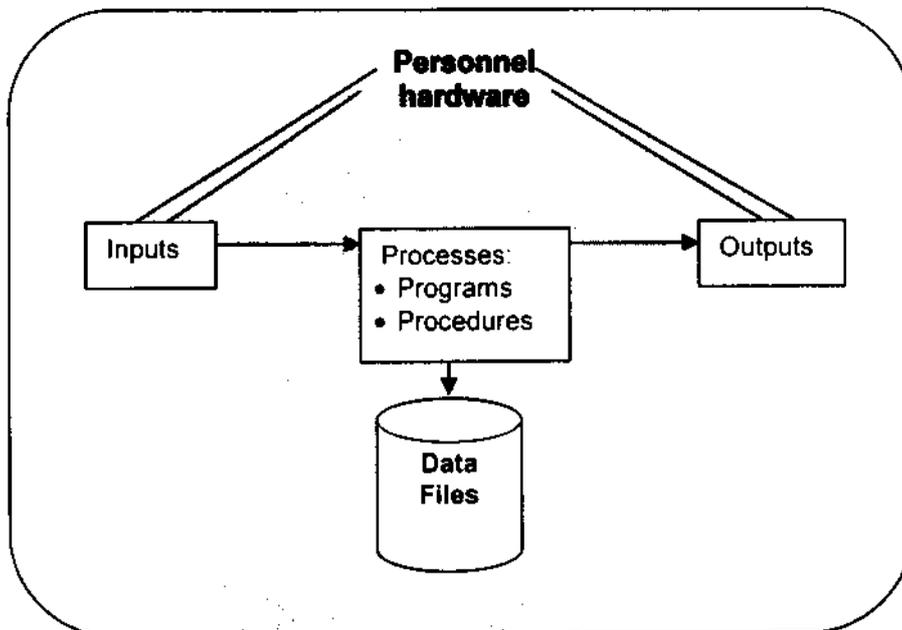
2.2.7.3 Sistem Informasi

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai apa itu sistem dan apa informasi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu *entity*

(kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian sub sistem informasi yang terdiri dari data untuk kemudian diolah menghasilkan suatu informasi untuk tujuan tertentu berdasarkan keinginan si pemakai. Pendapat mengenai sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

“An Information System (IS) is a formulized computer information system that can collect, store, process and report data from various sources to provide the information necessary for management decision making” (Hicks, 1993:2).

Gambar 2.5 mengilustrasikan enam bagian dari suatu sistem informasi, terdiri dari kegiatan input, proses, output, file data, personel (manusia) dan *Hardware* (Hicks, 1993:2). Semua sistem, termasuk sistem informasi dan sistem komputer memiliki input, proses dan output. Proses mentransformasikan input menjadi output (*management informations*). Proses ini sendiri terbagi dalam *computer programs* dan prosedur-prosedur. *Computer programs* dikelola (*executed*) oleh *computer hardware* dan *procedures* dikelola (*executed*) oleh manusia (*people*).



Gambar 2.5 The Parts of an Information System

(Sumber : Hicks, Management Information System, 1993:3)

2.2.7.4 Sistem Informasi Keuangan (*Financial Information System*)

Fungsi keuangan melibatkan arus uang yang terjadi dalam perusahaan. Bidang kegiatan yang terutama dianggap sebagai fungsi keuangan dalam suatu perusahaan antara lain:

- a. Analisis aspek keuangan dari seluruh keputusan
- b. Berapa banyak investasi yang akan diperlukan untuk menghasilkan penjualan yang diharapkan akan dicapai oleh perusahaan. Keputusan ini mempengaruhi sisi kiri neraca-keputusan investasi.
- c. Bagaimana cara memperoleh dana dan menyediakannya untuk pembiayaan aktiva yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang penjualannya menghasilkan pendapatan. Bidang ini merupakan keputusan pembiayaan atau keputusan struktur modal perusahaan, yang mempengaruhi sisi kanan neraca.
- d. Analisis perkiraan neraca tertentu.
- e. Analisis perkiraan rugi laba tertentu: pendapatan dan biaya.
- f. Analisis operasi arus kas dari seluruh jenisnya.

(Weston & Copeland, 1995:5)

Berdasarkan kepentingan dan fungsi keuangan diatas maka diperlukan suatu sistem yang sifatnya terintegrasi untuk memudahkan semua proses dan prosedur keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Sistem informasi keuangan menjadi salah satu tren yang saat ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi semua organisasi apapun bentuknya. Pendapat ahli mengenai Sistem Informasi Keuangan adalah sebagai berikut:

“We use the term of financial Information System to describe the CBIS sub system that provides information to persons and groups both inside and outside of the firm concerning the firm’s financial matter” (McLeod & Scheel, 2001:428). Pendapat lainnya adalah: “computer based financial information system support financial managers in concerning (1) the financing of a business, (2) the allocation and control of a financial” (O. Brian, 1996: 78).

Pendapat lain mengenai Financial Information System ini adalah :

“The financial information system :

- A computer-based information system that works in conjunction with other functional information systems to support the firm's management in solving problems that related to financial operations and status.
- It provides information to persons both inside and outside of the firm.”

(www.uic.edu/classes/idsc/ids531/mclppt/chap20.ppt)

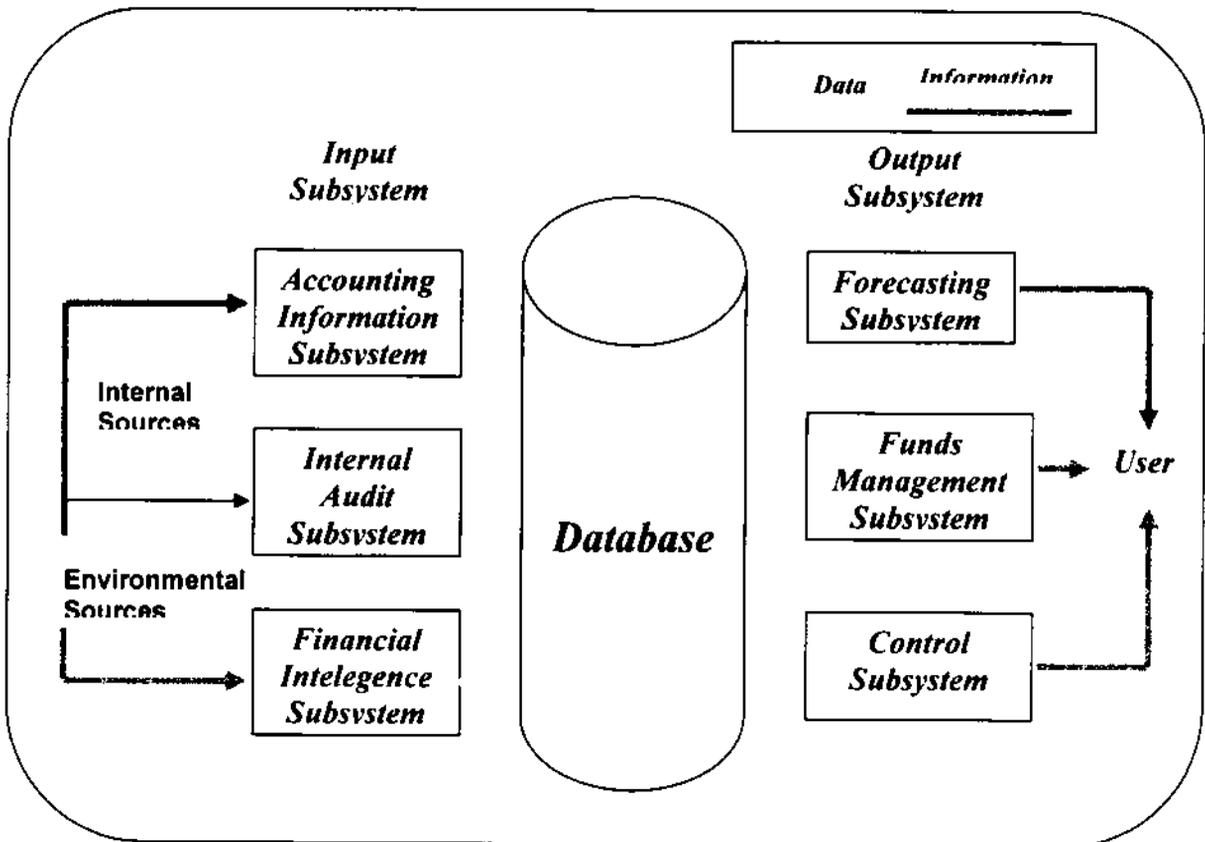
Sedangkan kategori yang terdapat dalam *financial information system* adalah :

- b. *Cash and securities management*
- c. *Capital Budgeting*
- d. *Financial forecasting*
- e. *Financial planning*

(O. Brian, 1996:78)

Sistem informasi keuangan berisi subsistem input dan subsistem output (Gambar 2.6). Subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi (*Accounting Information System Subsystem*), subsistem audit internal (*Internal Audit Subsystem*) dan subsistem intelegen keuangan (*Financial Intelegence Subsystem*). Sedangkan subsistem output terdiri dari sub sistem peramalan (*Forecasting Subsystem*) , subsistem manajemen dana (*Fund Management Subsystem*) dan subsistem pengendalian (*Control Subsystem*).

Dari gambar 2.6 dapat dijabarkan pertama, bahwa *Accounting Information System (AIS)* merupakan subsistem input yang berisi mengenai data deskripsi kejadian keuangan, waktu transaksi terjadi, siapa yang terlibat dan jumlah uangnya. Data ini kemudian di proses dan menghasilkan laporan keuangan dalam berbagai macam format untuk dianalisa sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen.



Gambar 2.6 A Model of a Financial Information System

(Sumber : Mc Leod & Schell, Management Information System, 2001:428)

Sedemikian pentingnya fungsi AIS ini juga ditegaskan sebagai berikut:

"... the AIS is the foundation upon which all information-oriented CBIS subsystem are built. If the firm does not have a good AIS it cannot expect to have a good MIS, good DSS, or expert system" (Mc Leod & Schell, 2001 : 429). Penegasan mengenai fungsi dari AIS ini secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

" ... Accounting Information System functions are :

1. To collect and store data about the organization business activities
2. To provide information usefull for decision making (financial statement, income statement, balance sheet, statement of cashflow, managerial reports, budget, performance reports, list of the budgeted and actual amounts of revenue and expenses and also show the variances, or different between these two amounts)
3. To provide adequate controls to ensure that data are recorded and processed accurately.
4. Ensure that the information that produce by the system is reliable.
5. Ensure that business activities are performed efficiently and in accordance with managements objectives.

6. Safeguard organizational assets. “

(www.wfu.edu/users/hartmawf/tps_mis.ppt)

Kedua, *Internal Audit Subsystem* menjadi subsistem input disebabkan kemampuan dan fungsi *Internal Audit Subsystem* dari sudut pandang keuangan dapat mengevaluasi sekaligus berpengaruh atas operasional perusahaan (organisasi) serta bersifat independent. Data dari *Internal Audit Subsystem* ini menjadi kerangka pedoman dan aturan baku bagi proses data *Accounting Information System (AIS)* maupun data tambahan dari *Financial Intelligence Subsystem*, karena dalam *Internal Audit Subsystem* ini, memuat berbagai peraturan, standar dan pedoman dalam pelaksanaan (*data on standards compliance*) sistem dan prosedur yang ditetapkan (dalam hal ini sistem dan prosedur pelaksanaan akuntansi keuangan daerah) dan menjadi suatu pembatas (*boundary system*) dalam *system environment* bersangkutan pada pengolahan data dalam database baik di lingkup *input system* dalam menghasilkan *output system* dalam *financial information system*. Ketiga, *Financial Intelligence Subsystem* bertujuan untuk mengidentifikasi sumber terbaik penambahan modal dan investasi dari surplus dana yang dihasilkan oleh perusahaan (organisasi). Untuk tujuan ini *Financial Intelligence Subsystem* mengumpulkan data dan informasi dari luar (*data on external sources*) baik itu *stock holders*, komunitas keuangan dan pemerintah, *competitors* yang dapat mempengaruhi arus keuangan perusahaan (www.wfu.edu/users/hartmawf/tps_mis.ppt). Subsistem output dalam konteks Sistem Informasi Keuangan ini adalah pertama, *Forecasting subsystem* memproyeksikan aktivitas jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam suatu lingkup lingkungan ekonomi (*short and long term predictions*). Metode yang dihasilkan dalam subsystem ini ada 2 (dua) metode kuantitatif (*quantitative methods*), kualitatif (*qualitative methods*) dan gabungan keduanya dengan menggunakan fasilitas EMS

(Electronic Meeting System) (www.uic.edu/classes/idsc/ids531/mclppt/chap20.ppt)

Kedua, *Fund Management Subsystem* memberikan analisa arus uang masuk dan arus uang keluar dalam operasional perusahaan (*cash flow analysis*). Pendapat mengenai fungsi dari subsistem ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

“ ... manage to achieve :

- To ensure that revenue flow inflow exceeds expense outflow
- Maintain stability”

(www.uic.edu/classes/idsc/ids531/mclppt/chap20.ppt)

Ketiga, *Control Subsystem* memberikan informasi analisa kinerja keuangan berdasarkan anggaran yang ditetapkan oleh perusahaan dalam berbagai format pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan. Beberapa hal yang dapat dipergunakan dalam analisa ini adalah :

“... are the budgeting process (top down bottom up), budget reports and performance ratio” (web.it.kmutt.ac.th/~tha/MIS/Chapter%20n.ppt).

2.2.8 Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer Based Information System)

Salah satu sumber daya yang paling penting dalam organisasi adalah informasi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas dunia bisnis, membuat informasi sebagai salah satu sumber daya utama dalam sistem organisasi. Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk mengerti dan memahami tentang informasi (*Information Literate*), termasuk fungsi, kegunaan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan informasi.

Perusahaan/ organisasi/ pemerintahan yang menerapkan CBIS (*Computer Base Information System*), akan didukung oleh sistem informasi akuntansi (*Accounting Information System*), Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*), Sistem Pengambil Keputusan (*Decision Support System*) serta Otomasi Perkantoran (*Office Automation*).

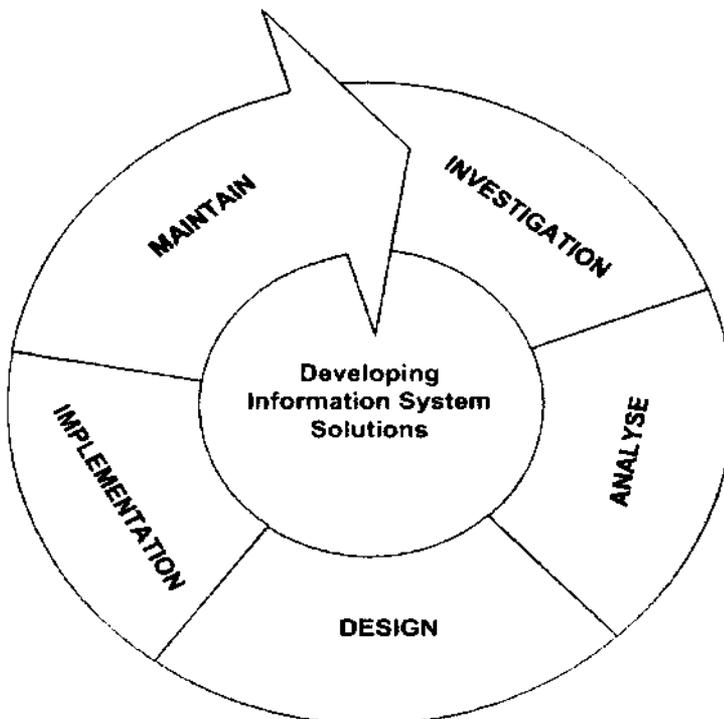
Sumber daya utama pada suatu perusahaan meliputi:

16. Manusia
 17. Material
 18. Mesin
 19. Uang
 20. Informasi
- (Sarno, 1995:30)

Sedangkan elemen komputer terdiri atas (Hutchinson, 1999:7): "...(1) people; (2) procedures; (3) data/ information; (4) hardware; (5) software; (6) communication".

2.2.9 System Development Life Cycle (SDLC)

Sistem Development Life Cycle ini pada dasarnya membahas mengenai daur hidup pembangunan dan pengembangan dari suatu sistem itu sendiri. yang berisi tahapan-tahapan yang sistematis dari sistem tersebut yang terdiri dari penyelidikan (*investigation*), analisa (*analyse*), perancangan (*design*), implementasi (*implementation*), pemeliharaan (*maintenance*). (O' Brian, 1996: 78).



Gambar 2.7 System Development Life Cycle

(Sumber : O' Brian. Management Information System.1996: 78)

McLeod (2001: 123) mendefinisikan *System Life Cycle* sebagai berikut:

“system life cycle is an application of the system approach to the development of a computer based system or subsystem”

Dalam suatu proses perancangan sistem, *system analysis* menjadi dasar penerapan konsep dari suatu sistem yang akan dibangun tersebut. Pendapat mengenai *system analysis* yaitu : “System Analysis is a problem-solving technique that decompose a system into its component pieces for the purpose of studying how well those components parts works and interact to accomplish their purpose” (Whitten et al, 2001:165). Dapat dijelaskan disini secara ringkas mengenai beberapa tahapan dari analisis sistem adalah sebagai berikut:

1. Menentukan secara tepat mengenai sasaran sistem (pengolahan data)
2. Mempelajari bentuk organisasi perusahaan
3. Menganalisis laporan yang saat ini sudah dihasilkan oleh sistem pengolahan data yang saat ini berjalan
4. Melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan sistem dan prosedur yang saat ini dijalankan dalam kegiatan pengolahan data aplikasi tertentu.

(Purwono 2002 : 24-31)

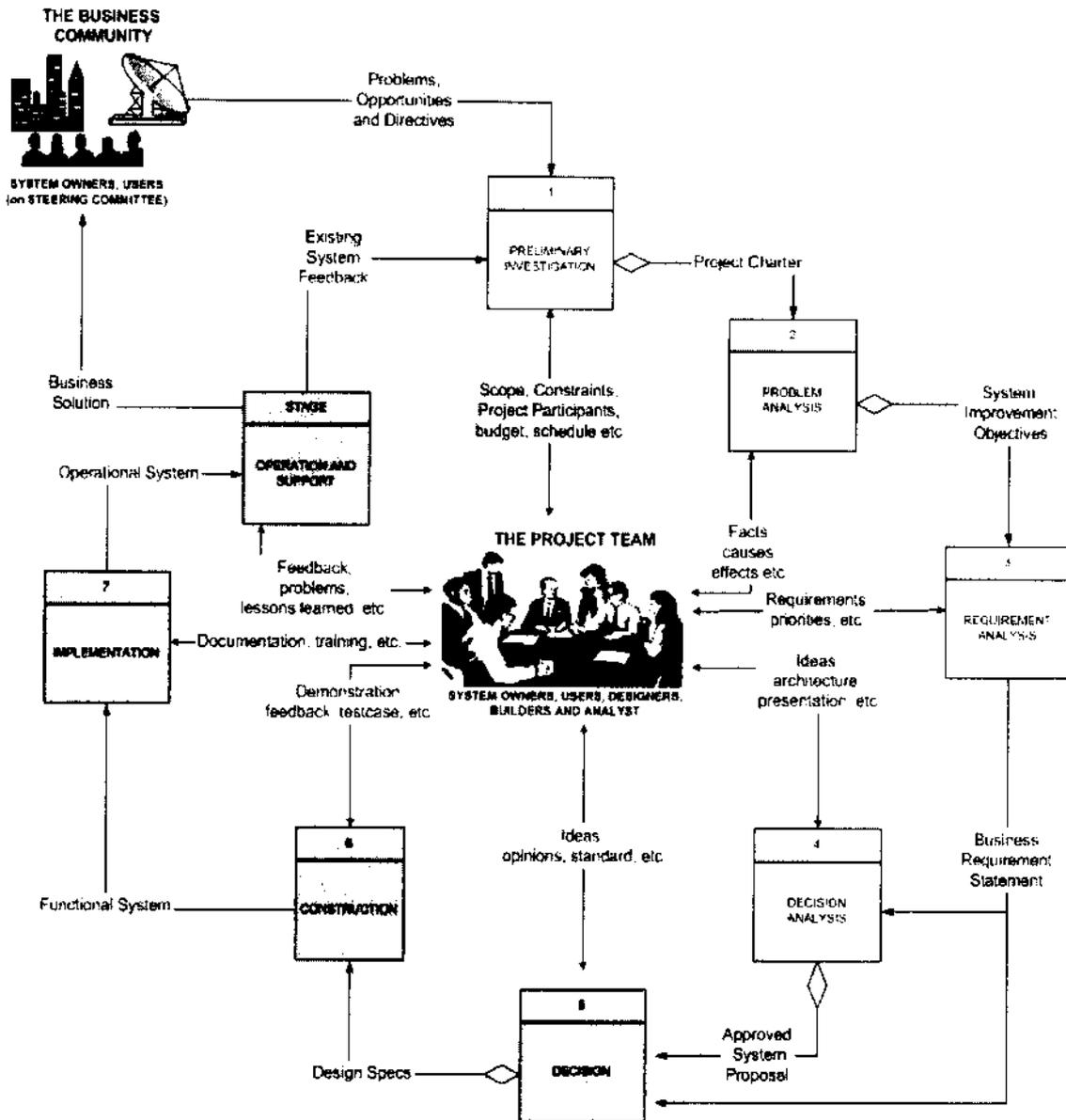
Lebih jelas tahapan dari *system analysis* adalah seperti yang ditunjukkan gambar 2.8.

Berdasarkan gambar diatas tahapan *system analysis* terdiri dari 4 (empat) tahapan (fase di kotak putih) yakni:

1. *Preliminary Investigation*

Preliminary Investigation atau penyelidikan pendahuluan merupakan tahapan dimana semua permasalahan, peluang dan petunjuk yang diterima dari user di analisa. Selain itu *Preliminary Investigation* juga dilakukan atas dasar *feedback* dari sistem yang telah ada (untuk keperluan *upgrade system*). Dalam tahapan ini juga dibahas mengenai ruang lingkup pekerjaan atau sistem yang akan dibuat,

jangka waktu pelaksanaan, kendala-kendala yang dihadapi, anggaran, dan siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan atau proyek terkait.



Gambar 2.8 The Context of Systems Analysis

(Sumber : Whitten et al, System Analysis and Design Methods, 2001:166)

2. *Problem Analysis*

Problem Analysis merupakan tahapan dimana proyek yang ditetapkan dianalisa mengenai berbagai hal terkait dengan sistem yang dikembangkan. Tahapan ini menghasilkan suatu *gap analysis* atas kondisi riil, penyebab dan efek yang ada dalam pekerjaan pengembangan sistem.

3. *Requirement Analysis*

Berdasarkan *Problem Analysis* dihasilkan tujuan dan sasaran dari pengembangan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini telah dilakukan *system requirement* yang untuk kemudian dianalisa lebih lanjut sehingga terbentuk draft model sistem yang diinginkan. Dalam tahapan ini selain dilakukan *requirements* juga dilakukan penetapan prioritas atas *requirement* yang dilakukan.

4. *Decision Analysis*

Berdasarkan keluaran yang dihasilkan dalam *requirement analysis* mengenai draft model sistem maka akan dilakukan analisa lanjutan atas sistem yang akan dikembangkan sehingga dihasilkan usulan draft sistem.

Sistem design menjadi tahapan berikutnya dari konteks konsep yang telah ditetapkan, artinya setelah dilakukan *system analysis* maka akan dilanjutkan dengan *system design*. Lebih lanjut pengertian *System Design* adalah sebagai berikut :

“System design (also called system synthesis) is a complementary problem solving technique (to system analysis) that reassembles a system’s component pieces back into a complete system – it is hoped an improve system. This may involve adding, deleting and changing pieces relative to the original system” (Whitten et al. 2001:166).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perancangan sistem harus diawali dengan analisa sistem yang mencakup kegiatan *preliminary study* dan *user requirement*. Pada hakekatnya *system design* atau perancangan sistem merupakan kegiatan untuk pengembangan sistem dan prosedur baru dalam kaitannya

dengan sasaran – sasaran (baru) yang dikehendaki oleh pihak manajemen (Purwono, 2002:33). Lebih lanjut dapat dijelaskan mengenai sasaran – sasaran yang dimaksud antara lain:

1. Menentukan secara tepat banyaknya informasi yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak yang membutuhkan, agar yang bersangkutan bisa benar-benar terbantu dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melakukan upaya standarisasi, jika bisa dilakukan secara benar akan banyak menghemat waktu dan biaya.
3. Pengembangan sistem pengendalian.
4. Mengurangi fungsi-fungsi yang terduplikasi, baik dalam hal tujuan, operasi, data, form-form, serta laporannya untuk menghindarkan prosedur-prosedur yang tak perlu.

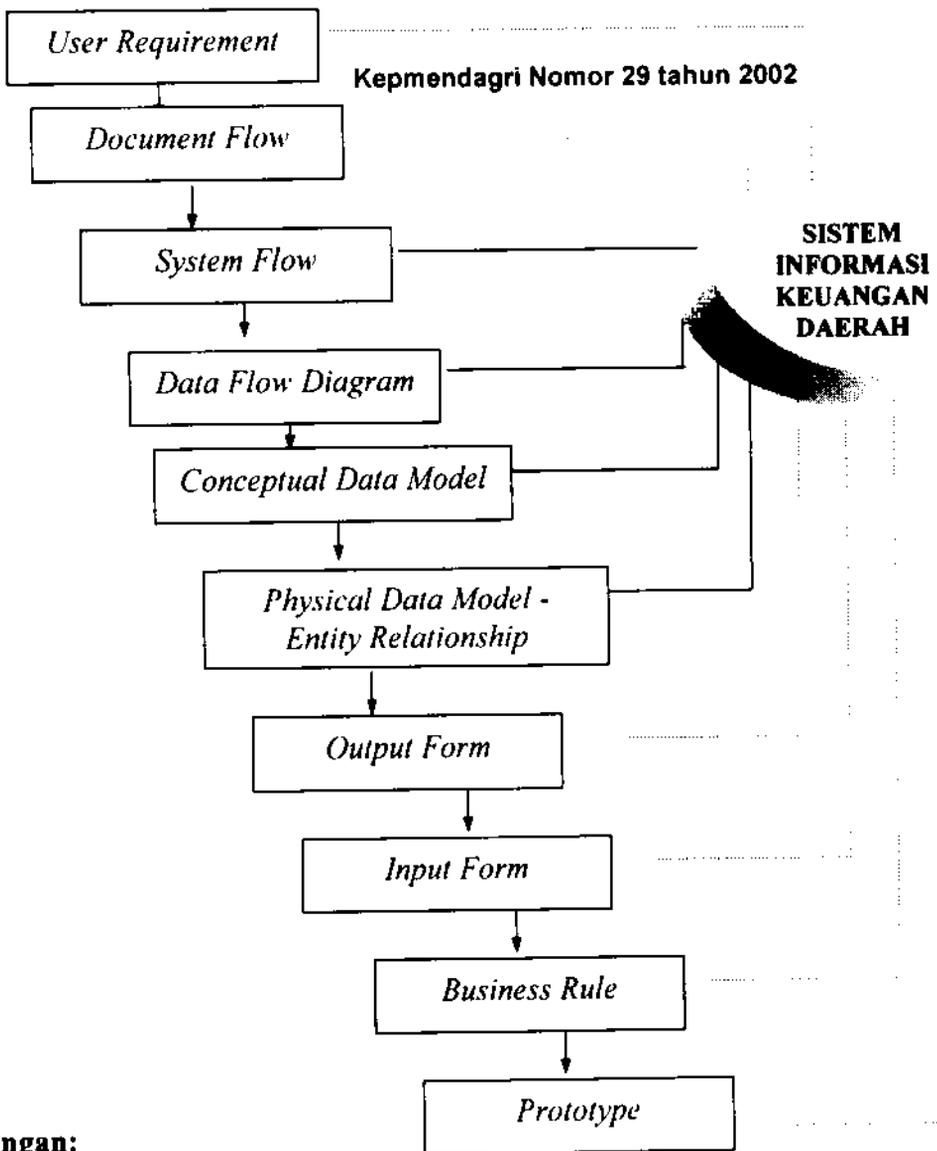
(Purwono, 2002:35)

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian harus sesuai dan terarah dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka perlu dirumuskan kerangka konseptual sebagai kerangka berpikir yang dapat digunakan.



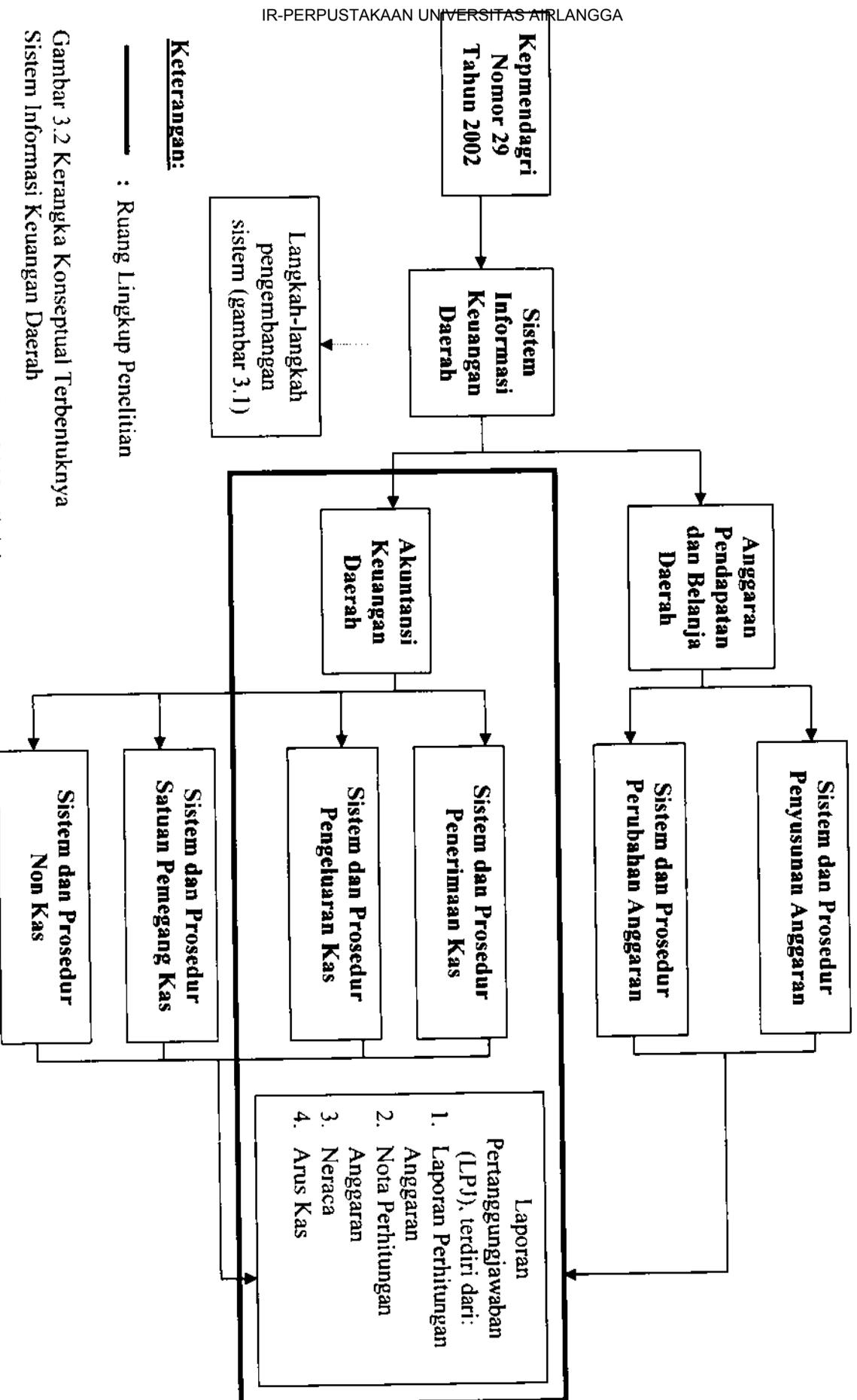
Keterangan:

- : Diteliti
- - - - - : Tidak Diteliti

Gambar 3.1 Langkah- langkah pengembangan sistem Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sumber: SOP, 2000

**ALUR DAN STRUKTUR SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN
KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002**



Keterangan:

————— : Ruang Lingkup Penelitian

Gambar 3.2 Kerangka Konseptual Terbentuknya Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sumber: Keppmendagri Nomor 29 Tahun 2002 (diolah)

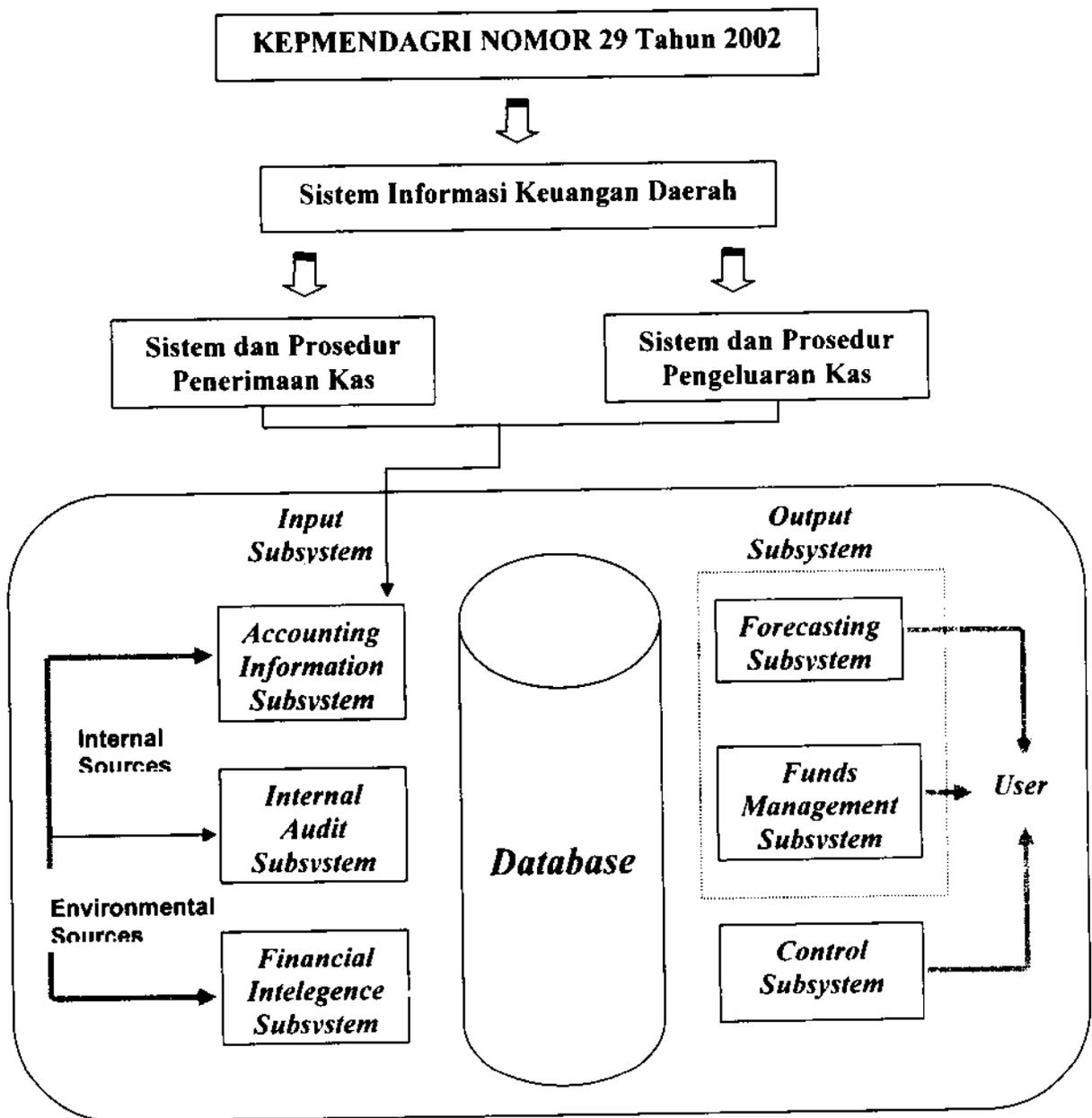
Alur konseptual teknik analisis yang ditunjukkan dalam gambar 3.1 adalah tahapan dari analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga terbentuk suatu Sistem Informasi Keuangan Daerah. Konsepsi diatas menjadi acuan penelitian dalam melakukan analisa dan pengembangan sistem informasi yang akan dilakukan. Pada item *user requirement* dan *document flow* menunjukkan garis putus-putus yang artinya pada item tersebut tidak dilakukan proses penelitian, hal ini disebabkan oleh pada tahapan *user requirement* semua *template*, metode dan konsep (baik anggaran maupun akuntansi) yang digunakan mendasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Begitupula dengan tahap *document flow*, telah dijelaskan secara jelas bab per bab, pasal per pasal dan ayat per ayat dari setiap subsistem yang ada, dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Metode ini dalam istilah *system design* seringkali disebut dengan metode *waterfall* (SOP, 2000). Sementara itu empat tahapan terakhir dimulai dari *input form*, *output form*, *business rule* dan *prototype* tidak akan dianalisa dalam penelitian ini (dikeluarkan dari ruang lingkup penelitian). Keempat tahapan tersebut membutuhkan penelitian dan koordinasi mendalam (*customisasi*) antara peneliti dan pihak eksternal diluar lingkup penelitian ini, dalam hal ini adalah user dan programmer. Dari pengembangan sistem ini sampai terbentuknya suatu tabel (munculnya *field* dan *variable*) dalam suatu database telah dapat mewakili terbentuknya suatu sistem informasi berbasis komputer yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh programmer berdasarkan kebutuhan user.

Alur proses sistem informasi keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 (gambar 3.2) menjadi titik awal sekaligus pedoman dalam penyusunan sistem informasi keuangan daerah. Penelitian ini membagi sistem informasi keuangan daerah menjadi dua subsistem berbeda yakni subsistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan subsistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Subsistem APBD terbagi dalam 2 (dua) sub subsistem yakni Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran. Penelitian ini memberikan batasan bahwa APBD tidak dalam konteks penelitian keuangan daerah yang dimaksud atau dengan kata lain bahwa sistem informasi keuangan ini menerima APBD sebagai data matang (secara teknis telah disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh kepala daerah) dan menjadi data bagi proses selanjutnya. Sementara itu untuk subsistem Akuntansi Keuangan Daerah (AKD) terbagi menjadi 4 (empat) sub subsistem yakni Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas, Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas, Sistem dan Prosedur Selain Kas dan Sistem dan Prosedur Satuan Pemegang Kas. Sistem dan prosedur Non kas tidak diambil dalam penelitian ini dengan alasan bahwa pengelolaan item non Kas menjadi suatu prosedur tersendiri, dan merupakan data input bagi sistem ini (misalnya: Aktiva Tetap, Persediaan). Tujuan utama dari pembentukan sistem informasi keuangan daerah yang sekaligus merupakan output dari sistem ini adalah terbentuknya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dipergunakan oleh seorang kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan kekuasaan dan wewenangnya. LPJ ini menunjukkan tingkat kinerja yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (DPRD).

Kerangka diatas (gambar 3.1 dan gambar 3.2) merupakan ruang lingkup penelitian dari sisi teknis analisis yang dipergunakan dan batasan lingkup obyek yang diambil dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 untuk penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan pembatasan - pembatasan konseptual teknik dan konseptual berdasarkan lingkup bahasan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut diatas, maka disusun kerangka lanjutan yang memberikan gambaran mengenai sistem informasi keuangan daerah berdasarkan konsep teoritis sistem informasi keuangan (*financial information*

system) (gambar 3.3). Draft sistem ini menggambarkan *Accounting Informatin System (AIS)*, *Internal Audit Subsystem* dan *Financial Intelegence Subsystem* sebagai subsistem input serta *Control subsystem* sebagai subsistem output. Selain itu terdapat *forecasting subsystem* dan *Funds Management subsystem* yang digambarkan dalam garis putus-putus, karena tidak menjadi lingkup analisis lebih lanjut dalam penelitian, hanya dijelaskan sebagai draft deskripsi pendahuluan.



Gambar 3.3 Alur Konsep Penelitian dalam konteks *Financial Information System (FIS)*

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian pengembangan sistem informasi keuangan dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Sebagai suatu strategi penelitian, penelitian studi kasus telah digunakan pada berbagai lapangan antara lain seperti :

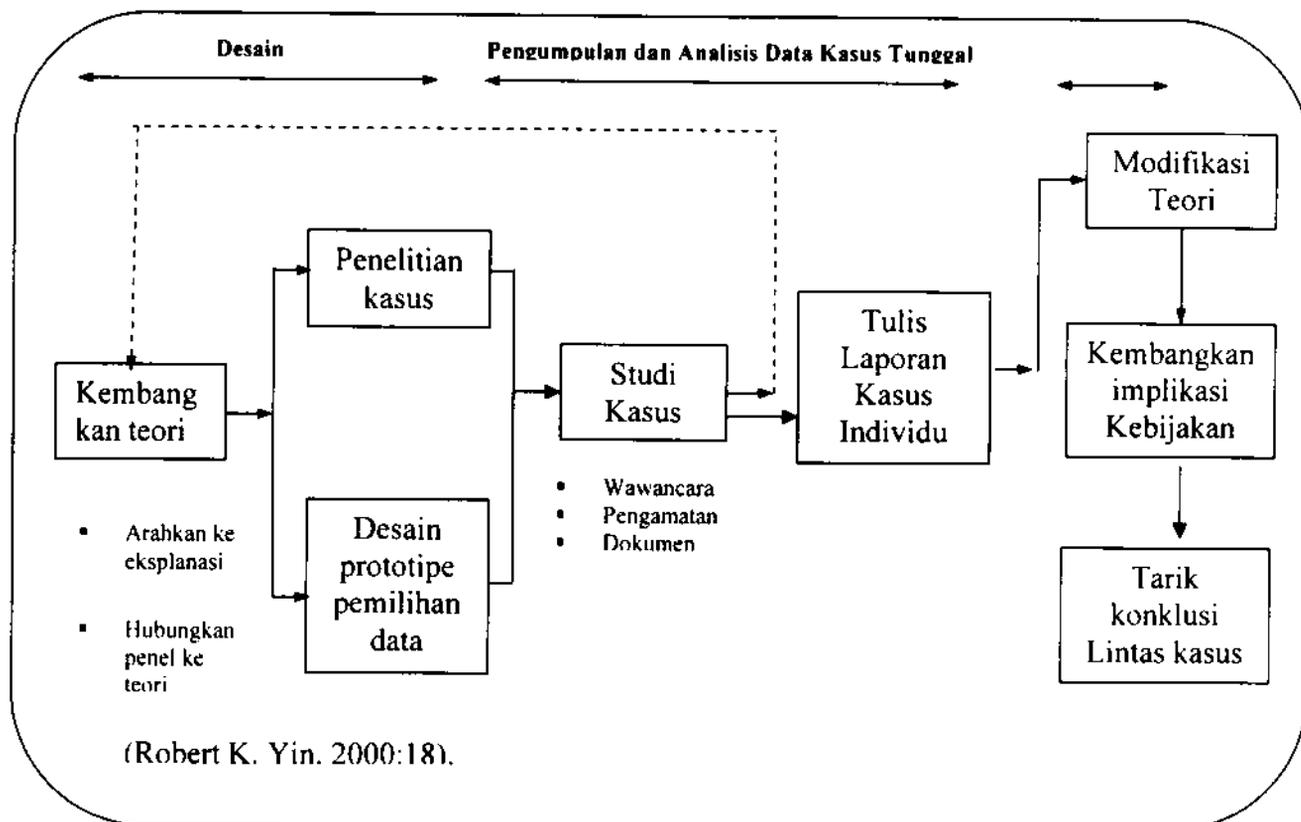
- Penelitian kebijakan, ilmu politik dan administrasi umum;
- Psikologi masyarakat dan sosiologis;
- Studi-studi organisasi dan manajemen;
- Penelitian perencanaan tata kota dan regional, seperti studi-studi program, lingkungan, atau agen-agen umum serta;
- Pengerjaan berbagai disertasi atau tesis dalam ilmu-ilmu sosial.(Yin, 2000:3)

Definisi studi kasus (Stake, 1995: xi), sebagai berikut: "case study research is the study of particularity and complexity of a single case, coming to understand its activity within important circumstances." Definisi mengenai studi kasus yang lain (Yin,1994:13) adalah sebagai berikut:

"A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary inquiry phenomenon within its real life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident".

Pemilihan metode ini diambil dengan pertimbangan bahwa peristiwa yang akan diselidiki diangkat atas kebutuhan daerah terhadap suatu sistem yang mampu mendukung dan mempermudah pekerjaan dan operasionalisasi manual yang dilakukan berkaitan dengan segala aktivitas keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Metode Studi Kasus



Gambar 4.1 Metode Studi Kasus

Langkah awal dalam merancang penelitian didasarkan pada adanya suatu teori yaitu sistem informasi keuangan (*financial information system*), *system development life cycles* (khusus pada materi *system analysis and design method*) dan dikeluarkannya suatu aturan pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam format Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan perancangan suatu sistem informasi keuangan daerah menjadi fokus penelitian ini. Didasarkan pada rumusan masalah maka dilakukan proses rancangan pemilihan data, oleh karena itu maka dilakukan suatu evaluasi atas beberapa informasi terkait prosedur yang terjadi pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan diskusi atas semua yang terkait dengan proses yang terjadi selama ini dan kesesuaiannya dengan apa yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Dari sini akan

ditemukan beberapa item yang sekiranya tidak terdapat dalam ketentuan di Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 atau bahkan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.

Setelah proses diskusi kemudian akan dilakukan proses dokumentasi dalam bentuk tulisan yang secara kualitatif dapat mencerminkan kondisi senyatanya dari beberapa proses yang terjadi yang tidak dapat dijelaskan secara jelas dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002. Proses dokumentasi yang dimaksud tertuang dalam konteks alur dan teknik analisi dari pendekatan *system analysis and design methods* yang digunakan dalam kerangka konseptual penelitian.

4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Bagian Keuangan Sekertariat Daerah kabupaten Situbondo. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian, antara lain:

- a. Peneliti berasal dari daerah ini, sehingga sebagai upaya untuk ikut memberikan sumbangsih dalam mengembangkan pembangunan daerah.
- b. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah cukup terwakili sebagai salah satu bentuk usaha standarisasi sistem informasi keuangan daerah yang berdasar pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

4.3 Pembatasan Masalah

Perancangan sistem informasi keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi fokus penelitian ini yang didukung oleh dokumen-dokumen yang terlibat dalam proses pembukuan khususnya di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Situbondo. Beberapa hal yang menjadi kendala sekaligus menjadi batasan dalam proses perancangan sistem informasi

keuangan daerah ini, baik mengenai pedoman tambahan dan kerangka acuan metode, prinsip dan standar akuntansi karena beberapa hal, yang antara lain:

- Belum adanya standar akuntansi pemerintahan atau bahkan petunjuk teknis dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini yang menjadi acuan dalam membentuk sistem informasi keuangan daerah dengan lebih sempurna.
- Terbatasnya waktu penelitian bagi peneliti, sehingga peneliti hanya membatasi lingkup penelitian sistem informasi keuangan daerah hanya pada sistem dan prosedur penerimaan kas (umum dan PFK/ Perhitungan Pihak Ketiga) dan sistem dan prosedur pengeluaran kas (beban tetap/ umum dan PFK/ Perhitungan Pihak Ketiga), sementara dari teknik analisis yang dipergunakan hanya 4 (empat) yaitu *system low*, *data flow diagram*, *conceptual data model* dan *physical data model entity relationship*).

4.4 Desain Penelitian

4.4.1 Penentuan Pertanyaan Penelitian

Penentuan pertanyaan yang akan diajukan disini berkaitan dengan variabel-variabel data yang akan terlibat dalam penyusunan dan perancangan kerangka sistem informasi keuangan daerah ini. Pertanyaan yang diajukan tetap berpegang pada standar acuan yang telah digariskan sebelumnya, yakni berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Mengapa sistem informasi keuangan daerah yang terdahulu dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah dalam menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002?

2. Bagaimana format perancangan sistem informasi keuangan daerah yang berdasar pada ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas?

4.4.2 Proposisi yang digunakan

Proposisi merupakan komponen kedua, setiap proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Adapun penelitian ini memiliki proposisi yaitu:

“Perancangan sistem informasi keuangan daerah berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga prinsip tranparansi dan akuntabilitas sebagai awal tonggak konsep *good governance* dapat tercapai”.

4.4.3 Unit Analisis

Unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan ‘kasus’ dalam penelitian yang bersangkutan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah suatu “perancangan sistem informasi keuangan daerah berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas”.

4.4.4 Penegasan logis antara data dengan proposisi

Data yang didapat dari Bagian Keuangan akan diimplementasikan dalam format dokumentasi suatu desain sistem informasi keuangan daerah. Namun kemungkinan tidak semua data yang didapat nantinya akan menjadi format variabel penelitian ini, hanya variabel kunci yang akan menjadi pokok atau induk dari suatu perancangan sistem ini. Penelitian ini akan menunjukkan beberapa pola dari perancangan sistem informasi keuangan daerah yang dirancang berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

4.4.5 Kriteria untuk menginterpretasikan temuan

Kelengkapan dari tiap tahapan teknik analisis dan pendokumentasiannya, akan menjadi media interpretasi penelitian ini. Pada deskripsi desain penelitian dijelaskan mengenai perangkat –perangkat yang dipergunakan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tiap item yang harus dipenuhi dalam suatu desain penelitian (tabel 4.1)

4.5 Sumber Data

Pengumpulan data yang dapat diperoleh untuk kepentingan penelitian ini dari beberapa sumber antara lain:

- Dokumentasi (*documentation*), artikel-artikel, Surat Keputusan, jurnal, memorandum, makalah seminar dan dokumen administratif lainnya yang *download* melalui internet, media cetak, maupun dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Rekaman arsip (*archival records*), rekaman keorganisasian di lingkungan Bagian Keuangan, rekaman dokumen yang berkaitan dengan fungsi keuangan yang terlibat dilingkungan pemerintah propinsi.
- Wawancara (*Interviews*), wawancara dalam penelitian studi kasus ini bersifat *Open-Ended*, dimana dapat ditanyakan kepada responden kunci tentang fakta-fakta atau suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.
- Observasi langsung (*direct observation*), merupakan suatu metode *generating data*, dalam hal ini dengan dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi penelitian yakni Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Tabel 4.1
Deskripsi Desain Penelitian

No	Desain Pertanyaan	Proposisi	Data	Metode Pengumpulan data
1.	Mengapa sistem informasi keuangan daerah yang terdahulu dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah dalam menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002?	Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang mengatur tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan yang dimiliki - Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 - Prosedur dan sistem yang digunakan - Penerapan konsep akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi - Dokumentasi - Wawancara - Observasi - Wawancara
2	Bagaimana mengelola keuangan daerah yang berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparansi dan akuntabilitas?	Perancangann sistem informasi keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga prinsip tranparansi dan akuntabilitas sebagai awal tonggak konsep <i>good governance</i> dapat tercapai.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur keuangan manual sehari-hari yang terjadi - Bukti transaksi apa saja yang diterima dan dikeluarkan oleh bagian keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Wawancara - Dokumentasi - Observasi

(Sumber : olahan, 2003)

4.6 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dibagi menjadi empat tahapan utama:

Tahap I

Pada tahapan ini konteks sumber dari pedoman yang dijadikan *benchmarking* penelitian ini, yakni Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Dari berbagai perkembangan dan polemik yang muncul di lapangan ternyata implementasi dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 ini belum dapat dipergunakan secara maksimal, mengingat belum adanya alat pendukung yang tepat, misalnya dari aspek teknologi melalui penerapan sistem informasi yang tepat. Aspek teknologi dalam format sistem informasi inipun, sebenarnya masih memerlukan suatu kepastian akan validitas dan reliabilitas dari sistem tersebut atas konsep-konsep yang dipergunakan melalui peranan teknologi ini. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dan prosedur standar mengenai arus keuangan daerah ini sendiri. Oleh karena itu berbagai sumber data dari Badan Akuntansi Negara dan sumber lainnya terbitan Departemen Keuangan menjadi acuan penting terciptanya validitas dan reliabilitas atas konsep sistem yang ditawarkan.

Tahap II

Pada tahapan kedua ini adalah mengajukan proposal penelitian di salah satu pemerintahan daerah, dalam hal ini Bagian Keuangan Pemerintah kabupaten Situbondo. Pada tahapan ini akan dilakukan beberapa analisa lanjutan mengenai format dokumen yang akan terlibat langsung dalam penelitian ini. Format dokumen yang dimaksud adalah beberapa dokumen yang secara garis besar tercantum dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi penelitian dalam melakukan perancangan sistem informasi keuangan daerah ini.

Tahap III

Pada tahapan ini akan melakukan analisis kebutuhan sistem pada sistem informasi keuangan daerah, mulai dari subsistem input sampai dengan subsistem output. Arus dokumen yang terlibat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Kondisi ini menjadi *rule system* sekaligus *rule business* bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini menjadi output utama dari sistem yang dirancang dalam hal ini sistem informasi keuangan daerah.

4.7 Teknik Analisis

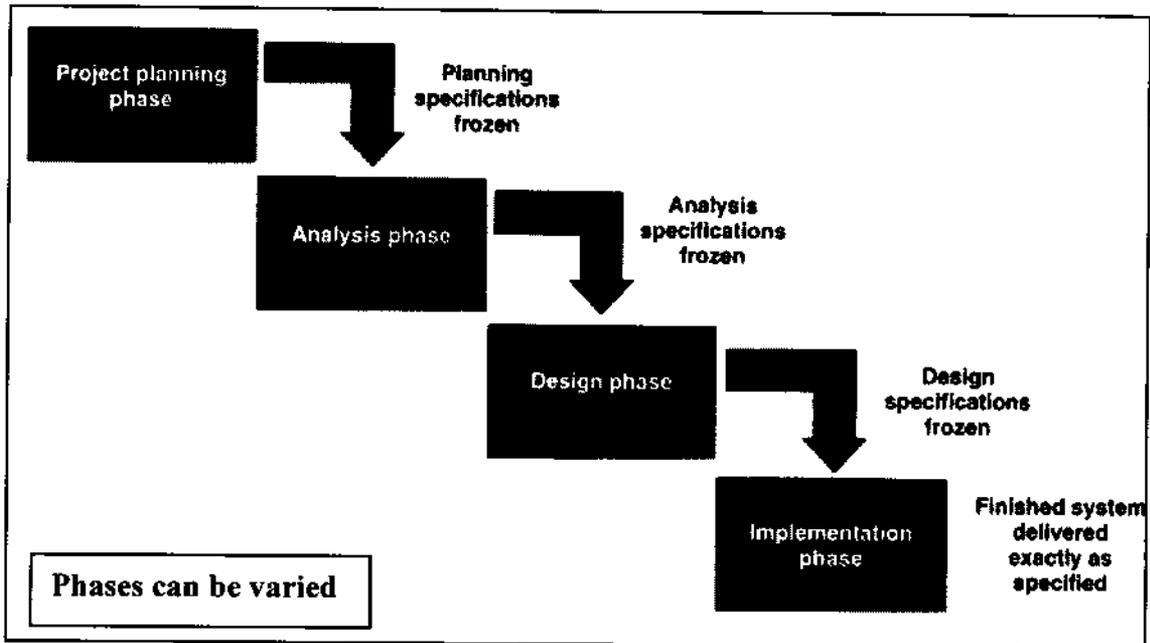
Pada penelitian ini dilakukan suatu analisis eksplanasi dengan menyusun data yang diperoleh dengan melakukan suatu proses dokumentasi yang sistematis atas data yang diperoleh untuk kemudian dihubungkan dengan fokus penelitian yang mengarah pada suatu perancangan sistem. Pada tahapan analisis ini sangat bergantung dengan kelengkapan data yang diterima sehingga dapat terjalin suatu sistem yang *integrate*. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan dalam suatu perancangan sistem selengkapnyanya.

4.7.1 Riset Teknologi

Sebelum menginjak pada bahasan mengenai tahapan atau langkah dalam mendesain suatu sistem informasi diperlukan suatu riset teknologi. Pada penelitian Sistem Informasi Keuangan daerah teknologi yang akan digunakan selama proses perancangan sistem ini di antaranya : Sistem Operasi Windows 98 (kompatible untuk windows seri 9x lainnya maupun 2000), Sybase Power Designer versi 6-32 bit-*Procest Analyst* dan Sybase Power Designer versi 7.5 *Data Architech*, Visio – 2002.

4.7.2 Proses Desain

Dalam suatu proses desain ada beberapa metode yang dapat digunakan, penelitian ini menggunakan metode *waterfall*, seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut:



Gambar 4.2 System Development Life Cycle (SDLC) Model *Waterfall*

Sumber : courses.nnu.edu/cs337bm/03chapter.ppt

Gambar diatas menjelaskan bahwa fase perencanaan menjadi *on top proses* dari suatu proses desain yang menggunakan metode *waterfall*, yang untuk kemudian dilakukan tahapan analisa dari *system requirements* dan *system planning* yang telah dibentuk. Fase desain menjadi proses ketiga setelah adanya analisa dari sistem yang akan dibangun. Kemudian akhirnya fase implementasi dari desain yang telah dibuat. Metode *waterfall* termasuk dalam kategori pendekatan *structure* dalam perkembangannya telah banyak digantikan dengan metode *Iterations Across* yang menggunakan pendekatan *object oriented*.

Pertimbangan diambilnya metode *waterfall* dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode *waterfall* ini sangat cocok diterapkan pada penelitian ini dalam mendesain Sistem Informasi Keuangan Daerah, karena lingkup penelitian mencakup hal-hal

yang sifatnya tetap dan mengikat yakni beracuan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sebagai aturan terbaru dalam membentuk sistem informasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai hal berkaitan dengan *main requirement*, *main procedures* sekaligus *main template* secara jelas tertuang sehingga tidak ada proses perubahan *requirement* atau bahkan proses customisasi.

- b. Metode *waterfall* adalah metode termudah yang bisa diterapkan dan peneliti telah memiliki pengalaman yang cukup dan lebih familiar dengan metode ini.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas mengenai metode desain sistem, secara spesifik desain sistem pada penelitian bisa terbagi dalam 10 langkah antara lain:

4.7.2.1 User Requirement

Pada tahapan ini merupakan langkah awal dalam melakukan suatu perancangan sistem, dimana user akan mendaftar semua kebutuhan yang diperlukan untuk terbentuknya sistem informasi yang direncanakan.

4.7.2.2 Document Flow

Pada tahapan ini akan dipaparkan mengenai arus dokumen dan sumber data yang digunakan untuk setiap tahapan proses yang terjadi sampai pada munculnya output atau laporan.

4.7.2.3 System Flow

Sistem flow menunjukkan prosedur suatu sistem pada setiap bagian/ divisi/ *external entity* yang terlibat dalam sistem terkait. Dalam tahapan ini tidak hanya menjelaskan suatu dokumen mengalir dari masing-masing *external entity* terkait tetapi juga menjelaskan bagaimana suatu dokumen terbentuk.

4.7.2.4 Data Flow Diagram

Dalam membuat DFD suatu sistem dibuat dengan cara menggambarkan level-level tingkatan dari proses-proses yang ada didalam sistem tersebut. Teknologi

pendukung pada tahapan ini adalah Power Designer 6-32 *Power Analyst* dari Sybase versi 2001.

4.7.2.5 Conceptual Data Model (CDM)

Conceptual Data Model menunjukkan obyek-obyek data atau fungsional dari dari masing-masing proses dalam sistem bersangkutan yang telah terangkai dalam suatu sistem terintegrasi. Secara jelas definisi CDM sebagai berikut:

“ ... conceptual Data Model to model overall conceptual resources to represent a physical system on physical data model (Sybase, November,2001:v)”.

Pernyataan diatas memberikan pengertian bahwa conceptual data model menunjukkan hubungan atau relasi tabel data yang mencerminkan rangkaian proses dari sistem. Teknologi pendukung pada tahapan ini adalah Sybase Power Designer Data 6-32 *Power Analyst, 1991-1997*.

4.7.2.6 Physical Data Model (PDM) -Entity Relationship (ER)

Physical Data Model (PDM) menunjukkan rangkaian hubungan obyek-obyek data atau fungsional dari suatu sistem fisik terstruktur dari suatu proses sistem. Lebih jauh lagi pengertian PDM adalah sebagai berikut :

“... Physical Data Model to model the overall physical structure of a database, taking into account DBMS software or data storage structure considerations (Sybase, November,2001 :v)”.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa PDM digunakan untuk membuat suatu model struktur *physical*, untuk dibawa kedalam suatu perancangan database dan suatu pertimbangan data *storage*, yang mana juga menjelaskan hubungan dari masing-masing tabel yang ditunjukkan dengan field *primary key*. Teknologi pendukung pada tahapan ini adalah dan Sybase Power Designer versi 7.5 *Data Architech, 1991-2000*.

4.7.2.7 Input Form

Merupakan form input dari sistem informasi yang bersangkutan, input form ini berisi data yang disebut dengan data input yang nantinya akan digunakan sebagai item masukan dalam proses database berdasarkan masing-masing fungsi atau proses yang diinginkan dalam suatu sistem.

4.7.2.8 Output Form

Kebalikannya dengan output form, merupakan output dari sistem informasi yang menyajikan beberapa informasi penting dan dibutuhkan oleh pengguna informasi (user), lazimnya disebut dengan keluaran.

4.7.2.9 Business Rule

Pada tahapan ini akan dibahas mengenai aturan-aturan dan konsep yang berlaku secara manual berdasarkan suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

4.7.2.10 Prototype

Tahapan ini memberikan gambaran mengenai format aplikasi yang telah menjadi suatu template aplikatif dimana fungsi – fungsi dari sistem informasi keuangan dimaksud terealisasi.

4.8 Kualitas Desain Penelitian

Adapun untuk pencapaian kualitas suatu desain penelitian studi kasus pada penelitian ini akan dilakukan 4 (empat) taktik uji kualitas studi kasus, yang terdiri dari:

4.8.1 Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Pada penelitian kuantitatif taktik uji ini disebut dengan validitas internal. Uji ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moleong, 2002:173).

4.8.1.1 .Menggunakan multi sumber bukti, dalam hal ini dibicarakan dengan pihak lain /orang lain yang mengerti mengenai subyek, obyek yang dipergunakan dalam penelitian ini bahkan teknologi yang dipergunakan, misal *template* sistem operasi yang dipergunakan harus kompatible (dapat dipergunakan lebih fleksibel, jikalau seandainya ada perubahan struktur sistem) dengan beberapa rekan dari LPM-ITS Surabaya (sekarang menjadi LPPM ITS) dan rekan-rekan di perusahaan *software developer* (PT. Limaxindo Intersistem).

4.8.1.2 Triangulasi, berdasarkan pendapat dari Cano yang mengutip dari pendapat Denzin (1970) “triangulation is the collection of information from diverse range of individuals and settings, using a variety of methods”. Pada proses ini dilakukan proses cross check data yang diperoleh dari para pejabat pemerintah daerah kabupaten Situbondo dengan informasi lain yang berasal dari wawancara pihak lain terkait maupun melalui dokumen tertulis lainnya.

4.8.1.3 Key Informan, penyampaian kembali hasil temuan secara tertulis kepada informan , yaitu dengan aparaturnya pemerintahan daerah yang terlibat dalam hal ini bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten Situbondo.

4.8.2 Keteralihan (*Transferability*)

Pada penelitian kuantitatif uji ini disebut dengan validitas eksternal yang menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku dan diterapkan pada semua konteks populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang representatif mewakili penemuan tersebut. Keteralihan merupakan persoalan empiris yang bergantung pada persamaan persepsi antara pengirim dan penerima (Moleong, 2002:173). Dalam hal ini akan dilakukan

pengumpulan pencarian dan pengumpulan data kejadian empiris tentang kesamaan konteks.

4.8.3 kebergantungan (*Dependability*)

Pada penelitian kuantitatif reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi, jika dua atau beberapa kali pengulangan menunjukkan hasil secara esensial sama maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Sedangkan pada konsep kebergantungan ini lebih luas dari pada reliabilitas karena konsep ini memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lain yang tersangkut (Moleong, 2002:174).

4.8.4 Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian atau dalam penelitian kuantitatif disebut dengan objektivitas. Dalam konsep kepastian ini sesuatu dapat dikatakan objektif atau tidak bergantung pada persetujuan dari beberapa orang terhadap pandangan, pendapat atau penemuan seseorang.

4.9 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan *study notes* dari cano (www.qmuc.ac.uk/psych/Rtrek/study_notes/web/sn10_1.htm#5) yang dikutip dari pendapat Stake (1994:238) menyebutkan bahwa:

“Case study researchers usually describe their research in terms of the following elements:

- a. the nature of the case
- b. its historical background
- c. the physical setting
- d. other contexts, such as, economic, political, legal, aesthetic etc.
- e. other cases through which this case is recognised
- f. those informants through whom the case can be known” .

Penelitian ini memberikan batasan-batasan tertentu namun tetap tidak keluar dari maksud dan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, serta mampu

memberikan suatu hasil dan simpulan yang nantinya dapat digunakan dalam telaah penyusunan kebijakan pemerintah daerah khususnya Bagian Keuangan dalam memudahkan dan melancarkan kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Situbondo untuk menyampaikan suatu Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD Kabupaten Situbondo. Adapun batasan penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian ini merupakan suatu perancangan sistem informasi keuangan daerah berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sehingga tercapai prinsip transparan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
2. Penelitian ini dilakukan dilingkungan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta melibatkan arus dokumen keuangan daerah.

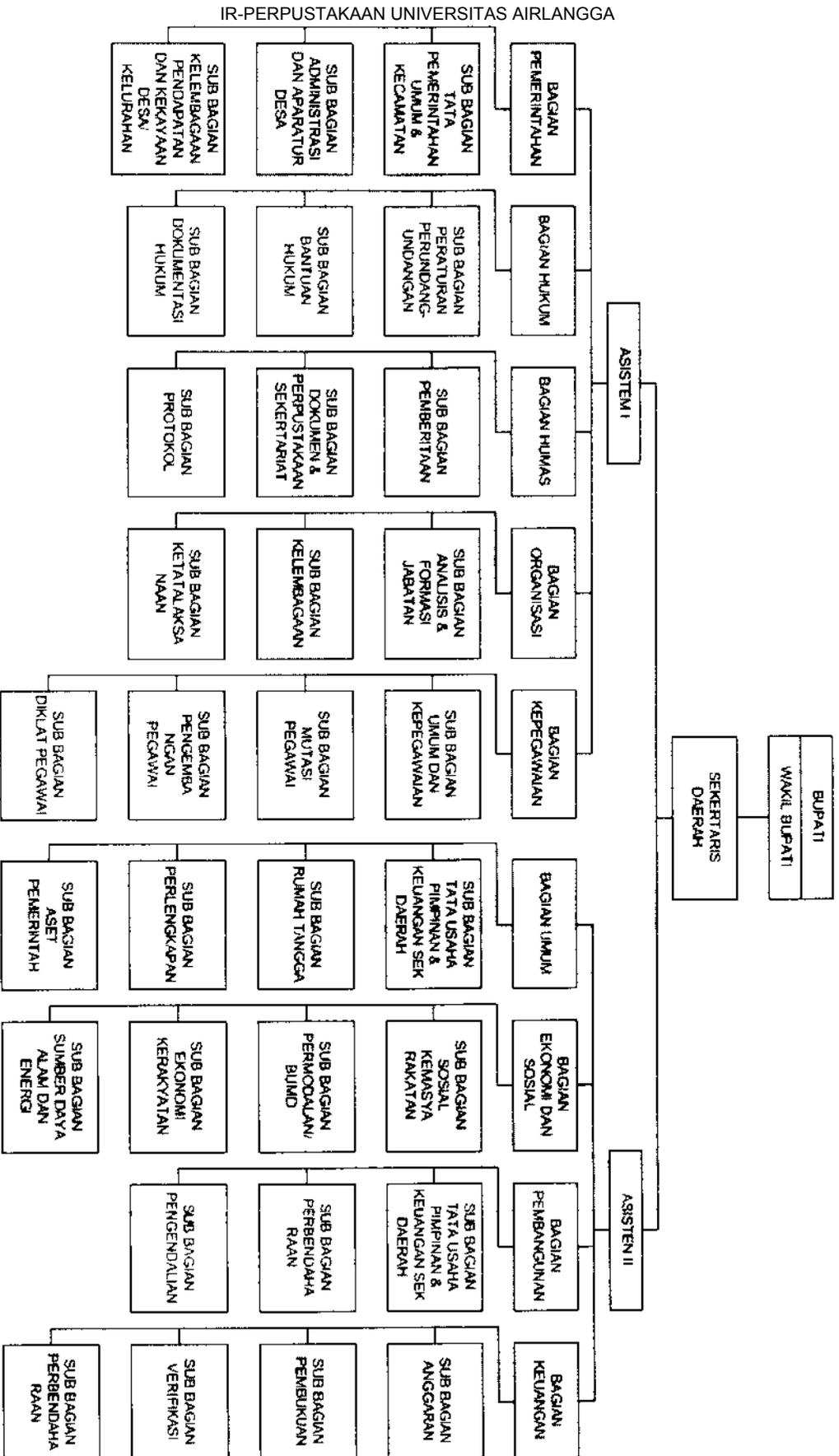
BAB V**HASIL PEMBAHASAN****5.1 Gambaran Bagian Keuangan Kabupaten Situbondo**

Pemerintah Kabupaten Situbondo terletak di Jalan Raya PB. Sudirman. Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana yang ditetapkan oleh Perda Kabupaten Situbondo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, perubahan dan perhitungan APBD Kabupaten serta membina administrasi keuangan. Berdasarkan tugas tersebut Bagian Keuangan Pemerintah kabupaten Situbondo berada dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Situbondo. Adapun dalam menyelenggarakan tugas tersebut bagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD Kabupaten;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan daerah;
- c. Pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan.
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Asisten II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disajikan bagan struktur organisasi Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo :

Tabel 5.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo



Sumber : Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, 2002

Seperti halnya dengan pemerintah daerah lainnya, kabupaten Situbondo selama belasan tahun ini, menerapkan standar pembukuan dan sistem informasi keuangan berdasarkan sistem berlaku peninggalan Belanda yaitu MAKUDA (Manajemen Keuangan Daerah). Kemudian pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya PP 105 Tahun 2001 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Kabupaten Situbondo belum dapat merespon mengenai format pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud. Pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 mengenai aturan pengurusan dan pengelolaan keuangan daerah ini, mulai membuka wacana aparatur pemerintah kabupaten Situbondo, khususnya Bagian Keuangan. Namun adanya keharusan penilaian kembali atas asset (*appraisal*) yang tercantum dalam aturan Kepmendagri Nomor 9 Tahun 2002 ini membuat pemerintah kabupaten Situbondo harus mempertimbangkan besarnya anggaran yang akan dialokasikan untuk melakukan proses pendahuluan dari aturan yang ditetapkan ini.

Pada tahapan yang telah dilakukan (sejak dilakukannya penelitian) pemerintah kabupaten Situbondo telah melaksanakan *appraisal* dan telah melakukan studi – studi pendahuluan atas sistem ini dengan mengirimkan beberapa staf keuangan ke berbagai pelatihan, seminar keuangan. Pemerintah kabupaten Situbondo telah mencoba setahap–demi setahap untuk melakukan beberapa penerapan pendahuluan secara manual dan hanya di titik Bagian Keuangan lingkungan Sekertaris Daerah saja terkait dengan proses dan mekanisme pencatatan dan pembukuan. Sehingga bisa dipastikan masih memiliki beberapa titik kelemahan yang disebabkan antara lain:

1. Pencatatan dan pembukuan dilakukan manual.

2. Fungsi kontrol atas setiap proses pencetakan, validasi dan verifikasi suatu dokumen baik penerimaan dan pengeluaran belum berjalan.
3. Dalam tataran global ada beberapa konsep yang tidak tercantum dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, sehingga untuk beberapa titik direncanakan akan tetap menggunakan aturan lama.
4. Masalah tersebut tidak didukung dengan adanya petunjuk teknis atas kelanjutan dikeluarkannya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Ditambah lagi Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintahan.
5. Belum adanya fasilitas pendukung secara penuh baik hardware maupun software dalam sistem informasi keuangan daerah.
6. Belum adanya pandangan komprehensif dan *integrated* yang dapat mendukung atas konsep sistem informasi keuangan daerah yang berdasar pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini.

Dari hal – hal pokok diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Situbondo memerlukan suatu konsep, pedoman, petunjuk yang bersifat teknis (*practice*) yang mencerminkan kondisi riil atas aturan-aturan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

5.2 Hasil Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab III mengenai kerangka konseptual penelitian dan bab IV mengenai metode penelitian, yang menegaskan mengenai batasan/ ruang lingkup penelitian, baik dari sisi konteks konsep sistem informasi keuangan daerah maupun teknis penelitian yang dipergunakan. Berikut disajikan mengenai urutan penjelasan dari kriteria pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang mengambil lokasi penelitian di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten

Situbondo. Sistem informasi keuangan daerah ke dalam 2 bagian besar subsistem, yaitu :

1. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas ini menyajikan aliran/ prosedur yang mengakibatkan terjadinya suatu penerimaan kas (secara umum). Sistem dan Prosedur Penerimaan kas ini terbagi menjadi dua subsistem, yakni:

a. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas – Pendapatan (Umum)

Sistem dan prosedur ini berlaku untuk segala hal yang berkaitan dengan terjadinya penyeteroran yang merupakan hasil pendapatan dari dinas atau satuan kerja yang merupakan sumber pendapatan.

b. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas – Pihak Ketiga

Sistem dan prosedur ini berlaku untuk segala hal yang berkaitan dengan terjadinya penerimaan yang berasal dari potongan atau pungutan yang akan disetorkan kepada pihak ketiga.

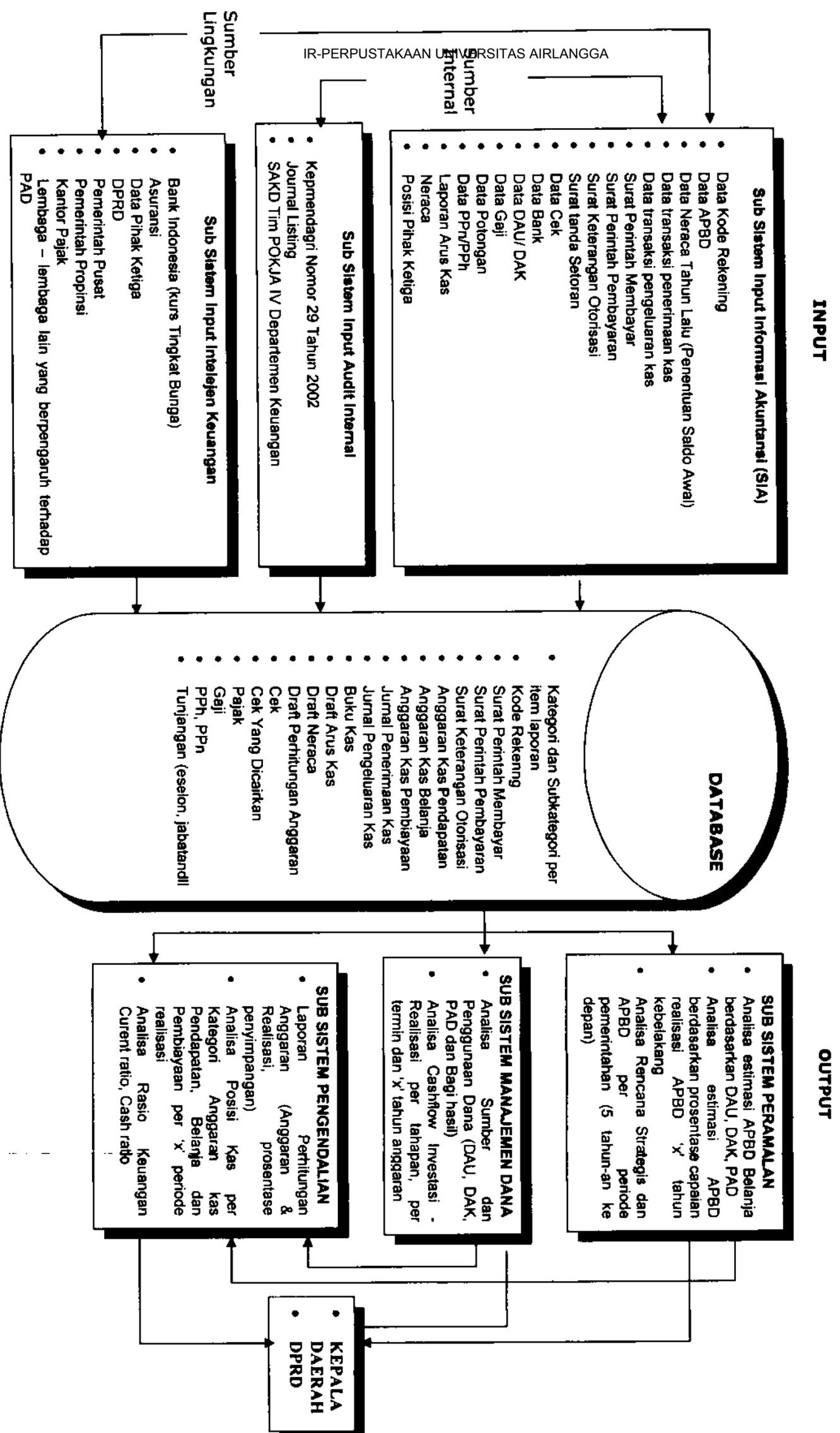
2. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas ini menyajikan aliran/ prosedur yang mengakibatkan terjadinya suatu pengeluaran kas (secara umum). Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas ini terbagi menjadi dua subsistem, yakni:

a. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas – Beban Tetap (Umum)

Sistem dan prosedur ini berlaku untuk segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pengeluaran yang dipergunakan untuk keperluan belanja operasional dan belanja pembangunan pemerintah kabupaten.

GAMBAR 5.1 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH



b. Sistem dan Prosedur Pengeluaran kas – Pihak Ketiga

Sistem dan prosedur ini berlaku untuk segala hal yang berkaitan dengan terjadinya penerimaan yang berasal dari potongan atau pungutan yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Sebelum melangkah ke *draft* analisis yang lebih mendalam berikut akan disajikan mengenai ilustrasi umum dari Sistem Informasi Keuangan Daerah ini (gambar 5.1). Sistem Informasi Keuangan Daerah ini akan mendapat input dari 3 subsistem input yakni *Accounting Information System (AIS)*, *Audit Internal* Subsistem dan *Financial Intelligence* Subsistem serta databasenya menghasilkan 3 subsistem output yaitu *Forecasting* subsistem, *Fund Management* Subsistem dan *Controlling* Subsistem.

Accounting Information System (AIS)

Accounting Information System (AIS) ini menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pencatatan keuangan yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Catatan dibuat untuk setiap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas mengenai apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat dan berapa banyak uang yang terlibat. Adapun data *Accounting Information System (AIS)* disini yang dimaksud adalah

- Data Kode Rekening, menjelaskan mengenai pencatatan pembebanan atas semua transaksi pada masing-masing item pos, rekening yang sesuai dengan transaksi bersangkutan. Daftar kode rekening ini biasanya disusun atas dasar subklasifikasi dan kelompok sesuai dengan cara penyajian laporan keuangan (Suwarjono, 1994:131). Penelitian ini *draft* kode rekening yang dimaksud bersumber pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yang terbagi dalam 6 kategori utama yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aktiva, Utang dan Ekuitas Dana.

- Data APBD, yang dimaksud adalah APBD tahun bersangkutan yang telah dirumuskan oleh tim anggaran dan disahkan oleh DPRD. Data APBD ini dipergunakan sebagai pedoman alokasi dan penerimaan dana dan sebagai dasar dalam perumusan perhitungan anggaran (kinerja anggaran).
- Data Neraca, dalam perkembangan terakhir seiring dengan dikeluarkannya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini, maka pemerintah daerah harus membuat neraca awal, yang diawali dengan dilakukannya penilaian Asset. Neraca Awal ini akan dipergunakan sebagai Saldo Awal di tabel kode rekening.
- Data transaksi penerimaan kas, secara *general* dikategorikan sebagai transaksi penerimaan kas, baik itu berupa pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pusat maupun Propinsi, Bantuan Dana Kontigensi maupun Bantuan Luar Negeri.
- Data transaksi pengeluaran kas, hal – hal yang berkaitan dengan adanya aliran kas keluar dari pemerintah Kabupaten Situbondo baik yang dilakukan oleh dinas/ instansi/ satuan kerja.
- Surat Perintah Membayar (SPM), dokumen ini dipergunakan sebagai referensi adanya aliran kas keluar artinya dengan adanya SPM yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan ini maka Bendaharawan Umum Daerah wajib mengalokasikan uang tersebut pada dinas/ instansi/ satuan kerja bersangkutan.
- Surat Perintah Pembayaran (SPP), dokumen ini terkait dengan pengajuan realisasi anggaran bagi satuan kerja ke Bagian Keuangan sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi untuk dibuatkannya SPM sehingga pengajuan realisasi oleh satuan kerja menjadi sah dan satuan kerja dapat menerima realisasi tersebut dari Bendaharawan Umum Daerah.

- Surat Keterangan Otorisasi (SKO), dokumen ini dikeluarkan oleh Bupati dalam memberikan mandat bagi dinas/ instansi/ satuan kerja untuk mengajukan realisasi anggaran dengan dikeluarkannya SPP oleh satuan kerja bersangkutan.
- Surat Tanda Setoran (STS), dokumen ini dipergunakan oleh dinas/ instansi/ satuan kerja yang menjadi sumber pendapatan dalam menyetorkan pendapatan daerah ke Bendaharawan Umum Daerah.
- Data Cek/ Bilyet Giro, yang dimaksud disini adalah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dengan bentuk pembayaran cek. Cek disini juga diidentifikasi mengenai status cek itu sendiri (dicairkan atau belum dicairkan) yang selanjutnya dapat dilakukan rekonsiliasi.
- Data Bank, berisi informasi mengenai bank tempat pemerintah dalam hal ini dinas/ satuan kerja melakukan transaksi.
- Data DAU/ DAK, berisi informasi dana alokasi umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat. Data DAU/ DAK disini dipergunakan sebagai referensi/ bukti dalam jurnal penerimaan kas. Selengkapnya lebih jauh mengenai identifikasi data ini di otorisasi oleh Dispenda dan Kepala Daerah, Bagian Keuangan hanya menerima data bahwa ada dana masuk dari DISPENDA yang berasal dari DAU/ DAK, dan kemudian dibebankan pada pos Pendapatan DAU.
- Data Gaji, berisi mengenai item jumlah besarnya gaji yang diterima oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, berdasarkan kepangkatan dan jabatan. Selanjutnya lebih jauh mengenai spesifikasi gaji dan identifikasi lebih jauh lainnya (baik itu identifikasi pegawai, jabatan, kepangkatan) menjadi otorisasi Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- Data Potongan, kaitannya dalam hal ini adalah penerimaan PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) dalam hal ini penerimaan dari potongan-potongan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Pengeluaran PFK, yakni potongan-potongan untuk penyetoran ke Pihak Ketiga.
- Data PPN/ PPh, berkaitan dengan transaksi – transaksi kena pajak (baik itu PPN/ PPh) sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.
- Laporan Arus Kas, laporan ini merupakan informasi yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengontrol kondisi dan posisi kas keluar dan kas masuk daerah. Laporan ini merupakan keluaran dari *Accounting Information System* dan menjadi input dalam *Financial Information System*.

Internal Audit Subsystem

Infomasi yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan kesesuaian proses dan keluaran dengan standar yang berlaku. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi standar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi keuangan daerah hingga akhir 2005, selanjutnya akan digantikan oleh standar dan pedoman yang didasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah yang harus diimplemetasikan oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2006 atau selambat-lambatnya 5 tahun (Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2003, Pasal 36, 2003:24). *Internal Audit Subsystem* ini terdiri dari :

- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, sebenarnya Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 ini telah memiliki informasi yang jelas mengenai prosedur akuntansi keuangan daerah. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 berisi standar dan pedoman mulai dari kode rekening, draft APBD, draft jurnal, draft buku besar, draft dokumen penyerta (referensi dokumen SPP, SKO, STS, SPM), register, draft

buku kas, draft buku utang piutang, register dan draft laporan. Selain itu juga berisi mengenai pedoman non teknis yang berisi aturan prosedural, mekanisme penyusunan bahkan kewenangan dan tanggung jawab atas keluaran Laporan Keuangan yang dihasilkan daerah.

- SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) Tim POKJA IV, Departemen Keuangan, merupakan draft akuntansi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA), menteri keuangan dengan keputusan nomor 355/KMK.07/ 2001 telah membentuk Tim Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari Kelompok Kerja diantaranya Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah (Tim Pokja IV). Salah satu wujud hasil kerja Pokja ini adalah Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
- Journal Listing (*Audit Trial*), laporan ini dapat dipergunakan internal pemerintah kabupaten khususnya bagian keuangan dalam mengaudit laporan keuangan dan penelusuran sampai dengan tahapan transaksi baik itu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dengan kata lain laporan ini berisi identifikasi asal usul nilai dari tiap item pos rekening dalam laporan.

Financial Intelligence Subsystem

Financial Intelligence subsystem ini berkaitan dengan sumber informasi eksternal terkait dengan kepentingan *accounting information system* maupun secara langsung dalam pemrosesan data, yang menjadi dasar bagi pemrosesan data itu sendiri dalam menghasilkan keluaran.

- Bank Indonesia, informasi disini misalnya berkaitan dengan transaksi yang menggunakan *foreign exchange* (kurs valuta asing), perhitungan selisih laba rugi nilai pertukaran ini (*Foreign Exchange Gain/ Loses*) menggunakan dasar kurs tengah BI.
- Asuransi, disini berkaitan informasi kebijakan asuransi, atas berbagai program asuransi yang diikuti oleh pemerintah. sehingga mempengaruhi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
- Data PihakKetiga, berkaitan dengan informasi identifikasi pihak ketiga.
- DPRD, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan daerah yang berpengaruh terhadap suatu transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas daerah. DPRD juga memberikan masukan atas perkembangan kebutuhan masyarakat baik itu berupa hasil dengar pendapat maupun evaluasi DPRD dari hasil monitoring perkembangan realisasi APBD tahun periode-periode sebelumnya maupun periode berlangsung.
- LSM, saat ini Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) memberikan peranan cukup penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Beberapa masukan bahkan kritikan atas realisasi APBD menjadi salah satu alat monitoring bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD.
- Pemerintah Pusat, berkaitan dengan informasi kebijakan dari pemerintah pusat mengenai aliran dana dari maupun ke pusat misal : jatah DAU, DAK aturan Bagi Hasil dan sebagainya sehingga berpengaruh terhadap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- Pemerintah Propinsi, sama halnya dengan pemerintah propinsi informasi ini berkaitan dengan segala hal yang berpengaruh terhadap kebijakan penerimaan kas

dan pengeluaran kas, kaitannya misalnya dengan Bagi Hasil Keuangan, bantuan dan sebagainya.

- Kantor Pajak, berkaitan dengan informasi kebijakan pajak baik itu PPn, PPh atau pajak lainnya.
- Lembaga-lembaga lain yang berpengaruh terhadap PAD, baik itu konsultan, investor asing, domestik dan lain-lain yang berpengaruh terhadap PAD.

Forecasting Subsystem

Forecasting subsystem ini menghasilkan laporan yang berisi analisa proyeksi prospek keuangan dan anggaran. Laporan ini dapat dipergunakan oleh Tim Anggaran dalam membuat dan menganalisis Anggaran Kas dalam menetapkan prosentase kenaikan dan penurunan anggaran dimasa mendatang dan prospek dari anggaran yang bersangkutan. Adapun jenis laporan dalam konteks ini terdiri dari:

- Analisa estimasi anggaran Belanja berdasarkan sumber – sumber pendapatan baik itu DAU, DAK, PAD ataupun Bagi Hasil. Analisa ini dapat menunjukkan tingkat kinerja pemerintah dalam memacu sumber-sumber pendapatan potensial dan mengukur tingkat kinerja perputaran dana pemerintah per periode anggaran, sehingga berdasarkan hasil analisa ini dapat dilakukan estimasi anggaran per 'x' periode berikutnya
- Analisa estimasi anggaran berdasarkan prosentase capaian realisasi APBD 'x' tahun kebelakang. Analisa ini menunjukkan tingkat pencapaian program – program pemerintah pada tahun-tahun anggaran yang lalu yang untuk kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan anggaran periode berikutnya.
- Analisa Rencana Strategis dan APBD per periode pemerintahan (5 tahun-an), informasi ini sangat berguna karena setiap perkembangan pembangunan dapat termonitor karena memiliki standar capaian dan standar pelaksanaan yang

terkonsep dengan jelas baik itu dituangkan dalam draft Rencana strategis (yang bisa dilaksanakan per dinas/ satuan kerja, per wilayah kewenangan bahkan bupati selaku kepala daerah) maupun draft APBD yang dirinci sedetil mungkin dalam kategori kelompok Pendapatan dan Belanja.

Fund management subsystem

Fund management subsystem ini menyajikan informasi mengenai analisa pengelolaan sumber dana pemerintah atas aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Subsistem ini terbagi menjadi:

- Analisa Sumber dan Penggunaan Dana, kaitannya dengan ini adalah evaluasi sumber dan penggunaan dana pada 'x' tahun anggaran, yang dapat dikelompokkan per sumber pendapatan (DAU, DAK, PAD dan Bagi Hasil) atau bahkan per kelompok belanja (Aparatur dan Publik), dan analisa lanjutannya mengenai alternatif sumber pendapatan dan pembiayaan lainnya.
- Analisa *Cashflow* investasi – realisasi per tahapan, per termin dan 'x' tahun anggaran, Analisa ini berisi data arus kas masuk dan keluar dari investasi yang ditanamkan dan realisasi dari anggaran investasi tersebut berdasarkan per tahapan kegiatan, per termin pelaksanaan dan per 'x' tahun anggaran.

Control Subsystem

Subsistem ini menyajikan informasi berkaitan dengan fungsi controlling pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pengelolaan fungsi – fungsi keuangan baik di tingkat dinas sampai dengan eksekutif atas kejadian penerimaan kas dan pengeluaran kas.

- Laporan Perhitungan Anggaran (Perbandingan anggaran dan realisasi), menyajikan mengenai perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan, laporan ini juga sekaligus memberikan informasi

tentang anggaran dan realisasi entitas secara tersanding baik dalam format rupiah maupun prosentase. Penandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Analisa Posisi Kas, per kategori anggaran kas pendapatan, anggaran kas belanja dan anggaran kas pembiayaan per 'x' tahun anggaran, dalam analisa ini kas dapat selalu termonitor dan menjadi dasar salah satu alat kendali pemerintah yang paling tepat karena secara *up to date* dapat selalu terevaluasi dalam kerangka yang jelas melalui akses tertentu yang tepat.
- Analisa Rasio Keuangan, berdasarkan sumber data dalam *Accounting Information System* dapat pula dilakukan proses evaluasi dengan mengukur kinerja keuangan berdasarkan metode analisa rasio, baik itu cash ratio, current ratio dll.

5.2.1 *System Flow* Sistem Informasi Keuangan Daerah

System flow sistem informasi keuangan daerah membahas prosedur sistem informasi keuangan daerah pada setiap biro/ bagian/ external entity yang terlibat dalam sistem terkait secara nyata dilapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan menempatkan titik data store (Dokumen Sumber) sebagai template yang wajib disertakan dalam merancang suatu CBIS (*computer based Information System*). *System flow* ini menunjukkan alur proses keuangan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup yang dimaksud dari antar bagian keuangan dan kantor kas daerah (dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi bendaharawan umum daerah), yakni bendaharawan umum daerah, subbag perbendaharaan, subbag verifikasi dan subbag pembukuan. Dalam tahapan ini tidak hanya dijelaskan suatu dokumen mengalir dari masing-masing external entity terkait tetapi juga dijelaskan bagaimana suatu dokumen terbentuk (**Lampiran 1**). Dalam penjelasan *System flow* ini 'database' menunjukkan

'terminal data' dari suatu draft rancangan CBIS dalam hal ini Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang harus bersesuaian dengan konsep, aturan, dan 'prosedur' manual yang berlaku hanya di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo, diluar external entity yang maksud (Bagian Keuangan dan Kantor kas Daerah atau Bendaharawan Umum Daerah) menjadi external environment dari Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akan dirancang.

5.2.1.1 Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

5.2.1.1.1 Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas – Pendapatan

- a. **Satuan Kerja** atau **Penyetor** melakukan pembayaran/ penyetoran (Pendapatan Asli Daerah) ke rekening Kas Daerah (Bendaharawan Umum Daerah) dan mendapatkan bukti setoran yaitu Slip Setoran Bank, Surat Tanda Setoran (STS)
- b. Setiap hari **Subbag Bendaharawan Umum Daerah** membukukan STS dalam **tabel buku kas Umum (penerimaan dan pengeluaran)**, dan setiap hari pula dikirimkan ke Subbag pembukuan (via LAN dengan kode akses khusus).
- c. Khusus **Dipenda**, membuat Laporan Harian mengenai rincian penerimaan yang disampaikan ke Subbag Pembukuan.
- d. **Subbag Perbendaharaan** selanjutnya mengesahkan STS dengan memberi tera di STS tersebut disertai dengan Slip Setoran Bank. Subbag Perbendaharaan selanjutnya merekam STS tersebut ke dalam **tabel STS**. selanjutnya dibuat rekap STS. Satu tembusan STS (dengan memberi tera, yang berfungsi sebagai tanda bisa diakses Subbag Pembukuan) diserahkan ke Subbag Pembukuan, satu tembusan diserahkan ke Bendaharawan Umum Daerah dengan memberi kode pengesahan, dimana BUD dapat mengakses dan memproses lebih lanjut dengan mencetak STS dan menyerahkannya ke Satuan Kerja terkait.

- e. **Subbag Pembukuan** melakukan entri ke dalam tabel **Jurnal Penerimaan Kas**, berdasarkan dokumen sumber yang dikirimkan oleh Subbag Perbendaharaan dengan mengakses **tabel STS** yang telah disahkan dan dokumen sumber penyerta lainnya. Demikian juga DIPENDA mengirimkan Laporan Harian Penerimaan kas, berdasarkan DS yang diterima dari Bendaharawan Umum Daerah terkait dengan transaksi hasil Pendapatan Asli Daerah.. Secara otomatis juga dilakukan proses *posting computerized* dan tidak memerlukan perekaman ulang data STS tiap bulannya. Selanjutnya dilakukan proses koreksi dan rekonsiliasi buku besar dengan tabel STS. Setelah itu dilakukan proses perhitungan antara realisasi dan anggaran sebagai internal control dari proses *accounting information system* yang tercermin dalam laporan Perhitungan Anggaran berdasarkan realisasi (jurnal penerimaan kas dan buku kas) dan anggaran (anggaran kas pendapatan, dan anggaran kas penerimaan pembiayaan), kemudian dilakukan koreksi keluaran Laporan Keuangan baik itu laporan perhitungan anggaran, neraca dan aliran kas dan jikalau telah selesai laporan keuangan siap untuk dicetak.

5.2.1.1.2 Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas – Pihak Ketiga

- a. Berdasarkan daftar gaji dan daftar potongan pihak ketiga, **Subbag Perbendaharaan** akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP akan direkam ke dalam **tabel SPP** dan hasil perekaman tersebut akan dicetak berupa rekapitulasi SPP. Hasil cetakan beserta tabel SPP akan dikirim ke Subbag Verifikasi.
- b. **Subbag Verifikasi** melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan formal SPP, serta kebenaran tabel SPP (rekapitulasi SPP). Jika Subbag Verifikasi menemukan ketidakbenaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian hasil rekaman dengan SPP maka Subbag Verifikasi mengirimkan kembali ke Subbag

- Perbendaharaan dengan memberikan tera pada **tabel SPP** tersebut tidak lengkap atau tidak sah, yang selanjutnya akan memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Subbag Verifikasi. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Subbag Verifikasi akan membuat lembar disposisi SPM yang berisikan bahwa SPP dan Hasil rekaman SPP sudah benar dalam **tabel lembar disposisi SPM**, sehingga Subbag Perbendaharaan sudah bisa mengakses dan mencetak **tabel SPM**. **Tabel SPP** dan rekapitulasi SPP serta **tabel Lembar Disposisi** akan dikirim ke Subbag Perbendaharaan.
- c. **Subbag Perbendaharaan** akan menerima kembali tabel SPP dan rekapitulasi SPP serta tabel Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan kiriman tabel disposisi tersebut dan dokumen cetak lainnya yang sah, Subbag Perbendaharaan akan mengakses dan mencetak tabel SPM. Subbag Perbendaharaan akan memberi tera pengesahan bahwasanya sudah bisa diakses oleh Subbag Pembukuan dan untuk dibukukan dan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk dicetak dan diserahkan ke Pihak Ketiga sebagai bukti konfirmasi bahwa dana telah ditransfer.
- d. Berdasarkan tabel SPM yang diterima, **Bendaharawan Umum Daerah** dapat melakukan akses untuk mentransfer dana ke rekening Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti transfer. **Tabel Nota Transfer** beserta **tabel SPM** akan dikirim ke Subbag Perbendaharaan, dan Nota Transfer akan diarsip di Bendaharawan Umum Daerah.
- e. **Subbag Perbendaharaan** akan melakukan verifikasi terhadap **tabel Nota Transfer** dan **tabel SPM** yang diterima dari Bendaharawan Umum Daerah untuk meneliti kebenaran apakah transfer yang dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah telah sesuai dengan SPM yang diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Subbag Perbendaharaan akan mengirimkannya kembali ke Bendaharawan

Umum Daerah, jika benar maka **tabel Nota Transfer** dan **tabel SPM** dikirim ke Subbag Pembukuan dengan memberi tera yang menandakan bahwasanya Subbag Pembukuan sudah bisa *mengakses* dan melakukan pencatatan.

- f. Berdasarkan tabel SPM dan tabel Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan, **Subbag Pembukuan** melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dan deskripsi yang tercantum dalam tabel SPM maupun tabel Nota Transfer, dengan melakukan entri Jurnal Penerimaan Kas ke dalam **tabel jurnal penerimaan kas** dengan referensi *forward* dari tabel SPM maupun tabel Nota Transfer, yang juga secara otomatis dilakukan proses *posting computerized*. Selanjutnya dilakukan proses koreksi atas keluaran buku besar, dan dengan cetakan dari tabel STS, tabel SPM maupun tabel Nota Transfer. Setelah itu dilakukan proses perhitungan antara realisasi dan anggaran sebagai internal control subsistem penerimaan PFK dari proses *accounting information system* yang tercermin dalam laporan Perhitungan Anggaran berdasarkan realisasi (jurnal penerimaan kas dan buku kas) dan anggaran (anggaran kas pendapatan PFK), kemudian dilakukan koreksi keluaran Laporan Keuangan baik itu laporan perhitungan anggaran, neraca dan aliran kas dan jikalau telah selesai maka akan dilakukan proses cetak laporan keuangan.

5.2.1.2 Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas

5.2.1.1.1 Sistem dan Prosedur Pengeluaran kas – UMUM

- a. Berawal dari penetapan anggaran kas baik itu anggaran kas pendapatan, anggaran kas belanja maupun anggaran kas belanja oleh **Kepala Daerah**, maka dibuatlah Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan keputusan lainnya yang sah.

- b. Berdasarkan **SKO** yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah **Satuan Kerja** membuat **SPP**. Selanjutnya, mengajukan **SPP** dan bukti pendukung lainnya ke Unit **Perbendaharaan**.
- c. **Subbag Perbendaharaan** pertama meneliti kelengkapan dokumen **SPP** dan bukti pendukung lainnya. Bila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke **Satuan Kerja**. Bila sudah lengkap maka berkas **SPP** tersebut disampaikan ke petugas **Perekaman/ entri data/ operator** untuk direkam ke dalam **tabel SPP** dalam **database**. Selain itu pula lampiran **SKO** yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ini juga dientrikan ke dalam **tabel SKO**, selanjutnya dari **tabel SPP** dan **tabel SKO**. Berkas tersebut dan **tabel SPP** maupun **tabel SKO** selanjutnya disampaikan ke Unit **Verifikasi** untuk dilakukan verifikasi atas kebenaran materil dan hukumnya.
- d. **Subbag Verifikasi** meneliti kebenaran materil dan hukum hasil perekaman **SPP** dan **SKO** yang terdapat dalam **tabel SPP** dan **tabel SKO** beserta bukti pendukung lainnya (baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy*). Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke **Subbag Perbendaharaan**. Jika sudah sesuai maka **Subbag Verifikasi** dengan menggunakan menu computer menyetujui **SPP** yang secara otomatis komputer merekam data **SPP** dalam **tabel SPP** ke dalam **tabel lembar disposisi SPM** dan mencetak lembar disposisi cetak **SPM**. **Tabel SPP**, **tabel SKO**, dokumen pendukung, dan **tabel lembar disposisi SPM** ke **Subbag Perbendaharaan**.
- e. **Subbag Perbendaharaan**, setelah menerima berkas dari **Subbag Verifikasi**, maka selanjutnya mensahkan **tabel SPM** dengan memberi petunjuk 'tera' pada kolom pengesahan dan untuk kemudian mencetak **SPM**. **Tabel SPM** yang telah disahkan akan didistribusikan ke **Bendaharawan Umum Daerah** dan **Subbag Pembukuan**

untuk dibukukan. Subbag Perbendaharaan tidak dapat mengisi atau mengubah **tabel SPM** kewenangan akses hanya dapat dilakukan oleh Subbag Verifikasi. Subbag Perbendaharaan hanya diberi hak membaca. Setelah itu Subbag perbendaharaan akan mengeluarkan Cek agar dapat dilakukan pencairan dana oleh satuan kerja yang bersangkutan. Subbag Perbendaharaan juga akan menerima konfirmasi pencairan cek dari Bendaharawan Umum Daerah berdasarkan kiriman tabel

- f. Berdasarkan hasil cetakan SPM dan Cek yang dikirimkan oleh satuan kerja yang bersangkutan, maka **Bendaharawan Umum daerah** akan melakukan pengecekan sesuai dengan **tabel SPM** yang dikirimkan oleh Subbag Perbendaharaan. Setelah pengecekan tersebut dan dinyatakan sesuai dengan database (untuk memperkecil pemalsuan SPM) maka dilakukan pencairan dana, yang selanjutnya diterima oleh satuan kerja yang bersangkutan. Bendaharawan Umum Daerah akan memberikan konfirmasi kepada Subbag Perbendaharaan atas transaksi pencairan cek tersebut.
- g. Sementara itu **Subbag Pembukuan** akan melakukan entri Jurnal Pengeluaran Kas pada tabel jurnal pengeluaran kas berdasarkan referensi *forward tabel SPM* dan tabel bukti transaksi lainnya yang sah (termasuk **tabel cek** dan **tabel cek yang dicairkan**), yang juga secara otomatis dilakukan proses *posting computerized*. Selanjutnya dilakukan proses koreksi atau rekonsiliasi atas keluaran buku besar dengan laporan SPM dan laporan status cek. Setelah itu dilakukan proses perhitungan antara realisasi dan anggaran sebagai internal control pengeluaran kas (UMUM) yang dilakukan atas fungsi *accounting information system* yang tercermin dalam laporan Perhitungan Anggaran berdasarkan realisasi (jurnal pengeluaran kas dan buku kas) dan anggaran (anggaran kas belanja dan anggaran

kas pengeluaran pembiayaan), kemudian dilakukan koreksi keluaran Laporan Keuangan baik itu laporan perhitungan anggaran, neraca dan aliran kas.

5.2.1.1.2 Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas – Pihak Ketiga

- a. Berdasarkan rekapitulasi PFK, **Subbag Perbendaharaan** akan menerbitkan SPP. SPP akan direkam ke dalam **tabel SPP** dan hasil perekaman tersebut akan dicetak baik berupa SPP ataupun rekapitulasi SPP. Hasil cetakan beserta **tabel SPP** akan dikirim ke Subbag Verifikasi.
- b. **Subbag Verifikasi** melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Jika Subbag Verifikasi menemukan ketidak benaran materiil dan formal di SPP, atau ketidaksesuaian hasil cetak dengan **tabel SPP** maka Subbag Verifikasi mengirimkan **tabel SPP** beserta hasil cetak SPP ke Subbag Perbendaharaan. Subbag Perbendaharaan akan memperbaikinya kemudian mengirimkannya kembali ke Subbag Verifikasi. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka Subbag Verifikasi akan membuat lembar disposisi pada **tabel lembar disposisi** yang berisikan bahwa SPP dan Hasil cetak SPP sudah benar sehingga Unit Perbendaharaan sudah bisa mengakses **tabel SPM**. **Tabel SPP**, Hasil cetak SPP dan **tabel Lembar Disposisi** akan dikirim ke Subbag Perbendaharaan.
- c. **Subbag Perbendaharaan** akan menerima kembali SPP, hasil rekaman SPP dan Disposisi Pencetakan SPM. Berdasarkan disposisi tersebut, Subbag Perbendaharaan akan mencetak SPM 3 (tiga) lembar. SPM akan dikirim ke Bendaharawan Umum Daerah dan arsip di Subbag Perbendaharaan.
- d. Berdasarkan SPM yang diterima, **Bendaharawan Umum Daerah** akan mentransfer dana ke Pihak Ketiga dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Transfer sebagai bukti transfer dalam **tabel Nota Transfer**. **Tabel Nota transfer** beserta

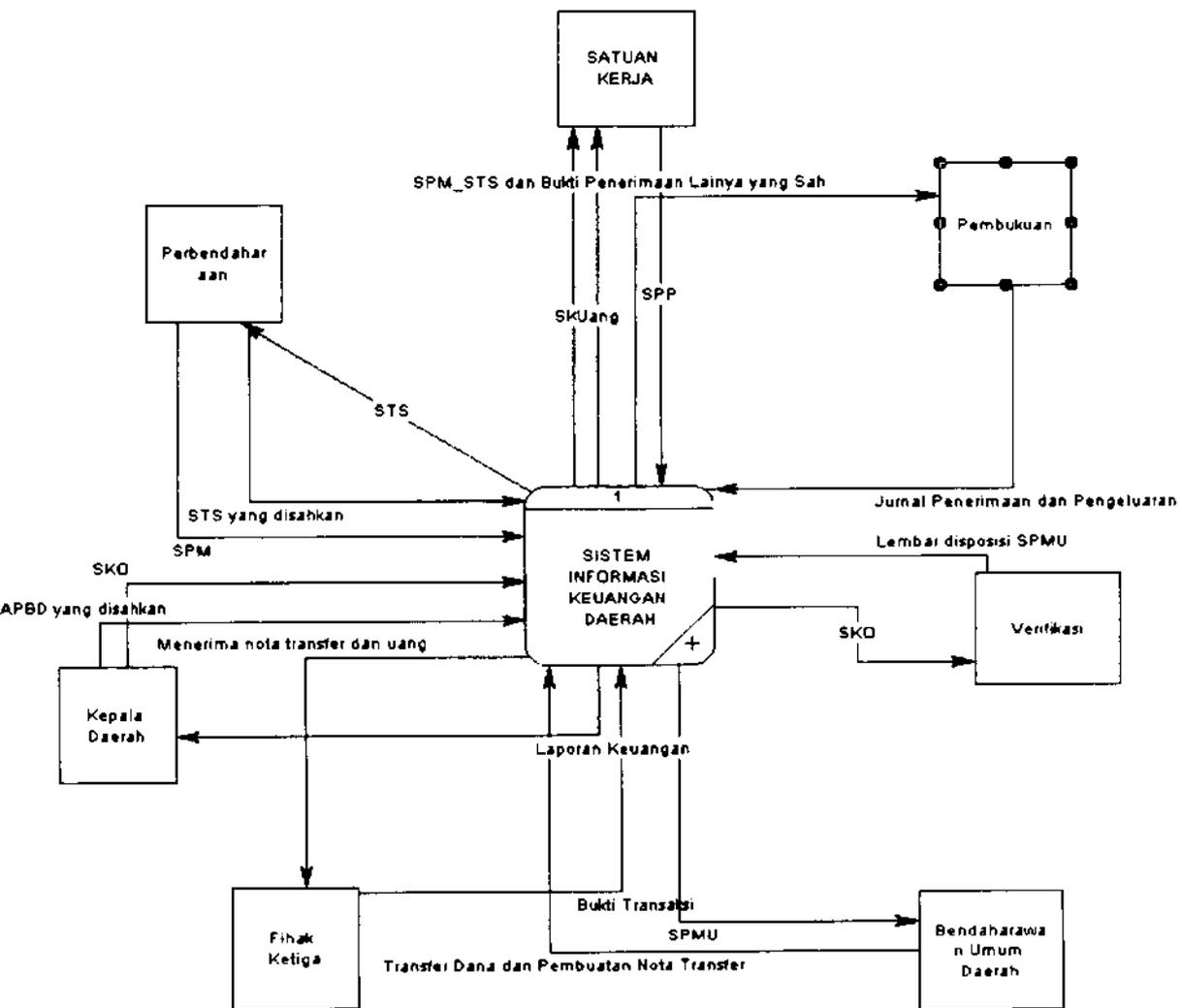
- tabel SPM** akan dikirim ke Subbag Perbendaharaan, dan hasil cetak Nota Transfer akan dikirim ke Pihak Ketiga dan arsip di Bendaharawan Umum Daerah.
- e. **Subbag Perbendaharaan** akan melakukan verifikasi terhadap **tabel Nota Transfer** dan **tabel SPM** yang diterima dari Bendaharawan Umum Daerah yang menunjukkan bahwasanya ada dana yang telah ditransfer untuk kepentingan seperti yang telah dijelaskan dalam deskripsi., untuk meneliti kebenaran apakah transfer dan yang dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah telah sesuai dengan tabel SPM yang diterbitkan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka Subbag Perbendaharaan akan mengirimkannya kembali ke Bendaharawan Umum Daerah, jika benar maka Subbag Perbendaharaan akan memberi tera/ kode khusus yang menunjukkan kebenaran materil dari **tabel Nota Transfer** dan **tabel SPM** sehingga bisa Subbag Pembukuan dapat mengakses tabel tersebut.
- h. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan, **Subbag Pembukuan** melakukan entri Jurnal Pengeluaran Kas dalam **tabel jurnal pengeluaran kas** berdasarkan referensi *forward* tabel SPM, tabel Nota transfer dan bukti pengeluaran lainnya yang sah, dan pada saat itu pula secara otomatis dilakukan proses *posting computerized*. Selanjutnya dilakukan proses koreksi atas keluaran buku besar dengan tabel SPM. Setelah itu dilakukan proses perhitungan antara realisasi dan anggaran sebagai internal control proses pengeluaran PFK yang terjadi berdasarkan fungsi *accounting information system* yang tercermin dalam laporan Perhitungan Anggaran berdasarkan realisasi (jurnal pengeluaran kas dan buku kas) dan anggaran (anggaran kas belanja), kemudian dilakukan koreksi keluaran Laporan Keuangan baik itu laporan perhitungan anggaran, neraca dan aliran kas dan jikalau telah selesai maka akan dilakukan proses cetak laporan keuangan.

5.2.2 Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)

5.2.2.1 Diagram Konteks Sistem Informasi Keuangan Daerah (Level 0)

Data flow diagram menunjukkan arus data dalam sistem informasi keuangan daerah sampai munculnya data storage (database) pada level akhir dari sistem informasi keuangan daerah ini, yang melibatkan 7 (tujuh) external entity antara lain kepala daerah, satuan kerja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, bendaharawan umum daerah dan Pihak Ketiga .

Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditegaskan dalam Bab III bahwa penelitian ini akan mengambil topik yang terdiri dari : a) Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas, b) Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas. Untuk itu hasil dari data



Gambar 5.2 Diagram Konteks DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah (Level 0)

flow diagram pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah akan terpecah sampai pada Level 3. Pada konteks diagram Sistem Informasi Keuangan Daerah ini akan dikaitkan seluruh elemen lingkungan yang terlibat dalam sistem ini (berdasarkan ruang lingkup yang telah ditetapkan sebelumnya), yang terdiri dari :

- a. **Kepala Daerah**, sebagai kepala pemerintahan pada tiap triwulan akan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/ Laporan Keuangan. Kepala daerah pada awal tahun anggaran akan menyerahkan APBD yang disahkan pada bagian keuangan dalam hal ini Subbag Perbendaharaan untuk kemudian diteruskan ke Subbag Pembukuan untuk dijadikan sebagai input dalam Laporan Perhitungan Anggaran (perbandingan antara anggaran dan realisasi). Selain itu Kepala Daerah akan mengirimkan data Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai alat dalam pelaksanaan realisasi dari anggaran yang telah disahkan.
- b. **Satuan Kerja**, dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat satuan kerja/ dinas/ unit organisasi akan membutuhkan dana yang tercermin dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Setelah menerima SKO dari Kepala Daerah, satuan kerja berhak mengajukan pencairan dana atas anggaran yang telah ditetapkan, disertai dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan dalam hal ini Subbag Perbendaharaan dan Satuan Kerja terkait akan menerima realisasi dana tersebut. Satuan Kerja yang menjadi sumber pendapatan daerah akan menyetorkan pemasukan (pajak, retribusi dan lain-lain) kepada Bendaharawan umum Daerah, selanjutnya mereka akan menerima Surat Tanda Setoran (STS) dan bukti penerimaan lainnya yang sah.
- c. **Subbag Perbendaharaan**, akan menerima berbagai dokumen (STS, SPM) yang untuk kemudian mensahkan dokumen tersebut (khusus SPM harus mendapatkan verifikasi disposisi dari Subbag Verifikasi) setelah itu mendistribusikannya ke

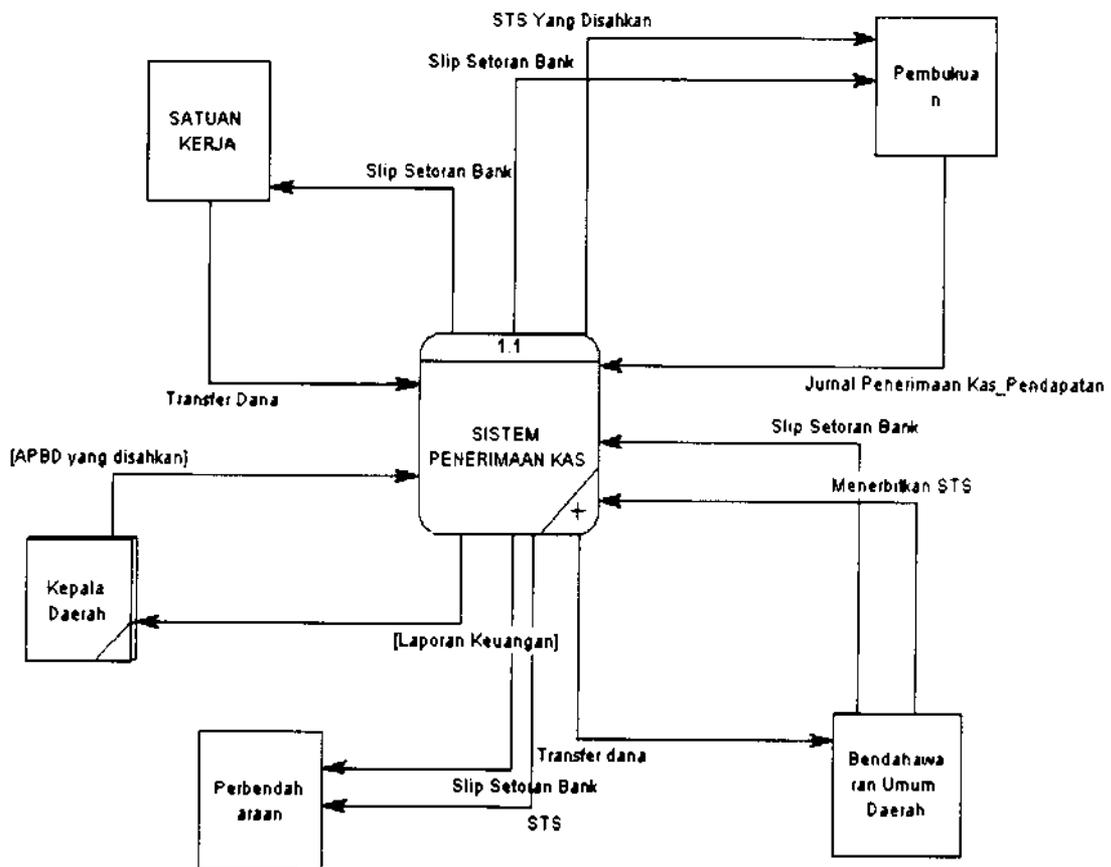
semua Satuan Kerja agar dapat dilakukan pencairan ke Bendaharawan Umum Daerah serta Subbag Pembukuan agar dilakukan pencatatan dan pembukuan atas berbagai transaksi keuangan.

- d. **Verifikasi**, setelah menerima dokumen terkait dengan pengeluaran keuangan (SPP, SKO dan bukti lainnya yang sah) dan melakukan pengecekan atas kebenaran formil dan materiil dari dokumen tersebut untuk selanjutnya akan memberikan lembar disposisi ke Subbag Perbendaharaan agar dapat diterbitkan SPM.
- e. **Bendaharawan Umum Daerah (BUD)**, akan menerima penyetoran dari Satuan Kerja yang untuk kemudian dibuatkan STS dan slip setoran sebagai tanda bukti, dan dikirimkan ke Subbag Perbendaharaan untuk divalidasi kebenaran dari STS tersebut, dan menerimanya kembali serta mengirimkannya ke Satuan Kerja yang bersangkutan. Berkaitan dengan pengeluaran, Bendaharawan Umum Daerah akan menerima SPM beserta Cek yang dibuat oleh Subbag Perbendaharaan, agar dilakukan pencairan dana, dan untuk kemudian akan diserahkan ke Satuan Kerja yang bersangkutan untuk operasional, dan Subbag Pembukuan untuk dilakukan pencatatan akuntansi.
- f. **Subbag Pembukuan**, Subbag Pembukuan akan melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan SPM, STS dan bukti transaksi lainnya yang sah untuk kemudian dibuatkan laporan keuangan.
- g. **Pihak Ketiga**, Pihak ketiga akan menyerahkan rekapitulasi Pihak Ketiga berkaitan dengan kewajiban dan hak yang mereka dapatkan (gambar 5.2).

5.2.2.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Level 1)

Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Level ini akan membagi sistem menjadi Sistem Informasi Penerimaan Kas dan Sistem Informasi Pengeluaran Kas. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui pada penjelasan berikut.

Sistem Informasi Penerimaan Kas (Level 1)



Gambar 5.3 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Penerimaan Kas (Level 1)

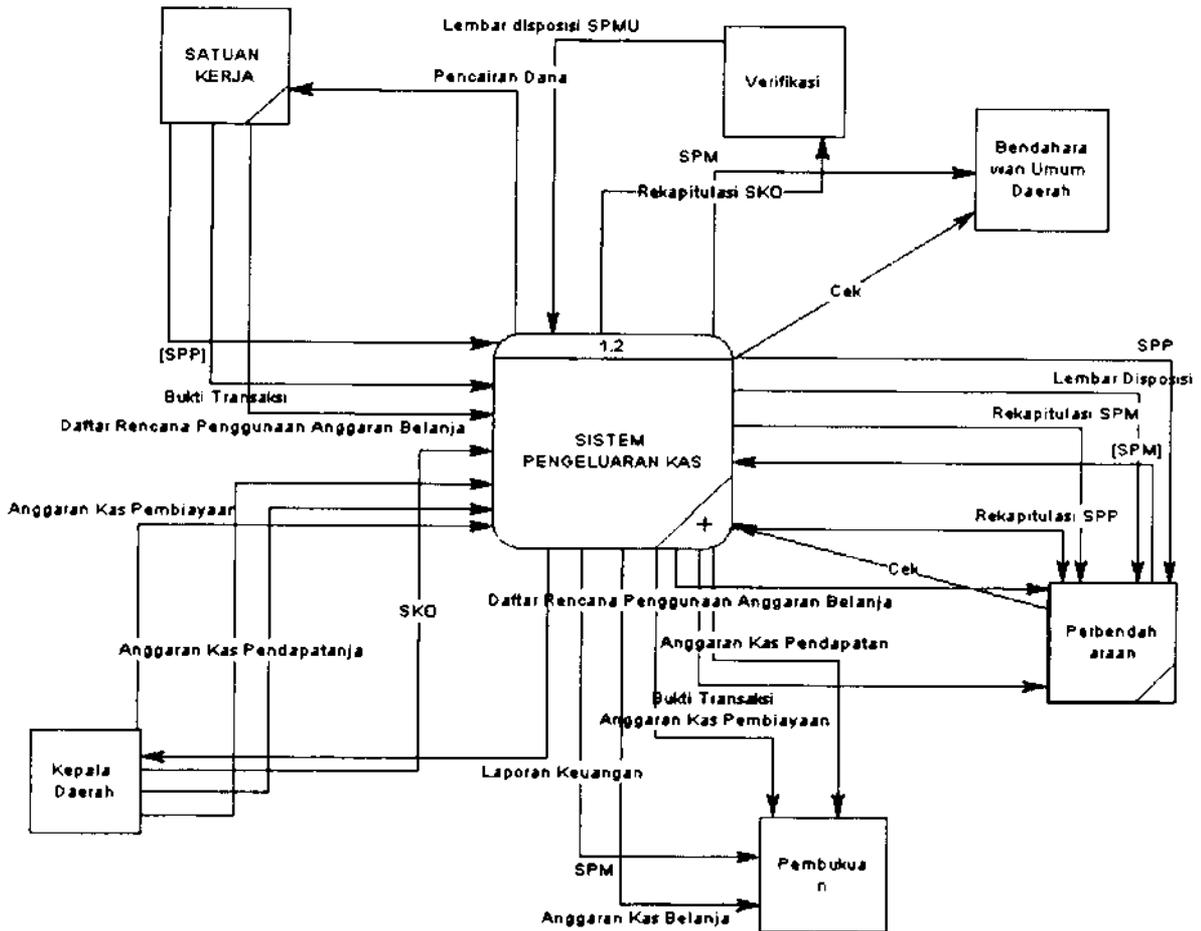
- a. **Kepala Daerah**, tiap triwulan akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/ Laporan Keuangan. Kepala daerah pada awal tahun anggaran akan menyerahkan APBD yang disahkan pada bagian keuangan dalam hal ini Subbag Perbendaharaan untuk kemudian diteruskan ke Subbag Pembukuan untuk dijadikan input dalam Laporan Perhitungan Anggaran (perbandingan antara anggaran dan realisasi).

- b. **Satuan Kerja**, yang menjadi sumber pendapatan daerah akan menyetorkan pemasukan (pajak, retribusi dan lain-lain) kepada Bendaharawan umum Daerah, selanjutnya mereka akan menerima Surat Tanda Setoran (STS) dan bukti penerimaan lainnya yang sah.
- c. **Subbag Perbendaharaan**, akan menerima dokumen STS dan bukti penyetoran lainnya yang sah dari satuan kerja bersangkutan, untuk kemudian mensahkan dokumen tersebut dan dikirimkan ke Subbag Pembukuan agar dilakukan pencatatan dan pembukuan atas transaksi penerimaan keuangan.
- d. **Bendaharawan Umum Daerah (BUD)**, akan menerima penyetoran dari Satuan Kerja yang untuk kemudian dibuatkan STS dan slip setoran sebagai tanda bukti, dan dikirimkan ke Subbag Perbendaharaan untuk divalidasi kebenaran dari STS tersebut, dan menerimanya kembali serta mengirimkannya ke Satuan Kerja yang bersangkutan.
- e. **Pihak Ketiga**, Pihak ketiga akan menyerahkan rekapitulasi Pihak Ketiga berkaitan dengan kewajiban dan hak yang mereka dapatkan (gambar 5.3).

Sistem Informasi Pengeluaran Kas (Level 1)

- a. **Kepala Daerah**, akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selain itu Kepala Daerah akan memberikan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai alat dalam pelaksanaan realisasi dari anggaran yang telah disahkan.
- b. **Satuan Kerja**, dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat satuan kerja/ dinas/ unit organisasi akan membutuhkan dana yang tercermin dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Setelah menerima SKO dari Kepala Daerah, satuan kerja berhak mengajukan pencairan dana atas anggaran yang telah ditetapkan, disertai dokumen Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian

Keuangan, dalam hal ini Subbag Perbendaharaan dan Satuan Kerja terkait akan menerima realisasi dana tersebut.



Gambar 5.4 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Pengeluaran Kas (Level 1)

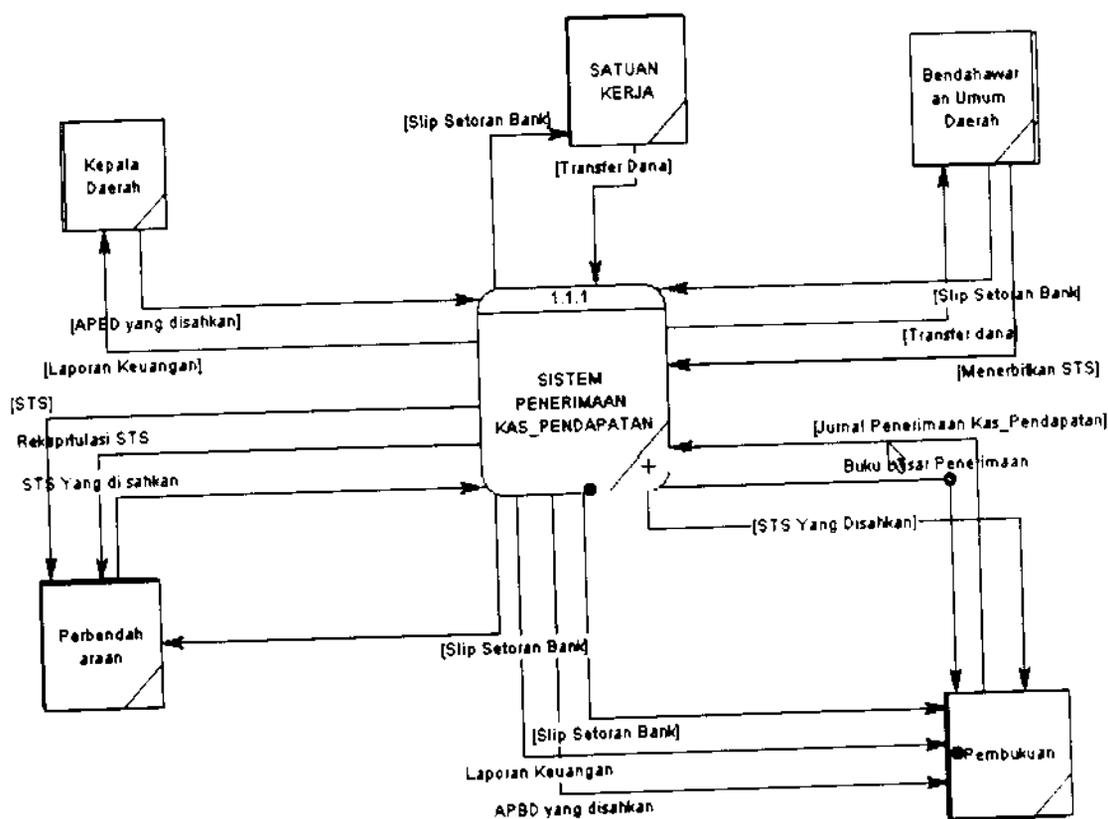
- c. **Subbag Perbendaharaan**, akan menerima dokumen SPM yang untuk kemudian SPM harus mendapatkan verifikasi disposisi dari Subbag Verifikasi setelah itu mendistribusikannya ke semua Satuan Kerja agar dapat dilakukan pencairan ke Bendaharawan Umum Daerah serta Subbag Pembukuan agar dilakukan pencatatan dan pembukuan atas berbagai transaksi keuangan.

- d. **Subbag Verifikasi**, setelah menerima dokumen terkait dengan pengeluaran keuangan (SPP, SKO dan bukti lainnya yang sah) dan melakukan pengecekan atas kebenaran formil dan materiil dari dokumen tersebut untuk selanjutnya akan memberikan lembar disposisi ke Subbag Perbendaharaan agar dapat diterbitkan SPM.
- e. **Bendaharawan Umum Daerah (BUD)**, berkaitan dengan pengeluaran. Bendaharawan Umum Daerah akan menerima SPM beserta Cek yang dibuat oleh Subbag Perbendaharaan, agar dilakukan pencairan dana, dan untuk kemudian akan diserahkan ke Satuan Kerja yang bersangkutan untuk operasional, dan Subbag Pembukuan untuk dilakukan pencatatan akuntansi.
- f. **Subbag Pembukuan**, Subbag Pembukuan akan melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan SPM, STS dan bukti transaksi lainnya yang sah untuk kemudian dibuatkan laporan keuangan.
- g. **Pihak Ketiga**, akan menyerahkan rekapitulasi Pihak Ketiga berkaitan dan menerima nota transfer dari Bendaharawan Umum Daerah (gambar 5.4).

Sistem Informasi Penerimaan Kas (Level 2)

Sistem Informasi Penerimaan Kas Pendapatan (Level2)

- a. **Kepala Daerah**, berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/ Laporan Keuangan secara triwulanan.



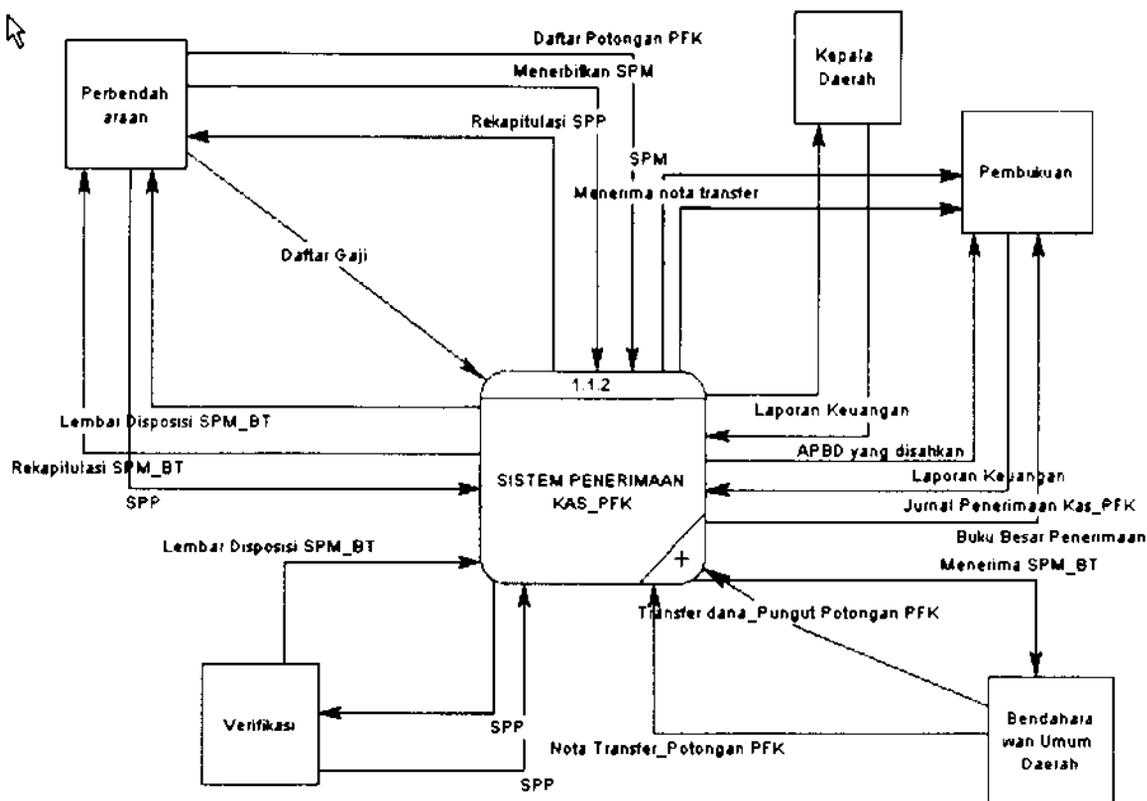
Gambar 5.5 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Penerimaan Kas_Pendapatan (Level 2)

Kepala daerah pada awal tahun anggaran akan menyerahkan APBD yang disahkan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD pada bagian keuangan dalam hal ini Subbag Perbendaharaan yang untuk kemudian diteruskan ke Subbag Pembukuan untuk dijadikan sebagai input dalam Laporan Perhitungan Anggaran (perbandingan antara anggaran dan realisasi).

- b. **Satuan Kerja**, bagi satuan kerja yang menjadi sumber pendapatan akan menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Bagian Keuangan yang diawali dengan penyetoran ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang untuk selanjutnya mereka akan mendapatkan bukti transfer dan Surat Tanda Setoran yang telah disahkan oleh Subbagian Perbendaharaan.

- c. **Bendaharawan Umum Daerah**, akan menerima setoran uang dari satuan kerja dan untuk kemudian mengeluarkan slip setoran dan Surat Tanda Setoran (STS), yang untuk kemudian dikirimkan ke Subbag Perbendaharaan untuk divalidasi.
- d. **Subbag Perbendaharaan**, akan menerima slip setoran bank dari Bendaharawan Umum Daerah dan STS untuk kemudian mengecek kebenaran dokumen tersebut dan mensahkannya. Subbag Perbendaharaan akan menerima rekapitulasi STS dari sistem informasi ini.
- e. **Subbag Pembukuan**, akan melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan STS, slip setoran bank dan bukti penerimaan lainnya yang sah yang untuk kemudian melakukan proses entry jurnal penerimaan kas dan membuat laporan keuangan (gambar 5.5).

Sistem Informasi Penerimaan Kas PFK (Level2)

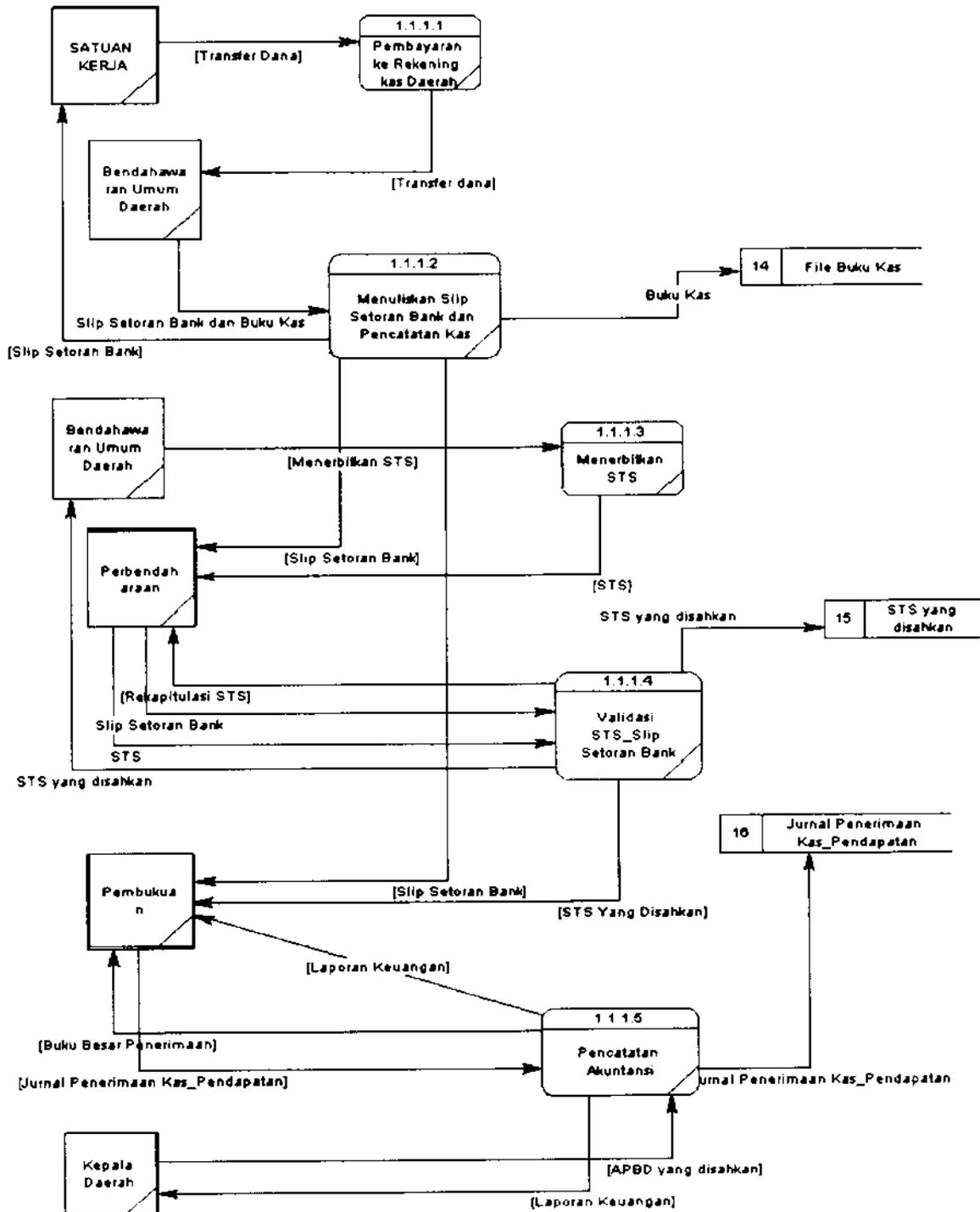


Gambar 5.6 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Penerimaan Kas PFK (Level 2)

- a. **Kepala Daerah**, Seperti halnya pada Sistem Penerimaan Kas_Pendapatan (Level 2) bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/ Laporan Keuangan secara triwulanan. Kepala daerah pada awal tahun anggaran akan menyerahkan APBD yang disahkan pada bagian keuangan dalam hal ini Subbag Perbendaharaan yang untuk kemudian diteruskan ke Subbag Pembukuan untuk dijadikan sebagai input dalam Laporan Perhitungan Anggaran (perbandingan antara anggaran dan realisasi).
- b. **Subbag Perbendaharaan**, berdasarkan daftar potongan PFK dan daftar gaji menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Dari sistem informasi ini Subbag Perbendaharaan akan mendapatkan rekapitulasi SPP yang telah diterbitkan dalam periode tertentu sesuai kebutuhan. Subbag Perbendaharaan juga menerima lembar disposisi dari yang dikeluarkan oleh Subbag verifikasi untuk kemudian diterbitkan SPM berdasarkan lembar disposisi tersebut.
- c. **Subbag Verifikasi**, menerima hasil cetakan dan tabel SPP yang dikirimkan oleh Subbag Perbendaharaan dan kemudian melakukan verifikasi berkaitan dengan kebenaran materiil dan formal SPP, serta kebenaran hasil rekaman dengan SPP. Yang selanjutnya akan mengirimkan kembali SPP beserta lembar disposisi tersebut ke bagian perbendaharaan untuk diterbitkannya SPM.
- d. Berdasarkan SPM yang diterima, **Bendaharawan Umum Daerah** akan mentransfer dana ke Pihak Ketiga membuat Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota transfer beserta SPM untuk menjadi catatan dan bukti transaksi bagi Subbag Pembukuan.

- e. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan, **Subbag Pembukuan** akan melakukan pencatatan akuntansi berkaitan dengan penerimaan kas PFK ini (gambar 5.6).

5.2.2.2.1.1 Sistem Informasi Penerimaan Kas –Pendapatan (Level 3)

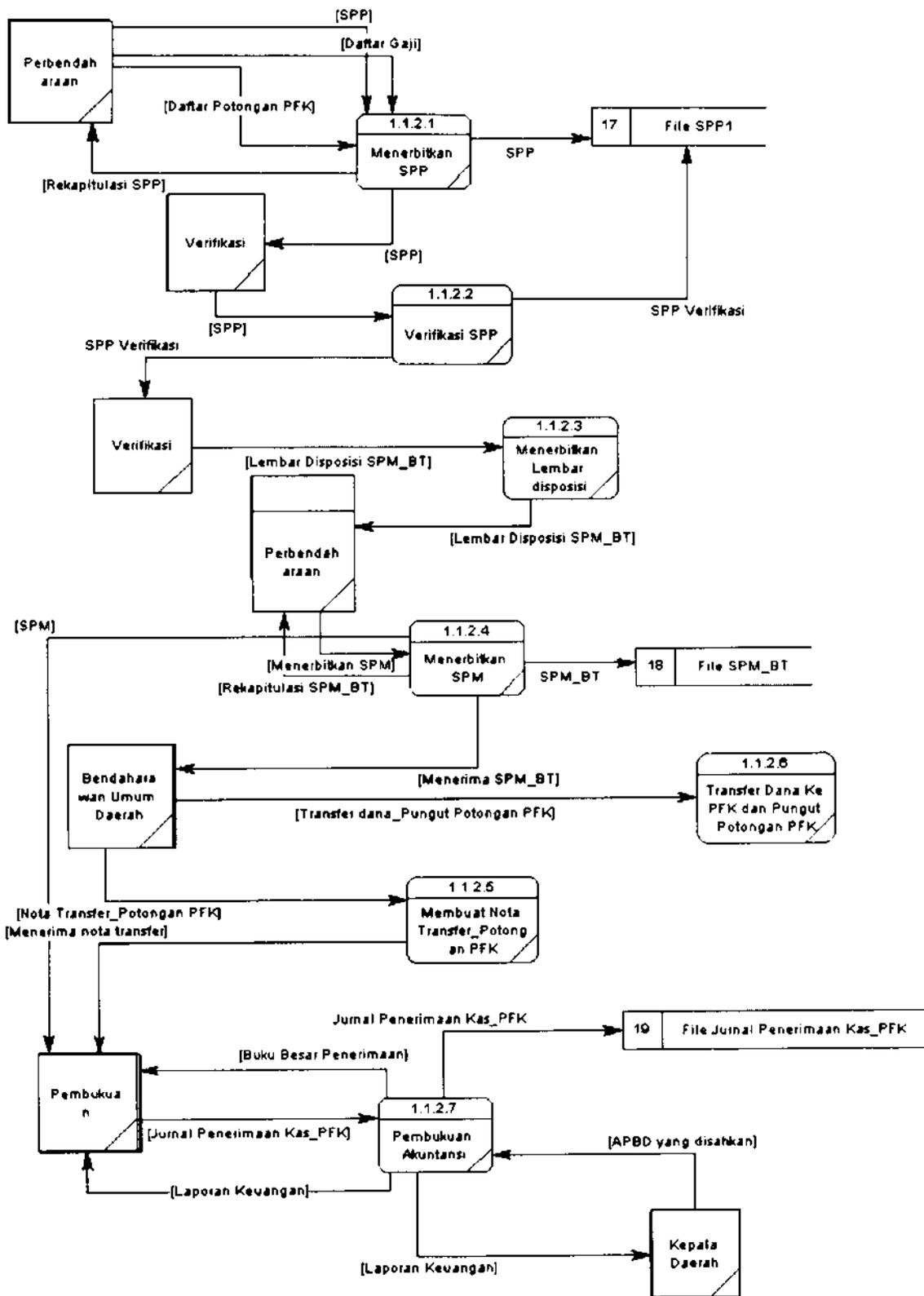


Gambar 5.7 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Penerimaan Kas_Pendapatan (Level 3)

Sistem ini diawali dengan proses pembayaran ke rekening kas daerah (Proses 1.1.1.1) oleh Satuan Kerja, yang diterima oleh Bendaharawan Umum daerah, yang untuk kemudian dilanjutkan dengan menuliskan slip setoran bank dan pencatatan kas di buku kas (proses 1.1.1.2). Slip setoran bank akan diterima oleh Satuan Kerja sedangkan buku kas diserahkan ke Subbag Pembukuan yang terlebih dahulu ke dalam file Buku Kas. Berdasarkan slip setoran bank tersebut Bendaharawan Umum Daerah juga menerbitkan STS (Proses 1.1.1.3) yang untuk kemudian bersama-sama dengan slip setoran bank di serahkan ke Subbag Perbendaharaan untuk disahkan. STS yang telah disahkan untuk kemudian dientrikan kedalam File STS yang disahkan sehingga dari sini dapat dicetak Rekapitulasi STS. STS yang disahkan beserta slip setoran bank tersebut diserahkan ke Bendaharawan Umum Daerah dan ke Subbag Pembukuan untuk dilakukan pencatatan akuntansi (1.1.1.4). Subbag Pembukuan akan melakukan entri jurnal penerimaan kas yang kemudian disimpan di file jurnal penerimaan kas pendapatan. Berdasarkan data APBD yang telah disahkan dan dikeluarkan oleh Kepala Daerah dapat diketahui pula Laporan Perhitungan APBD dan Laporan Keuangan Lainnya yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah. Untuk kepentingan internal, Subbag Pembukuan dapat memonitor beberapa rekening dan transaksi melalui tercetaknya Buku Besar dari proses akuntansi tersebut (gambar 5.7).

5.2.2.2.1.2 Sistem Informasi Penerimaan Kas – Pihak Ketiga (Level 3)

Berdasarkan Daftar gaji dan daftar potongan PFK Subbag Perbendaharaan akan melakukan Penerbitan SPP (Proses 1.1.2.). Data SPP ini akan disimpan ke file SPP. SPP ini kemudian diserahkan ke Subbag Verifikasi untuk dilakukan proses verifikasi SPP (Proses 1.1.2.2). Hasil verifikasi SPP ini untuk kemudian disimpan di file SPP dan selanjutnya Subbag verifikasi ini akan menerbitkan Lembar disposisi SPM (Proses 1.1.2.3).



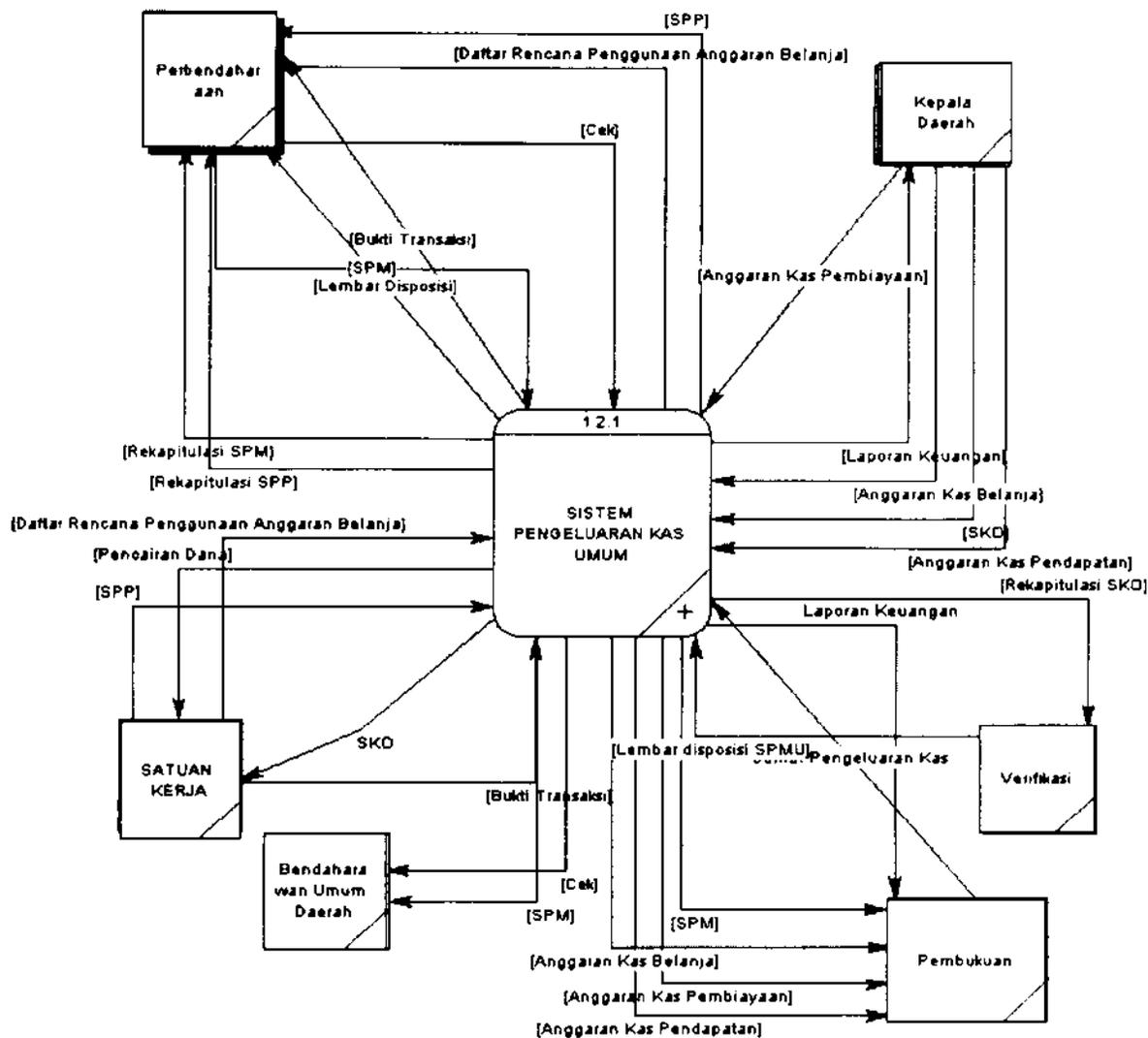
Gambar 5.8 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Penerimaan Kas_PFK (Level 3)

Lembar disposisi ini diserahkan ke Subbag Perbendaharaan sehingga berdasarkan lembar disposisi tersebut Subbag Perbendaharaan dapat langsung menerbitkan SPM (Proses 1.1.2.4), kemudian Subbag Perbendaharaan akan melakukan entri SPM yang selanjutnya akan disimpan di file SPM sehingga dapat dilakukan cetak rekapitulasi SPM. Berdasarkan SPM yang diterima oleh Bendaharawan Umum Daerah dari subbag Perbendaharaan maka akan dilakukan transfer dana dan pungut potongan PFK (Proses 1.1.2.6) yang juga disertai dengan pembuatan nota transfer _ potongan /pungut PFK. Nota transfer potongan/pungut PFK dan SPM diserahkan ke Subbag Pembukuan untuk dilakukan proses Pembukuan Akuntansi (Proses 1.1.2.7) sehingga dapat dilakukan cetak laporan keuangan (gambar 5.8).

5.2.2.2.2 Sistem Informasi Pengeluaran Kas (Level 2)

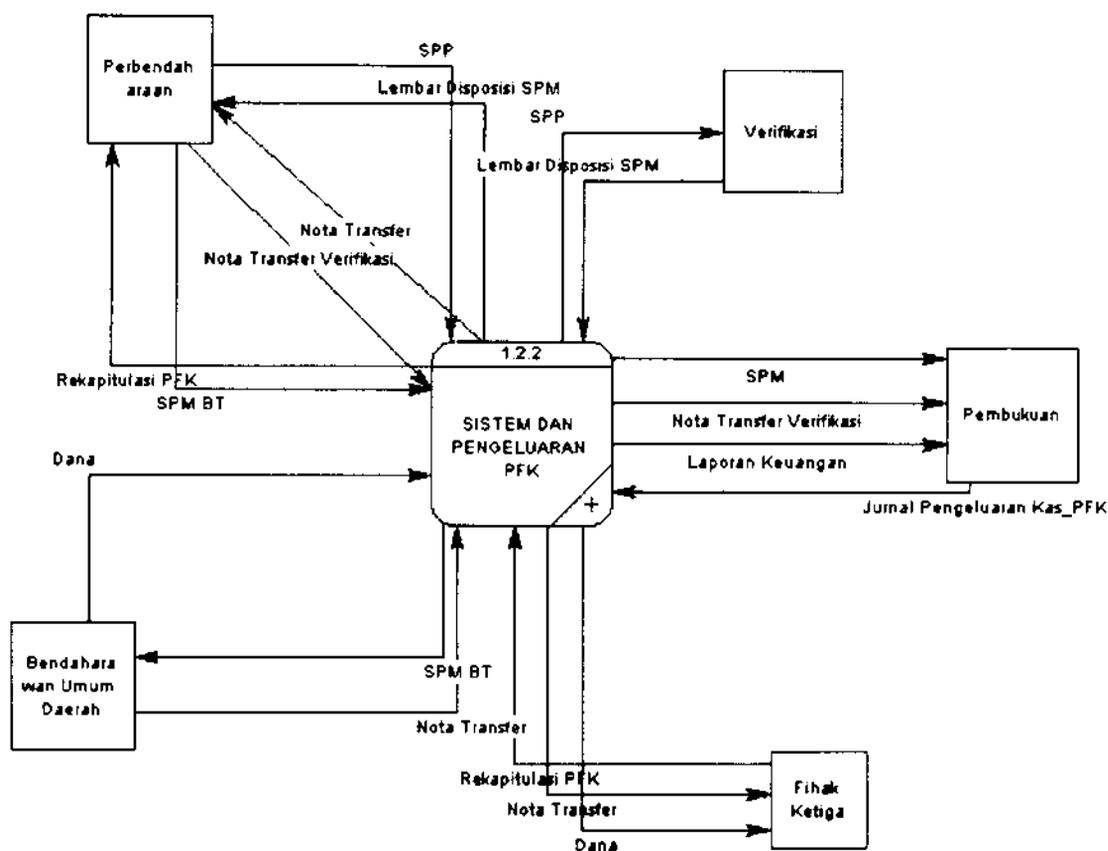
Sistem Informasi Pengeluaran Kas (Level2)

- a. **Kepala Daerah**, setelah ditetapkannya Anggaran kas oleh Kepala Daerah maka dikeluarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang dikirimkan ke masing-masing Satuan Kerja berdasarkan kebutuhan dan anggaran yang telah ditetapkan.
- b. **Satuan Kerja**, berdasarkan SKO yang diterima oleh pemerintah maka Satuan Kerja akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukti transaksi lainnya ke Subbag Perbendaharaan.
- c. **Subbag Perbendaharaan**, akan menerima SPP dan bukti transaksi tersebut untuk mengecek kelengkapan dokumen tersebut dan mengirimkannya ke Subbag verifikasi. Setelah menerima kembali dari Subbag verifikasi berkenaan dengan pengajuan SPP tersebut yang disertai dengan lembar disposisi, maka Subbag Perbendaharaan akan menerbitkan SPM dan cek untuk dikirimkan ke Bendaharawan Umum Daerah dan Subbag Pembukuan.



Gambar 5.9 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Pengeluaran Kas_Umum (Level 3)

- d. **Bendaharawan Umum Daerah**, setelah menerima SPM dan cek tersebut maka akan dilakukan pencairan dana ke Satuan Kerja bersangkutan.
- e. **Subbag Pembukuan**, akan melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan SPM dan bukti penerimaan lainnya yang sah yang untuk kemudian melakukan proses entry jurnal pengeluaran kas dan membuat laporan keuangan (gambar 5.9).

Sistem Informasi Pengeluaran Kas PFK (Level2)

Gambar 5.10 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Pengeluaran Kas_PFK (Level 3)

- a. **Subbag Perbendaharaan**, berdasarkan rekapitulasi PFK akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan untuk kemudian dikirimkan ke Subbag verifikasi. Setelah menerima kembali dari Subbag verifikasi berkenaan dengan pengajuan SPP tersebut yang disertai dengan lembar disposisi, maka Subbag Perbendaharaan akan menerbitkan SPM dan cek untuk dikirimkan ke Bendaharawan Umum Daerah dan Subbag Pembukuan.
- b. **Subbag Verifikasi**, akan menerima SPP yang telah dikirimkan dan mengecek kebenaran materiil dan formil atas SPP tersebut. Yang selanjutnya akan mengirimkan kembali SPP beserta lembar disposisi tersebut ke bagian perbendaharaan untuk diterbitkannya SPM.

- c. Berdasarkan SPM yang diterima, **Bendaharawan Umum Daerah** akan mentransfer dana ke Pihak Ketiga membuat Nota Transfer sebagai bukti transfer. Nota transfer beserta SPM untuk menjadi catatan dan bukti transaksi bagi Subbag Pembukuan.
- d. Berdasarkan SPMU dan Nota Transfer yang diterima dari Unit Perbendaharaan, **Subbag Pembukuan** akan melakukan pencatatan akuntansi berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas PFK ini (gambar 5.10).

5.2.2.2.2.1 Sistem Informasi Pengeluaran Kas – Umum (level 3)

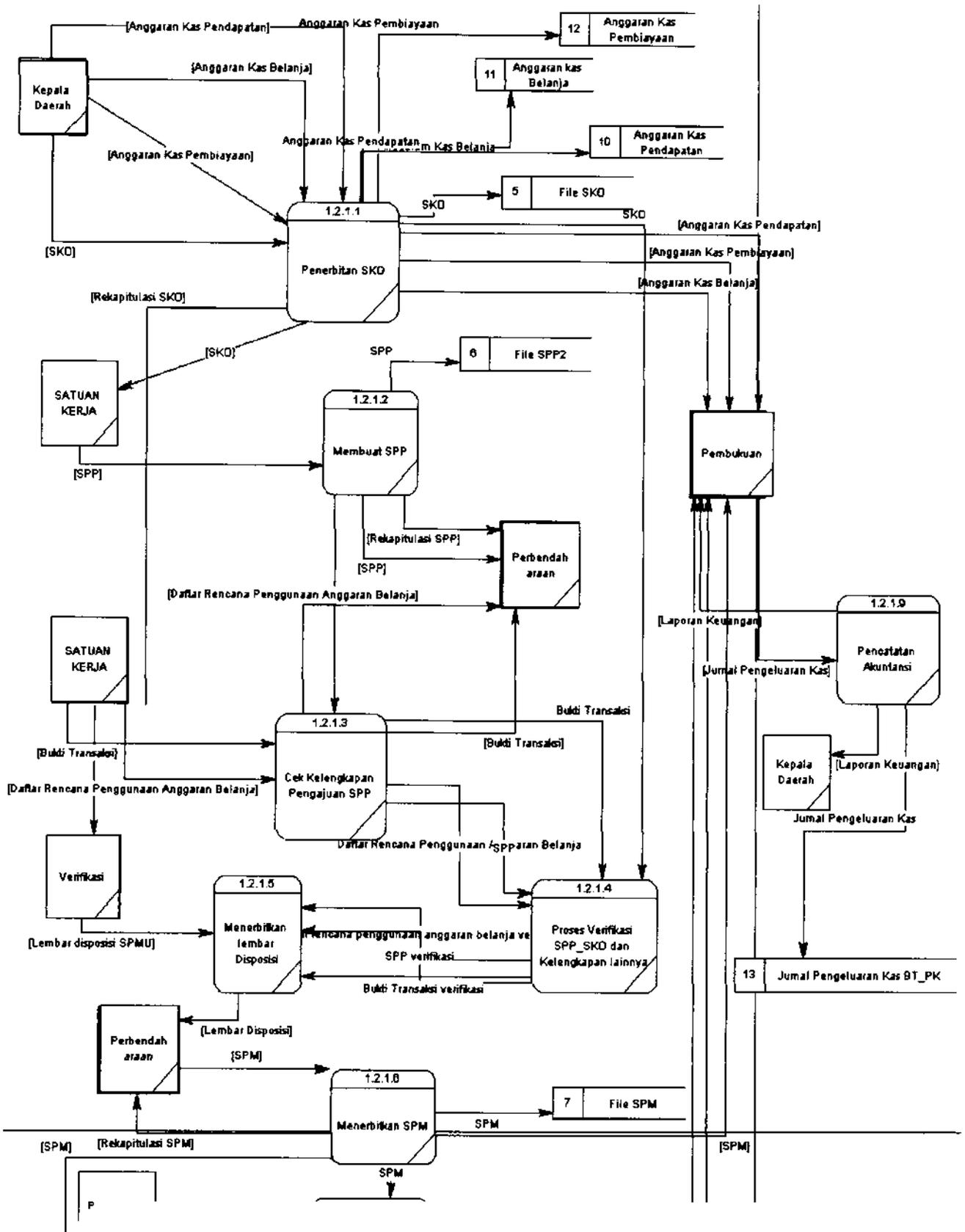
Setelah ditetapkannya anggaran kas oleh Kepala Daerah, maka kepala daerah akan menerbitkan SKO (Proses 1.2.1.1) kemudian SKO tersebut akan diberikan ke Satuan Kerja dan Bagian Keuangan dalam hal ini Subbag verifikasi sebagai data masukan dalam proses verifikasi nantinya, dalam proses ini data SKO akan disimpan dalam file SKO sehingga dapat dihasilkan rekapitulasi SKO yang memudahkan Subbag verifikasi dalam melakukan pengecekan. Berdasarkan SKO tersebut maka Satuan Kerja akan mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (Proses 1.2.1.2) yang untuk kemudian diserahkan ke bagian Perbendaharaan. Data SPP ini akan disimpan dalam file SPP. Subbag Perbendaharaan dapat mencetak rekapitulasi SPP.

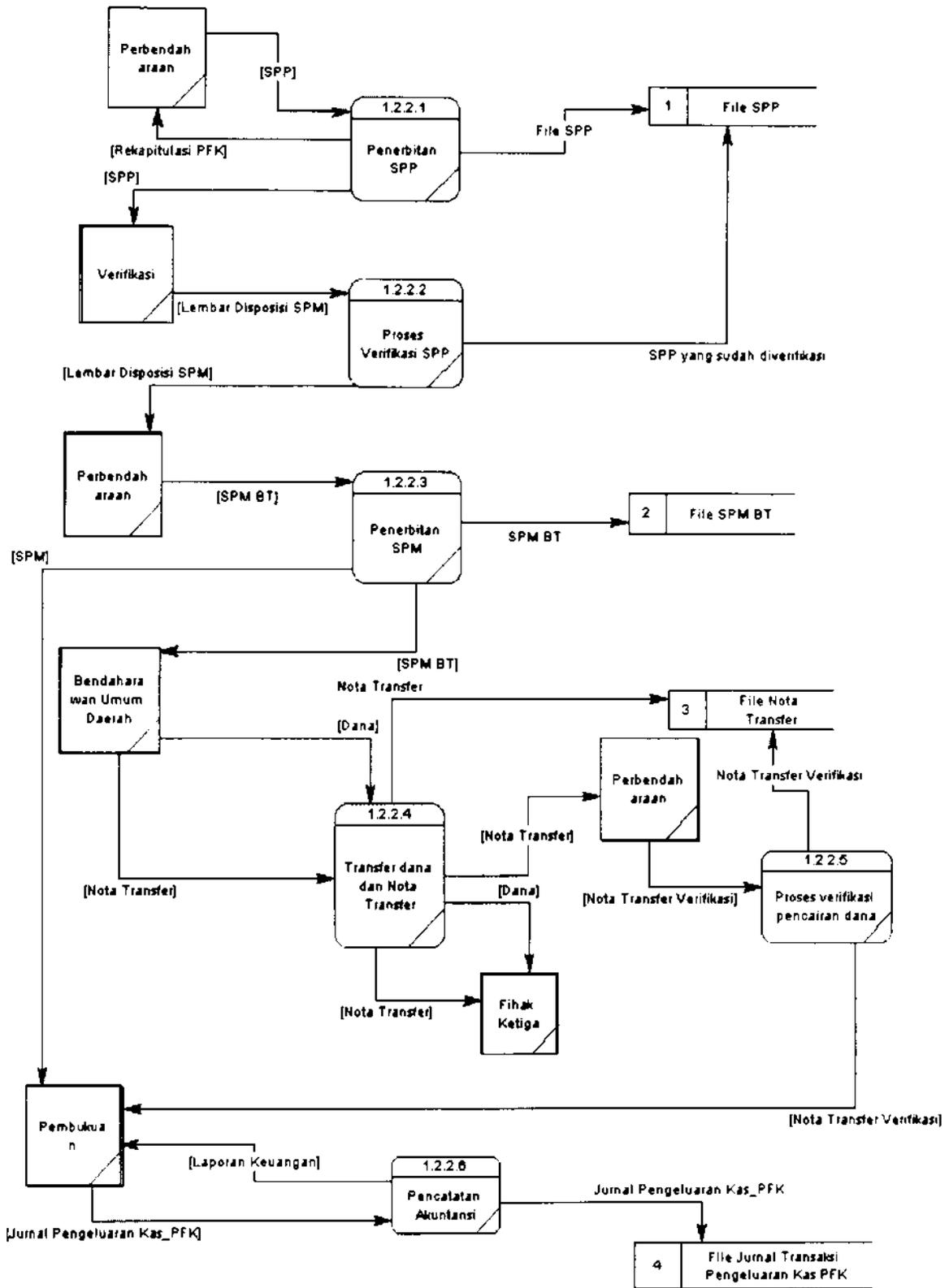
Disamping itu Satuan Kerja juga mengirimkan Daftar Rencana Penggunaan Anggaran dan bukti transaksi lainnya yang sah. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan (Proses 1.2.1.3) dokumen, maka akan dilakukan tahapan selanjutnya yakni dokumen tersebut diserahkan ke Subbag verifikasi untuk dilakukan proses verifikasi atas keabsahan dokumen tersebut dan dilakukan perbandingan dengan SKO (Proses 1.2.1.4). Setelah proses verifikasi selesai maka Subbag verifikasi akan menerbitkan lembar disposisi SPM yang akan diserahkan ke Subbag Perbendaharaan. Berdasarkan lembar disposisi yang telah diterima Subbag Perbendaharaan akan menerbitkan SPM

(roses 1.2.1.6) dan menuliskan Cek (Proses 1.2.1.7) keduanya disimpan dalam database file SPM dan file Cek, sehingga dapat dilakukan pencairan dana oleh masing-masing Satuan Kerja. Cek tersebut akan dikirimkan ke Bendaharawan Umum Daerah untuk proses Pencairan Cek (proses 1.2.1.8) data cek yang dicairkan tersebut dimasukkan ke dalam file cek yang dicairkan sehingga pada akhir periode dapat dilakukan rekonsiliasi atas cek tersebut dengan Subbag Pembukuan. Subbag Pembukuan akan mengambil data dari file Anggaran Kas Anggaran kas Pendapatan, Anggaran kas Belanja dan Anggaran Kas Pembiayaan) sebagai data dalam proses perhitungan realisasi anggaran nantinya. Berdasarkan SPM, Cek dan bukti kelengkapan lainnya yang sah Subbag Pembukuan akan mencatat semua transaksi tersebut (proses 1.2.1.9) dalam jurnal pengeluaran kas dan disimpan dalam file jurnal pengeluaran kas, sehingga dapat dilakukan proses cetak laporan (gambar 5.11).

5.2.2.2.2 Sistem Informasi Pengeluaran Kas – Pihak Ketiga (Level 3)

Berdasarkan rekapitulasi PFK, Subbag Perbendaharaan akan melakukan penerbitan SPP (Proses 1.2.2.1) yang untuk kemudian diserahkan ke Subbag Verifikasi. Data SPP tersebut akan dientrikan ke dalam database dan disimpan dalam file SPP. Subbag Verifikasi akan melakukan pengecekan atas kebenaran materiil dan formil atas SPP tersebut (proses 1.2.2.2) dan jika dinilai sudah sesuai maka akan diterbitkan lembar disposisi dan semua dokumen tersebut diserahkan kembali ke Subbag Perbendaharaan. Berdasarkan lembar disposisi yang telah diterima maka Subbag Perbendaharaan akan menerbitkan SPM (Proses 1.2.2.3) dan selanjutnya dikirimkan ke Bendaharawan Umum Daerah dan Subbag Pembukuan. Data SPM tersebut dientrikan kedalam database dan disimpan dalam file SPM. Dari SPM yang diterima maka Bendaharawan Umum Daerah akan membuat nota transfer dan melakukan transfer dana ke Pihak Ketiga (proses 1.2.2.4).





Gambar 5.12 DFD Sistem Informasi Keuangan Daerah _Pengeluaran Kas_PFK (Level 3)

Selanjutnya nota transfer tersebut akan dikirimkan ke Subbag Perbendaharaan dan dilakukan proses verifikasi pencairan dana (Proses 1.2.2.5). Data nota transfer akan dientrikan dalam database dan disimpan dalam file nota transfer. Hasil nota transfer verifikasi selanjutnya dikirimkan ke Subbag Pembukuan bersamaan dengan data SPM. Berdasarkan dokumen tersebut maka dilakukan pencatatan akuntansi (Proses 1.2.2.6) dengan melakukan entri jurnal pengeluaran kas atas pembayaran kepada Pihak Ketiga. Setelah dilakukan proses posting dapat dicetak Laporan Keuangan yang dibutuhkan (gambar 5.12).

5.2.3 *Conceptual Data Model*

Sistem informasi keuangan ini terdiri dari beberapa tabel database yang mana menjadi '*data storage*' dari tiap struktur informasi khusus yang telah disebutkan dijelaskan dalam *Data Flow Diagram (DFD)*. *Conceptual Data Model* menggambarkan obyek-obyek data atau fungsional dari masing-masing proses dalam sistem informasi keuangan daerah yang telah terangkai dalam suatu sistem terintegrasi (gambar 5.13). Sistem informasi keuangan daerah ini memiliki 14 (empat belas) obyek data storage yang terdiri dari : 1) kode rekening, 2) kategori, 3) buku kas, 4) jurnal penerimaan kas, 5) surat tanda setoran , 6) anggaran kas pendapatan, 7) anggaran kas pembiayaan, 8) surat perintah membayar, 9) anggaran kas belanja, 10) surat keterangan otorisasi, 11) surat perintah pembayaran, 12) jurnal pengeluaran kas, 13) cek yang dikeluarkan/ diterima, 14) cek yang dibayarkan/dicairkan. Berikut dijelaskan mengenai relasi tabel dalam konteks conceptual data model dari Sistem Informasi Keuangan Daerah ini.

Tabel **Jurnal Penerimaan Kas** merupakan tabel inti pengolahan data dimana tabel ini menerima beberapa tabel lainnya dalam kaitannya dengan proses pengolahan

data transaksi penerimaan kas. Tabel Jurnal Penerimaan Kas terdiri dari beberapa *field* antara lain :

1. Nomor jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mengidentifikasi nomor record jurnal yang dientrikan.
2. Tanggal mengetahui, merupakan tanggal saat transaksi tersebut dientrikan.
3. Kode rekening, merupakan identifikasi pembebanan rekening dari transaksi penerimaan kas.
4. Referensi, merupakan identifikasi bukti adanya suatu transaksi penerimaan kas, yang dalam hal ini adalah STS, bank receipt dan bukti transaksi lainnya yang sah.
5. Jumlah (Rp), menunjukkan nilai dari masing-masing item transaksi yang ada dalam satu kejadian transaksi penerimaan kas.
6. Akumulasi (Rp), menunjukkan total nilai dari transaksi penerimaan kas dalam satu nomor jurnal.

Berkaitan dengan *field-field* tersebut adanya beberapa *field* yang diambil dari tabel lain diantaranya *field* kode rekening, diambil dari **tabel Kode Rekening** yang memunculkan *list* rekening sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Selanjutnya adalah *field* referensi dari jurnal penerimaan kas yaitu STS yang mengambil dari Tabel STS, yang memunculkan list STS pada tahun anggaran bersangkutan.

Tabel kode rekening terdiri dari *field* :

1. Kode Rekening, menunjukkan kode pembebanan dari pos rekening bersangkutan (berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).

2. Nama rekening, menunjukkan deskripsi atas pembebanan dari pos rekening sesuai dengan kode rekening terkait (berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).
3. Kategori, menunjukkan '*setting*' deskripsi pembagian dari rekening berdasarkan keluaran laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dalam hal ini kelompok rekening neraca dan rekening APBD (Laporan Perhitungan Anggaran). Sedangkan Laporan Arus Kas akan *disetup* sesuai dengan penggunaan metode yang digunakan. Laporan Arus Kas metode langsung akan menggunakan *setting* kelompok rekening neraca dan Laporan Arus Kas metode tidak langsung akan menggunakan *setting* kelompok rekening APBD (sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).
4. Sub kategori, merupakan deskripsi pembagian sesuai dengan pemilahan dari Kategori yang ada kemudian dibagi lagi dalam kelompok besar (subkategori). ada tiga kelompok laporan keuangan yang memisahkan sub kategori. yakni :
 - a. Neraca, terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Aktiva, Utang dan Ekuitas Dana
 - b. Laporan Aliran Kas metode Langsung, terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
 - c. Laporan Perhitungan Anggaran terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - d. Laporan Aliran Kas metode Tidak Langsung, terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Aktiva, Utang dan Ekuitas Dana
5. Saldo awal, merupakan nilai saldo pada rekening neraca pada awal pembentukan suatu unit organisasi. Berkaitan dengan ini ketentuan dalam pasal 105

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa neraca awal daerah dapat dilakukan secara bertahap melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh lembaga independen bersertifikasi bidang penilaian aset, dengan mengacu pada pedoman penilaian aset daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Field Kategori dan subkategori yang dimaksud merupakan tabel tersendiri yang dibentuk dalam **tabel kategori dan subkategori** dengan tujuan untuk memilah tipe rekening yang akan ditampilkan sesuai dengan jenis Laporan Keuangan bersangkutan.

Dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 rekening terbagi dalam enam (6) kelompok yaitu:

1. rekening Pendapatan;
2. rekening Belanja;
3. rekening Pembiayaan;
4. rekening Aktiva
5. rekening Utang, dan;
6. rekening Ekuitas.

Lebih jauh lagi mengenai Tabel Jurnal Penerimaan Kas *field*. **Referensi** dapat mengambil dari beberapa tabel input antara lain pertama **Tabel STS** yang menunjukkan surat setoran yang diberikan oleh Bendaharawan Umum Daerah selain slip setoran bank, bagi Satuan Kerja yang telah melakukan penyetoran baik itu Pendapatan Asli Daerah ataupun lain-lain pendapatan yang sah. **Tabel STS** terdiri dari *field* :

1. Nomor STS, merupakan identifikasi dikeluarkannya STS atas penyetoran dari satuan kerja dari hasil penerimaan daerah.

2. Bank, tempat dimana satuan kerja melakukan transaksi penyetoran penerimaan ke rekening Bendaharawan Umum Daerah.
3. Nomor Rekening, identifikasi rekening milik pemerintah daerah yang terdaftar pada bank terkait.
4. Jumlah Uang, menunjukkan nilai total uang atas transaksi penyetoran penerimaan ke rekening Bendaharawan Umum Daerah.
5. Kode Rekening, menunjukkan item pos pembebanan kelompok rekening Pendapatan.
6. Uraian Rincian Obyek, menunjukkan item deskripsi identifikasi suatu transaksi penerimaan kas, berdasarkan obyek penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam PERDA (Peraturan Daerah).
7. Jumlah Keperluan, menunjukkan nilai dari masing-masing item penerimaan daerah.
8. Kepala Dinas, berisi nama dan tanda tangan kewenangan kepala dinas yang bersangkutan.
9. NIP Kepala Dinas, identifikasi Nomor induk pegawai kepala dinas/ satuan kerja yang bertanggung jawab atas penyetoran hasil penerimaan daerah.
10. Pemegang Kas, berisi nama dan tanda tangan pemegang kas
11. NIP Pemegang Kas, menunjukkan nomor induk pegawai dari pemegang kas.
12. Kasir, berisi nama dan tanda tangan dari kasir dinas bersangkutan.
13. NIP Kasir, menunjukkan nomor induk pegawai dari kasir dinas.

Tabel STS akan menjadi referensi bagi **Tabel Jurnal Penerimaan Kas**. Kedua, adalah **Tabel Buku Kas** yang memuat segala bentuk catatan keuangan Bendaharawan Umum Daerah setiap harinya, sebagai bukti pembantu kebenaran STS yang telah disetorkan oleh Satuan Kerja dan bukti kesesuaian keabsahan SPM.

Sehingga Tabel Buku Kas ini menjadi referensi proses rekonsiliasi item transaksi baik oleh tabel penerimaan kas maupun tabel pengeluaran kas. **Tabel Buku Kas** terdiri dari field :

1. Nomor Urut, menunjukkan nomor identifikasi urutan *record* yang dientrikan pada Buku Kas.
2. Tanggal Mengetahui, merupakan tanggal saat terjadinya transaksi.
3. Uraian, berisi deskripsi dari transaksi keuangan yang terjadi baik itu penerimaan kas ataupun pengeluaran kas.
4. Rekening, berisi pos pembebanan dari item transaksi keuangan yang terjadi yang dicatatkan.
5. Penerimaan, berisi nilai dari klasifikasi transaksi penerimaan kas.
6. Pengeluaran, berisi nilai dari klasifikasi transaksi pengeluaran kas.

Tabel ketiga yang berhubungan dengan Jurnal Penerimaan Kas yaitu **Tabel SPM** dapat menjadi referensi berkaitan dengan penerimaan kas hasil potongan Pihak Ketiga. Selanjutnya tabel yang berhubungan dengan Jurnal Penerimaan Kas yaitu **Tabel Anggaran Kas Pendapatan** sebagai acuan dalam proses laporan keuangan Perhitungan Anggaran yang memuat data mengenai antara lain:

1. Kabupaten, deskripsi nama kabupaten/ daerah.
2. Tahun anggaran, berisi spesifikasi tahun anggaran yang berlaku.
3. Nomor, berisi Nomor urutan klasifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
4. Uraian, berisi deskripsi dari klasifikasi anggaran yang ditampilkan (*caption*) sesuai dengan ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
5. Target tahun anggaran, berisi total nilai rencana capaian anggaran pada tahun bersangkutan.

6. Rencana realisasi triwulan I, rencana realisasi triwulan II, rencana realisasi triwulan III dan rencana realisasi triwulan IV, menunjukkan rencana nilai realisasi anggaran baik triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
1. Selain itu tabel inti yang kedua yakni **Jurnal Pengeluaran Kas** juga menerima tabel dari beberapa tabel lainnya. Dalam jurnal pengeluaran kas terdiri dari *field* :
 2. Nomor jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mengidentifikasi nomor record jurnal yang dientrikan.
 3. Tanggal mengetahui, merupakan tanggal saat transaksi tersebut dientrikan
 4. Kode rekening, merupakan identifikasi pembebanan rekening dari transaksi penerimaan kas.
 5. Referensi, merupakan identifikasi bukti adanya suatu transaksi pengeluaran kas, yang dalam hal ini adalah SPM, cek, faktur dan bukti transaksi lainnya yang sah.
 6. Jumlah (Rp), menunjukkan nilai dari masing-masing item transaksi yang ada dalam satu kejadian transaksi pengeluaran kas.
 7. Akumulasi (Rp), menunjukkan total nilai dari transaksi pengeluaran kas dalam satu nomor jurnal.

Berkaitan dengan *field - field* tersebut diatas *field* kode rekening diambil dari tabel Kode Rekening yang terdiri dari *field* antara lain:

1. Kode Rekening, menunjukkan kode pembebanan dari pos rekening bersangkutan (berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).
2. Nama Rekening, menunjukkan deskripsi atas pembebanan dari pos rekening sesuai dengan kode rekening terkait (berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).

3. Kategori, menunjukkan '*setting*' deskripsi pembagian dari rekening berdasarkan keluaran laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dalam hal ini kelompok rekening neraca dan rekening APBD (Laporan Perhitungan Anggaran). Sedangkan Laporan Arus Kas akan *disetup* sesuai dengan penggunaan metode yang digunakan. Laporan Arus Kas metode langsung akan menggunakan *setting* kelompok rekening neraca dan Laporan Arus Kas metode tidak langsung akan menggunakan *setting* kelompok rekening APBD (sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).
4. Sub kategori, merupakan deskripsi pembagian sesuai dengan pemilahan dari Kategori yang ada kemudian dibagi lagi dalam kelompok besar (subkategori). ada tiga kelompok laporan keuangan yang memisahkan sub kategori, yakni :
 - b. Neraca, terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Aktiva, Utang dan Ekuitas Dana
 - c. Laporan Aliran Kas metode Langsung, terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
 - d. Laporan Perhitungan Anggaran terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - e. Laporan Aliran Kas metode Tidak Langsung, terdiri dari kelompok rekening/ subkategori Aktiva, Utang dan Ekuitas Dana
5. Saldo awal, merupakan nilai saldo pada rekening neraca pada awal pembentukan suatu unit organisasi.

Kaitannya dengan tabel Jurnal Pengeluaran Kas *field Referensi* dapat mengambil data dari tabel input yakni tabel SPM yang menunjukkan surat perintah membayar yang

dikeluarkan oleh Subbag Perbendaharaan atas persetujuan Subbag Verifikasi. Tabel SPM terdiri dari *field* :

1. Tahun Anggaran, merupakan tahun kejadian saat transaksi berlangsung.
2. Nomor SPM, berisi identifikasi nomor SPM dan sifatnya unik (terdapat unsur pembeda yang pasti antara data SPM satu dengan lainnya).
3. Unit Kerja, menunjukkan nama dinas atau satuan kerja terkait.
4. Pemegang Kas Rekanan, berisi data nama pemegang kas rekanan pemerintah daerah terkait dengan transaksi yang melibatkan pihak ketiga (rekanan pemerintah).
5. Nomor Rekening bank, berisi identifikasi digit nomor rekening di bank pemerintah.
6. Cabang, berisi nama cabang bank pemerintah yang ditunjuk pemerintah.
7. NPWP, berisi nomor wajib pajak rekanan terkait dengan pembebanan pajak atas transaksi keuangan yang terjadi.
8. Dasar Pembayaran Otorisasi, berisi nomor referensi SKO yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Daerah.
9. Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Tersangka, merupakan deskripsi penggolongan yang sifatnya '*optional*' (pilih salah satu) atas kepentingan dikeluarkannya SPM
10. Kode Rekening, menunjukkan kode pembebanan dari pos rekening bersangkutan (berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).
11. Jumlah Keperluan, menunjukkan nilai dari masing-masing item keperluan dan kepentingan dinas.

12. Total Jumlah Keperluan, merupakan total nilai dari jumlah keperluan dinas atau satuan kerja terkait.
13. Nomor Potongan, berisi nomor potongan dari total nilai keperluan terkait dilaksanakannya transaksi keuangan yang melibatkan pihak ketiga.
14. Uraian (kode rekening), deskripsi pos rekening pembebanan terjadinya potongan.
15. Jumlah Potongan, berisi informasi nilai potongan per item rekening.
16. Keterangan, catatan terjadinya potongan.
17. PPn, berisi informasi item deskripsi pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada transaksi bersangkutan.
18. Jumlah PPn, berisi nilai dari PPn yang dikenakan per item deskripsi yang diterangkan.
19. Keterangan PPn, berisi catatan tambahan atas pengenaan PPn.
20. Total Jumlah PPn, menunjukkan total jumlah PPn yang dikenakan.
21. PPh, berisi informasi item deskripsi pajak pertambahan penghasilan yang dikenakan pada transaksi bersangkutan.
22. Jumlah PPh, berisi nilai dari PPh yang dikenakan per item deskripsi yang diterangkan.
23. Keterangan PPh, berisi catatan tambahan atas pengenaan PPh.
24. Total Jumlah PPh, menunjukkan total jumlah PPh yang dikenakan.
25. Jumlah yang diminta, berisi total nilai SPM yang diminta dinas atau satuan kerja terkait.
26. Total Jumlah Potongan, berisi total nilai potongan baik iuran, PPn, PPh dan pajak lain-lain yang dikenakan.
27. Jumlah Yang Dibayarkan, menunjukkan selisih nilai SPM dan nilai total potongan.

28. Jumlah Uang, menunjukkan selisih nilai SPM dan nilai total potongan yang diisi dalam format *text* (bukan nilai nominal).
29. Tempat Mengetahui, berisi nama tempat dikeluarkannya SPM.
30. Tanggal Mengetahui, berisi tanggal dikeluarkannya SPM.
31. Kepala Fungsi Perbendaharaan, berisi nama kepala Subbag Perbendaharaan yang bertanggung jawab dikeluarkannya SPM.
32. NIP Kepala Fungsi Perbendaharaan, berisi nomor induk pegawai kepala Subbag Perbendaharaan.

Keluarnya Surat Perintah Membayar ini atas referensi yang terdapat dalam tabel SPP (Surat Perintah Pembayaran). Sehingga tabel SPM bisa diakses jikalau tabel SPP telah diverifikasi dan memiliki mode keabsahan. **Tabel SPP** ini sendiri terdiri dari :

1. Nomor keputusan, berisi nomor keputusan sesuai dengan standar masing-masing dinas atau satuan kerja atas dikeluarkannya SPP.
2. Pemerintah kabupaten, berisi nama kabupaten.
3. Unit organisasi, menunjukkan nama dinas atau satuan kerja yang mengajukan SPP.
4. Lokasi, berisi alamat dinas atau satuan kerja terkait.
5. Kantor/ satuan kerja, berisi informasi kantor atau satuan kerja terkait.
6. Tahun anggaran, berisi tahun anggaran berlaku
7. Nomor SPP, menunjukkan nomor identifikasi SPP.
8. Dinas unit kerja, berisi nama dinas yang mengajukan SPP.
9. Kode dinas, berisi data kode dinas yang mengajukan (sesuai dengan ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002).

10. Lembaga daerah, berisi nama Lembaga daerah yang mengajukan (kalau setaraf lembaga).
11. Kode lembaga daerah, berisi kode Lemmbaga Daerah sesuai dengan Perda.
12. Unit organisasi, berisi nama unit organisasi daerah yang mengajukan SPP (sesuai Perda).
13. Kode unit organisasi, berisi kode unit organsisasi yang mengajukan SPP (sesuai dengan Perda).
14. Lokasi, berisi uraian lokasi/ alamat dari dinas yang mengajukan SPP.
15. aktivitas kegiatan, berisi uraian kegiatan yang diajukan dinas berdasarkan program yang tertuang dalam rencana strategis dinas, atas pengajuan SPP yang dilakukan.
16. Perincian jenis pengeluaran, berisi uraian pembebanan (kode rekening) atas pengeluaran yang diajukan,
17. Sebesar, nilai dari masing-masing item pengeluaran.
18. Tertuju pada bank, berisi identifikasi nomor rekening dinas terkait pada bank pemerintah yang ditunjuk.
19. PA tanggal : Triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV, berisi tanggal dan deskripsi pengajuan anggaran yang nilainya dirinci per triwulanan.
20. SKO tgl dan SKO : Triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV, berisi tanggal dan deskripsi SKO yang dirinci nilainya per triwulanan.
21. SPM Beban Tetap, berisi nilai SPM Beban Tetap yang diajukan.
22. SPM Pengisian Kas, berisi nilai SPM Pengisian Kas yang diajukan.
23. Kepala dinas/ unit kerja, NIP Kepala dinas, berisi nama dan nomor induk pegawai kepala dinas yang bertanggung jawab atas dikeluarkannya SPP.
24. Pemegang kas. NIP pemegang kas, berisi nama dan nomor induk pegawai pemegang kas dari dinas bersangkutan yang mengajukan SPP.

Sementara itu akses ke tabel SPP bisa dilakukan jika **tabel SKO** terisi, karena ada beberapa field dari tabel SKO ini yang menjadi input bagi tabel SPP yaitu field SKO dan field SKO tanggal. Tabel SKO ini terdiri dari *field*

1. Nomor Keputusan, berisi nomor identifikasi SKO.
2. Tahun Keputusan, berisi tahun dikeluarkannya SKO.
3. Bupati, berisi nama bupati yang mengesahkan SKO.
4. Kabupaten, berisi deskripsi kabupaten.
5. Nomor Urut, berisi nomor surat dikeluarkannya SKO.
6. Tahun, merupakan tahun berlakunya SKO.
7. Tanggal Mengetahui, berisi tahun ditetapkannya SKO.
8. Tahun Anggaran, berisi Tahun dikeluarkannya SKO.
9. Jumlah setinggi-tingginya, menunjukkan nilai kebutuhan berdasarkan usulan anggaran yang diajukan.
10. Untuk Keperluan Kegiatan, deskripsi keperluan kebutuhan.
11. Bagian Kelompok Jenis Belanja (Optional), Tahun Anggaran, Kantor, menunjukkan deskripsi keperluan belanja dan tahun anggaran serta dinas terkait.
12. Atasan Langsung, Pemegang Kas, berisi nama pejabat dari dinas yang mengajukan anggaran.
13. DASK Tanggal, DASK Nomor, berisi identifikasi dokumen anggaran satuan kerja sehingga dikeluarkannya SKO.
14. Jumlah untuk Anggaran bersangkutan, berisi nilai anggaran yang dibutuhkan oleh dinas.
15. Jumlah Otorisasi : berisi nilai otorisasi yang disetujui oleh Bupati.
16. Sisa anggaran : selisih nilai anggaran dan otorisasi.

Tabel Cek merupakan bentuk pembayaran yang menunjukkan adanya suatu realisasi pencairan dana baik itu penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Tabel Cek terhubung dengan tabel SPM (untuk transaksi pengeluaran kas), karena terbitnya cek ini harus berdasarkan konfirmasi dan keabsahan yang ada dalam tabel SPM. Tabel Cek juga berkoneksi dengan tabel Jurnal Pengeluaran Kas untuk memberikan konfirmasi adanya transaksi pengeluaran kas (referensi). Tabel cek ini hanya merupakan konfirmasi tambahan atas suatu transaksi pengeluaran kas karena suatu transaksi pengeluaran kas referensi utama harus melalui tabel SPM. Sedangkan tabel Cek sebenarnya hanya memberikan konfirmasi jika bentuk pembayaran dengan menggunakan cek/ BG (non kas). Tabel Cek ini terdiri dari *field* :

1. Nomor cek, berisi nomor identifikasi dikeluarkannya cek (untuk proses *recording* cek)
2. Uraian, berisi uraian cek dibutuhkan dalam rangka kegiatan/ keperluan apa saja.
3. Tanggal penerimaan cek, merupakan tanggal cek diterima oleh satuan kerja (dikeluarkan oleh Subbag Perbendaharaan) begitu pula sebaliknya.
4. Asal cek, menunjukkan uraian asal cek.
5. Jumlah keperluan, menunjukkan nilai cek
6. Keterangan, berisi keterangan tambahan sehubungan dikeluarkannya cek tersebut.

Sehubungan dengan adanya transaksi pengeluaran kas yang menggunakan cek ini maka harus ada tabel konfirmasi bahwasanya telah ada pencairan cek oleh satuan kerja atau pihak ketiga, untuk kepentingan laporan posisi cek. Tabel pencairan cek ini terdiri dari field nomor, uraian, tanggal penerimaan, asal cek, jumlah keperluan dan keterangan.

5.2.4 Physical Data Model (Entity Relationship-ER)

Sama seperti halnya Conceptual Data Model sistem informasi keuangan ini terdiri dari beberapa tabel database yang menjadi data storage dari tiap struktur informasi khusus yang telah disebutkan dijelaskan dalam Data Flow Diagram (DFD), namun dari tiap tabel yang dimaksud juga dijelaskan mengenai tipe data storage itu sendiri dan relasi dari masing-masing tabel terhubung oleh id dari masing-masing tabel bersangkutan. Physical Data Model dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah ini menggambarkan alur atau hubungan dari suatu data *storage* dari tiap proses yang terangkum dalam tabel-tabel database melalui id dari field *primary* dan juga menampakkan tipe data dari masing-masing field dalam tabel *contents* (gambar 5.14). Sistem informasi keuangan daerah ini terbagi dalam 17 (tujuh belas) tabel yakni : 1) kode rekening, 2) kategori, 3) buku kas, 4) jurnal penerimaan kas, 5) surat tanda setoran , 6) anggaran kas pendapatan, 7) anggaran kas pembiayaan, 8) surat perintah membayar, 9) anggaran kas belanja, 10) surat keterangan otorisasi, 11) surat perintah pembayaran, 12) jurnal pengeluaran kas, 13) cek, 14) cek yang dibayarkan 15) perhitungan Anggaran 16) draft arus kas, 17) draft neraca. Item nomor 15, 16 dan 17 merupakan item tambahan dari template yang telah ada dalam *cdm*. Item-item tersebut digunakan untuk kepentingan keluaran laporan pertanggungjawaban (laporan aliran kas, neraca dan laporan perhitungan anggaran).

Dalam sistem informasi ini tipe data storage (lampiran) yang dimaksud terdiri dari:

1. Text, menunjukkan bahwa data bisa dientrikan dalam format apapun dan dengan batasan 255 karakter, misal untuk data nama, nomor/ kode dokumen, pangkat dan lain-lain.

2. Integer, menunjukkan bahwa data hanya bisa dientrikan dalam format nomor/angka, data yang bisa dientrikan untuk ini terdiri dari tahun, penomoran dan lain-lain.
3. Memo, dapat dientrikan dalam format apaun dan dengan karakter yang tidak terbatas (*unlimited character*).
4. Currency, menunjukkan nilai mata uang ataupun jumlah perhitungan dari transaksi keuangan.
5. YesNo, menunjukkan bahwasanya data merupakan pilihan (salah satu atau lebih)

Tabel **Jurnal Penerimaan Kas** merupakan tabel inti pengolahan data dimana tabel ini menerima beberapa tabel lainnya dalam kaitannya dengan proses pengolahan data dan data entri yang bersangkutan. Tabel Jurnal Penerimaan Kas terdiri dari *field* nomor jurnal penerimaan kas, tanggal mengetahui, kode rekening, referensi, jumlah (Rp) dan akumulasi (Rp). Diawali dengan hubungan antara tabel **Kode Rekening** yang terhubung dengan id Kode Rekening. *Field* Kategori dan subkategori yang dimaksud merupakan tabel tersendiri yang dibentuk dalam tabel kategori, terhubung dengan id kategori

Tabel Jurnal Penerimaan Kas *field* **Referensi** dapat mengambil dari beberapa tabel input antara lain : pertama, Tabel **STS** yang menunjukkan surat setoran yang diberikan oleh Bendaharawan Umum Daerah selain slip setoran bank, bagi Satuan Kerja yang telah melakukan penyetoran baik itu Pendapatan Asli Daerah ataupun lain-lain pendapatan yang sah. Kedua, tabel ini terhubung dengan *field* STS No dari tabel STS dan Referensi STS dari tabel Jurnal Penerimaan Kas. Kedua, adalah Tabel **Buku Kas** yang memuat segala bentuk catatan keuangan Bendaharawan Umum Daerah setiap harinya, tabel Buku Kas dan tabel Jurnal Penerimaan Kas terhubung oleh *field* Nomor Urut (tabel Buku Kas) dan *field* Referensi Buku kas

Tabel ketiga yang berhubungan dengan Jurnal Penerimaan Kas yaitu Tabel SPM dapat menjadi referensi berkaitan dengan penerimaan kas hasil potongan Pihak Ketiga. Tabel ini dihubungkan oleh *field* Nomor SPM dan Referensi SPM.

Selain itu tabel inti yang kedua yakni Jurnal Pengeluaran Kas juga menerima tabel dari beberapa tabel lainnya). Diawali dengan hubungan antara tabel **Kode Rekening** yang terhubung dengan id Kode Rekening. *Field* Kategori dan subkategori yang dimaksud merupakan tabel tersendiri yang dibentuk dalam tabel kategori, terhubung dengan id kategori. *Field* **Referensi** dapat mengambil dari beberapa tabel input antara lain pertama Tabel **SPM** yang menunjukkan surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh Subbag Perbendaharaan atas persetujuan Subbag Verifikasi. Tabel ini dihubungkan oleh field referensi SPM dan Nomor SPM. Kedua adalah Tabel **Buku Kas** yang memuat segala bentuk catatan keuangan Bendaharawan Umum Daerah setiap harinya, kedua tabel ini terhubung oleh id nomor urut (tabel Buku Kas) dan id Referensi SPM.

Hal terpenting dalam PDM ini adalah dimunculkannya tabel database baru yang bukan merupakan tabel proses standar seperti yang tertuang dalam konteks manual, melainkan akan muncul beberapa tabel yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan dari suatu proses untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks yang sederhana sistem informasi keuangan ini terdiri dari beberapa tabel tambahan yang digunakan dan dimaksudkan sebagai *datastore* dari suatu proses dalam menghasilkan laporan keuangan yang dimaksud, dalam hal ini terdiri dari:

1. Tabel Perhitungan Anggaran, digunakan sebagai *datastore* dalam menghasilkan laporan keuangan perhitungan anggaran yang mana akan membutuhkan beberapa tabel realisasi (tabel jurnal penerimaan kas dan tabel pengeluaran kas) dan juga

tabel anggaran (tabel anggaran kas pendapatan, tabel anggaran kas belanja dan tabel anggaran kas pembiayaan).

2. Tabel Draft Neraca, digunakan sebagai *datastore* dalam menghasilkan laporan keuangan neraca, yang mana hanya akan membutuhkan tabel jurnal penerimaan kas dan tabel jurnal pengeluaran kas dan tabel kode rekening dan tabel kategori.
3. Tabel Draft Aliran Kas, sama halnya seperti tabel draft neraca digunakan sebagai data *datastore* dalam menghasilkan laporan keuangan neraca, yang mana hanya akan membutuhkan tabel jurnal penerimaan kas dan tabel jurnal pengeluaran kas dan tabel kode rekening dan tabel kategori.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil pengolahan data serta analisa yang telah diperoleh, maka didapatkan kesimpulan penelitian dan saran yang sekiranya dapat membantu memperbaiki kekuarangan yang ada selama masa penelitian.

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penelitian ini mengembangkan model *Financial Information System* dengan mempergunakan metode *waterfall* dalam melakukan teknik analisis, yang terbagi menjadi :

- *System flow*, menunjukkan alur proses keuangan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup yang dimaksud dari antar bagian keuangan dan kantor kas daerah (dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi bendaharawan umum daerah), yakni bendaharawan umum daerah, subbag perbendaharaan, subbag verifikasi dan subbag pembukuan;
- *Data flow diagram*, menunjukkan arus data dalam sistem informasi keuangan daerah sampai munculnya *data storage* (database) yang melibatkan 7 (tujuh) external entity antara lain kepala daerah, satuan kerja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, bendaharawan umum daerah dan pihak ketiga.
- *Conceptual data model*, menggambarkan obyek-obyek data atau fungsional dari dari masing-masing proses dalam sistem informasi keuangan daerah yang telah terangkai dalam suatu sistem terintegrasi. Sistem informasi keuangan daerah ini memiliki 14 (empat belas) obyek data storage yang terdiri dari : 1) kode rekening, 2) kategori, 3) buku kas, 4) jurnal penerimaan kas, 5) surat

tanda setoran , 6) anggaran kas pendapatan, 7) anggaran kas pembiayaan, 8) surat perintah membayar, 9) anggaran kas belanja, 10) surat keterangan otorisasi, 11) surat perintah pembayaran, 12) jurnal pengeluaran kas, 13) cek, 14) cek yang dibayarkan.

- *Physical data model_entity relationship*, menggambarkan alur atau hubungan dari suatu data *storage* dari tiap proses yang terangkum dalam tabel-tabel database melalui id dari field *primary* dan juga menampakkan tipe data dari masing-masing field dalam tabel *contents*. Sistem informasi keuangan daerah ini terbagi dalam 17 (tujuh belas) tabel yakni : 1) kode rekening, 2) kategori, 3) buku kas, 4) jurnal penerimaan kas, 5) surat tanda setoran , 6) anggaran kas pendapatan, 7) anggaran kas pembiayaan, 8) surat perintah membayar, 9) anggaran kas belanja, 10) surat keterangan otorisasi, 11) surat perintah pembayaran, 12) jurnal pengeluaran kas, 13) cek, 14) cek yang dibayarkan 15) perhitungan Anggaran 16) draft arus kas, 17) draft neraca. Item nomor 15, 16 dan 17 merupakan item tambahan dari template yang telah ada dalam cdm. Item-item tersebut digunakan untuk kepentingan keluaran laporan pertanggungjawaban (laporan aliran kas, neraca dan laporan perhitungan anggaran).

6.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan adalah :

- Untuk lebih menunjang penelitian selanjutnya maka sebaiknya pihak instansi terkait (bagian keuangan pemerintah kabupaten Situbondo) memiliki suatu pedoman yang bersifat teknis (semacam TUT atau Petunjuk teknis) dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam hal ini akuntansi keuangan

daerah, yang sekiranya dapat mengcover beberapa pertanyaan teknis yang lebih mendalam terkait dengan kompleksitas akuntansi pemerintahan itu sendiri.

- b. Dalam kaitannya pelaksanaan implementasi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sebaiknya pemerintah daerah mempersiapkan secara matang atas sumber daya manusia maupun infrastruktur agar sistem informasi keuangan daerah ini dapat berjalan lebih maksimal dan meminimalkan tingkat *error rule business* (baik secara konsep, metode akuntansi, aturan akuntansi dan prinsip akuntansi)
- c. Sebaiknya pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan aturan, petunjuk dan pedoman akuntansi semacam pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang sampai sekarang malah menjadi perdebatan yang tidak beresensi karena antar instansi sendiri merasa kewenangannya yang paling berhak untuk hal ini, sehingga sampai saat ini belum dapat terealisasi akan kebutuhan ini. Sehingga banyak daerah yang mengeluhkan jika telah dihadapkan akan berbagai kasus khusus dan akhirnya pemerintah daerah kembali menggunakan MAKUDA peninggalan pemerintah Belanda sebagai acuan pembukuan (basis kas/ skontro).
- d. Semenjak dikeluarkannya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sampai dengan dilakukannya penelitian ini, belum ada petunjuk teknis terkait dengan standar akuntansi, metode maupun prinsip pengakuan akuntansi dari Departemen Dalam Negeri selaku pejabat yang mengeluarkan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, 1993, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi kedua, Yogyakarta. BPFE
- Course.nnu.edu, 2000, **System Development Life Cycle - Waterfall Approaches**,
courses.nnu.edu/cs337bm/03chapter.ppt.
- Cano, Virginia, **Case Study Research**,
www.qmuc.ac.uk/psych/Rtrek/study_notes/web/sn10_1.htm#5, Colorado
State University Writing Centre, Notes on Case Study, USA
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2002 Tentang **Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Makalah Semiloka Penyusunan Neraca
Pemerintah Daerah, 2001
- Devaux, Andre and Gijssber, Govert, **Developing Management Information System:
Five Case Studies**, www.isnar.cgiar.org/publications/pdf/MIS_book/mis-
3.pdf
- Edwards, Perry, 1993, **System Analyse and Design**, International Edition, Mc Graw
Hill Inc, New York, NY, USA.
- Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah**, Serial
Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN,
Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, Serial Otonomi
Daerah, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hicks, James O, 1993, **Management Information Systems**, Third Edition, West
Publishing Company, St. Paul, Minnessota, MN, USA.
- Indrajit, Ricardus Eko, 2002, **Electronic Government Strategi Pembangunan Dan
Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**,
ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
- Icdhre (*Islamic Centre for Democracy and Human Righths Empowerment*). **Sulitnya
Menilai Bupati Jombang**, www.ngo.or.id/icdhre/apbd2002/.
- McLeod Jr, Raymond & Schell, George, 2001, **Management Information System**,
Eight Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey, USA.

- McLeod Jr, Raymond, 1998 ***Financial Information System Management Information System***, 7/E, Prentice Hall, Inc., New Jersey, <http://www.uic.edu/classes/idsc/ids531/mclppt/chap20.ppt>.
- McLeod Jr, Raymond, 1998 ***Summary Management Information System***, 7/E, Prentice Hall, Inc., New Jersey, web.it.kmutt.ac.th/~tha/MIS/Chapter%20n.ppt.
- Mulyadi dan Jony Setyawan, 1999, ***Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen : Sistem Pelipat Ganda Kinerja Perusahaan***, Edisi I. Cetakan I PT. Aditya Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, 1997, ***Sistem Akuntansi***, Edisi 3, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 1999, ***Metode Penelitian***. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- O' Brian, James, 1996, ***Management Information System***. 5th Editon, Mc Graw Hill Book Companies Inc, New York, NY, USA.
- Porter, Michael E, ***Business Insigth***, www.brs-inc.com/porter.asp
- Weston, J.Fred & Copeland, Thomas E., 1995, ***Manajemen Keuangan***. Jilid I, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Purnomo, Edi, 2002, ***Apa Yang Harus Diketahui Oleh SISTEM ANALIS***. ANDI Yogyakarta
- Puslitbangwas, BPKP, 2001, ***Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah***, www.bpkp.go.id/puslitbangwas/lit2001
- Sarno, Riyanarto, 1995, ***Teknologi Informasi I***. Bagian Penerbitan Teknik Informatika, ITS Surabaya.
- Strauss, Anselm and Corbin Juliet, 1997, ***Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik dan Teori Grounded***. PT. Bina Ilmu, Jakarta.
- Supono Maryono, 1991, ***Penyusunan Model Sistem Untuk Melandasi Manajemen Strategik Bank Umum di Indonesia***, Tesis PPs Universitas Airlangga, Surabaya.
- Winarti, 2002, ***Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pakar Pada Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah***, Tesis PPs Universitas Airlangga, Surabaya
- Whitten, Jeffry L., 2001, ***System Analyse and Design***, Mc Graw Hill Inc, New York, NY, USA.

Yin, Robert K., 2000, **STUDI KASUS (Desain dan Metode)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAKUN	Badan Akuntansi Negara
BUD	Bendaharawan Umum Daerah
CBIS	Computer based Information System
CDM	Conceptual Data Model
CIPsFIS	The national Potato Center Financial Information System
DFD	Data Flow Diagram
ER	Entity Relationship
KEPMENDAGRI	Keputusan Menteri Dalam Negeri
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
MIS	Management Information System
NIP	Nomor Induk Pegawai
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDM	Physical Data Model
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PP	Peraturan Pemerintah
PROINPA	Programma de Investigacion de la Papa (The National Potato Research Program of Bolivia)
PUSLITBANGWAS	Pusat Penelitian Pengembangan dan Pengawasan
RASK	Rencana Anggaran Satuan Kerja
SAKD	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
SKO	Surat Keterangan Otorisasi

SPM	Surat Perintah Membayar
SPP	Surat Perintah Pembayaran
STS	Surat Tanda Setoran

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Drs. Suhanwar
 Dinas/ Instansi/ Unit Kerja : Sekertaris Daerah
 Jabatan : Kepala Bagian Anggaran

Keterangan :

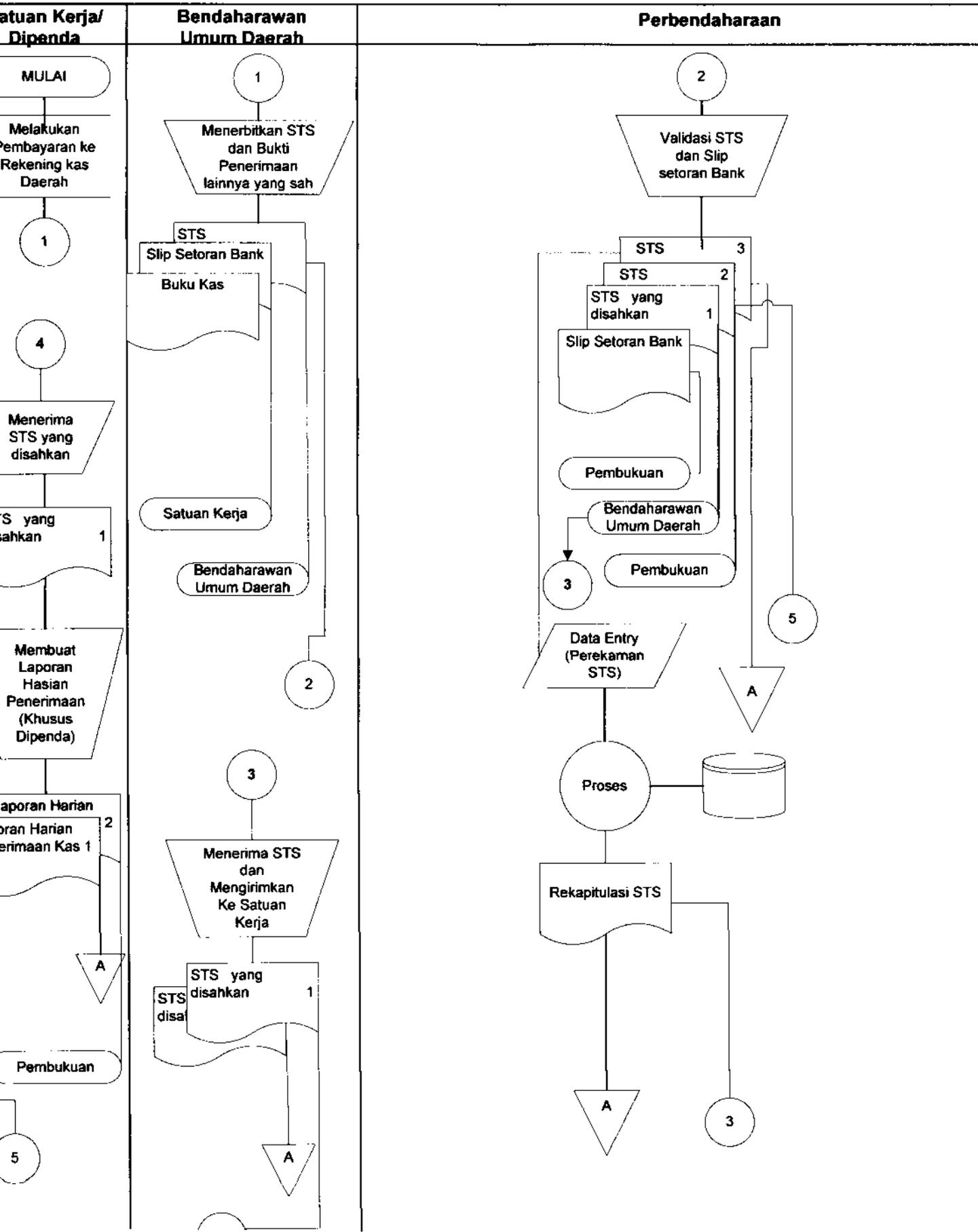
- Bagian ini merupakan informasi tambahan yang tidak secara jelas dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan tujuan untuk menambahkan unsur fleksibilitas dari pembentukan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan kondisi riil per item kasus yang terjadi dalam frekuensi yang sangat rendah, dengan tetap berpedoman pada kerangka yang digariskan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
- Bagian ini meminta aparatur perangkat daerah untuk menjelaskan secara detil dari tiap item pertanyaan yang diberikan dengan cara mendeskripsikannya.
- Jawaban benar atau salah, harus disertakan dengan penjelasan lebih lanjut mengenai alasannya.

No	Uraian Pertanyaan	Uraian Jawaban
1	Mengapa sistem informasi keuangan daerah yang terdahulu dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah dalam menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban (LPJ) berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002?	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 LPJ terdiri dari 4 laporan, yaitu : Neraca, Arus Kas, laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan anggaran dengan pos-pos rekening yang telah ditetapkan. Sistem informasi keuangan daerah yang dahulu tidak dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan yang digariskan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang harus dijalankan sampai dengan 2006. Karena selambat-lambatnya pada tahun ini UU Nomor 13 Tahun 2003 harus dilaksanakan oleh daerah menggantikan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ini.
	<u>Akuntansi Keuangan Daerah</u>	
1	Dokumen apakah yang dijadikan referensi pembukuan di bagian keuangan?	Bendaharawan : STS, SPM, Faktur, SPP, SPJ dan buktilainnya yang sah. Secara umum transaksi penerimaan : STS dan transaksi pengeluaran : SPM
2	Suatu pengeluaran ataupun penerimaan diakui pada saat apa (terbitnya dokumen apa? Dimana diakuiinya?	Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menganut Cash basis Modified (Pengakuan pada saat transaksi berdasarkan kas, untuk kemudian diakhir tahun di akrualkan, artinya transaksi pada akhir tahun harus mengakui penerimaan

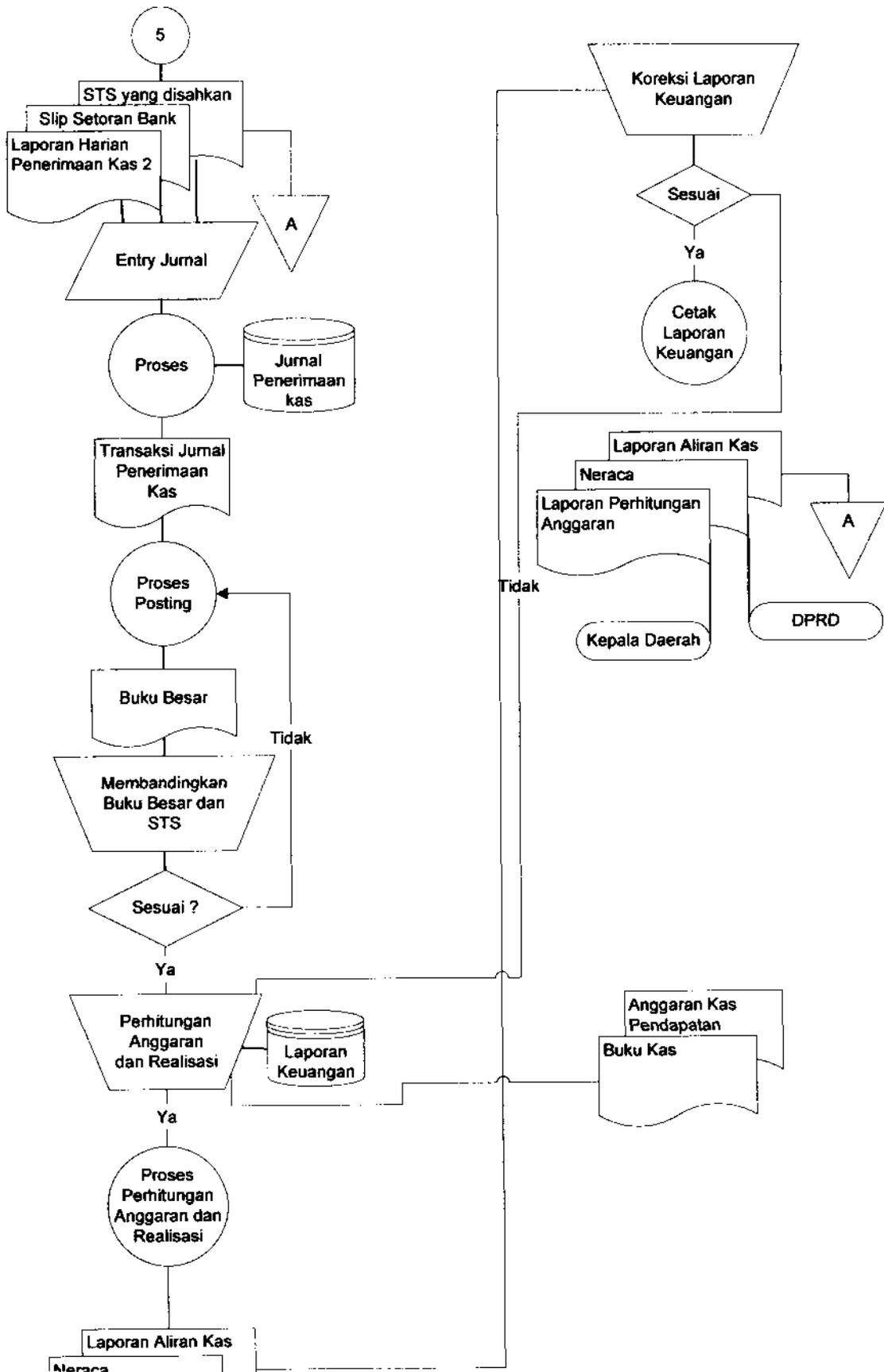
		yang belum menjadi pendapatan atau pun biaya yang belum menjadi pengeluaran). Untuk transaksi penerimaan dikeluarkannya STS pembukuan sudah dapat mencatat transaksi penerimaan dan pada saat dikeluarkannya SPM pembukuan sudah dapat mencatat transaksi pengeluaran.
3	Konsep apakah yang digunakan dalam proses pembukuan (sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 atau belum)?	Lihat nomor 2
4	Bagaimanakah dengan kasus kegiatan pembangunan khusus proyek yang dianggarkan melalui APBD mengenai data historis realisasi anggaran tersebut untuk dimasukkan dalam proses sistem akuntansi keuangan daerah lebih lanjut sehingga pertanggung jawabannya dapat terjadi dengan akurat dan transparan? Note : Mengingat detail kegiatan proyek yang dimaksud terkadang tidak tercover.	Secara detail data anggaran pembangunan atau proyek tidak dibukukan oleh Bagian Keuangan Sekertaris Daerah melainkan dilakukan oleh masing-masing dinas? Dinas menyerahkan laporan keuangannya pada Sekda.
5	Bagaimanakah metode posting yang dapat diterapkan dalam sistem informasi keuangan daerah yang telah diterapkan (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002? Dengan sistem <i>batch</i> ataukah sistem <i>online</i> ?	Dengan sistem Batch, diposting secara bulanan sedangkan laporan keuangan dilakukan per triwulanan

LAMPIRAN
SYSTEM FLOW

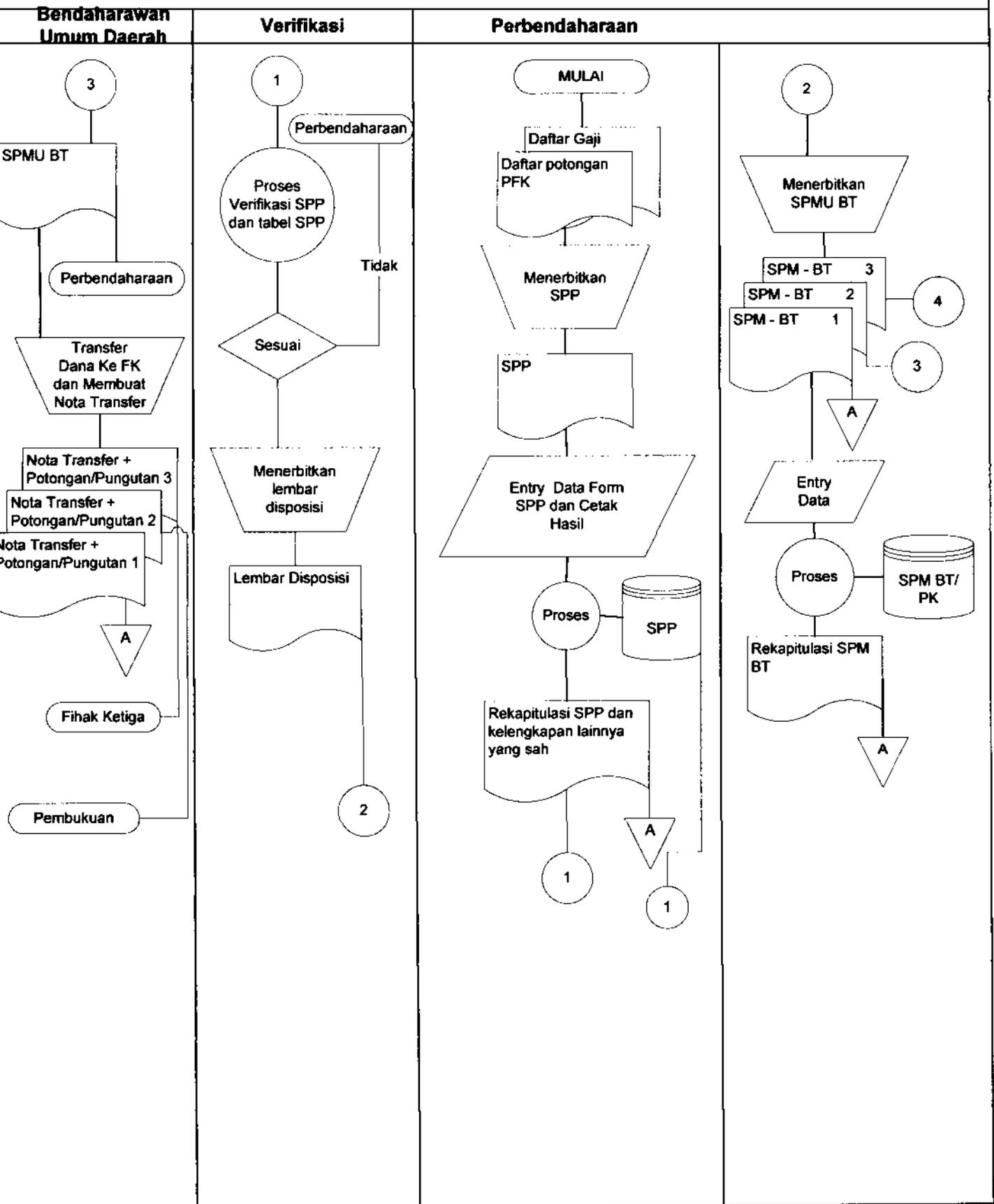
SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS (AKUNTANSI PENDAPATAN) (1)



Pembukuan

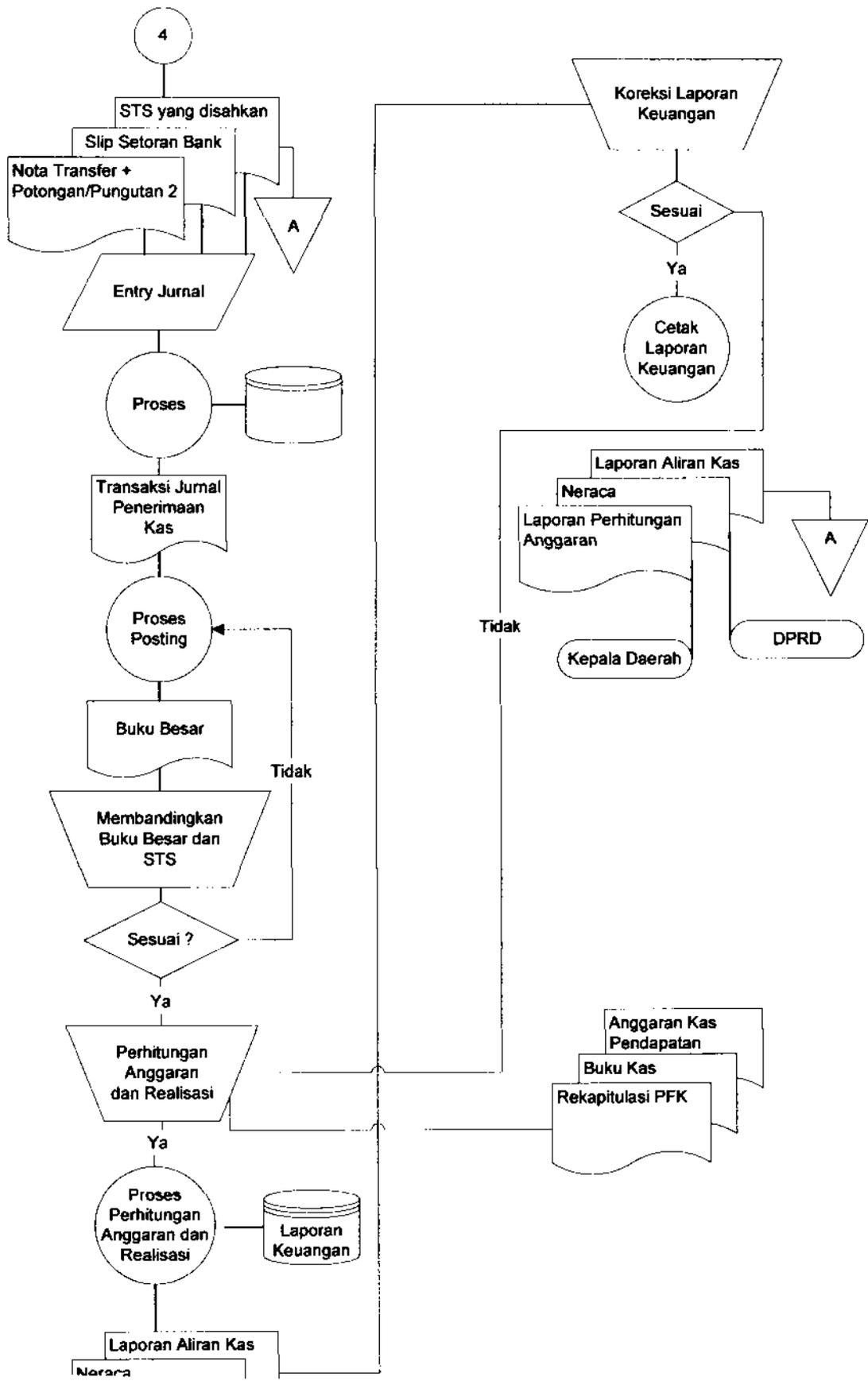


SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS (PFK) (1)



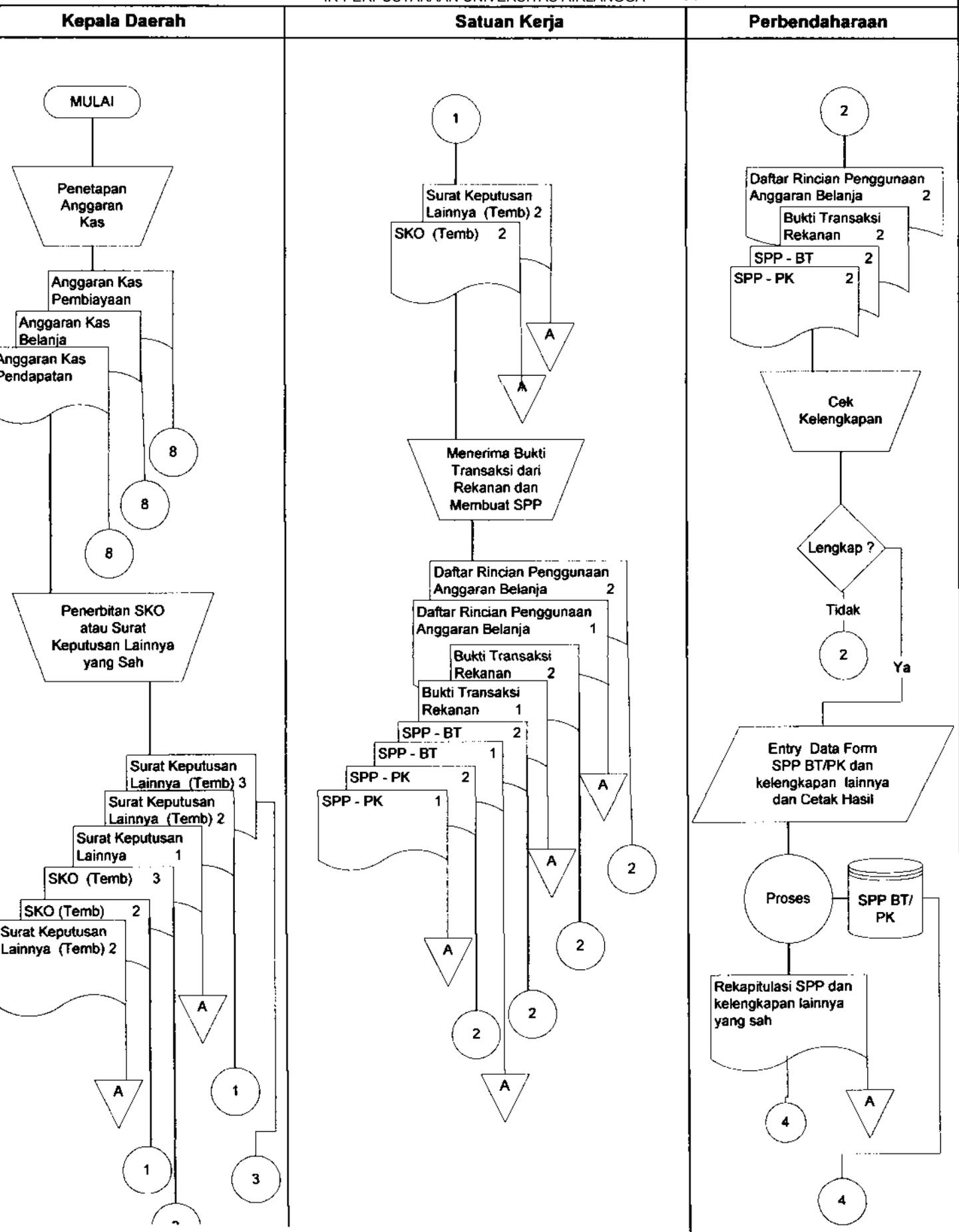
lama
okar
la

Pembukuan



SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOMPOKAN KAS (Beban Tetap)

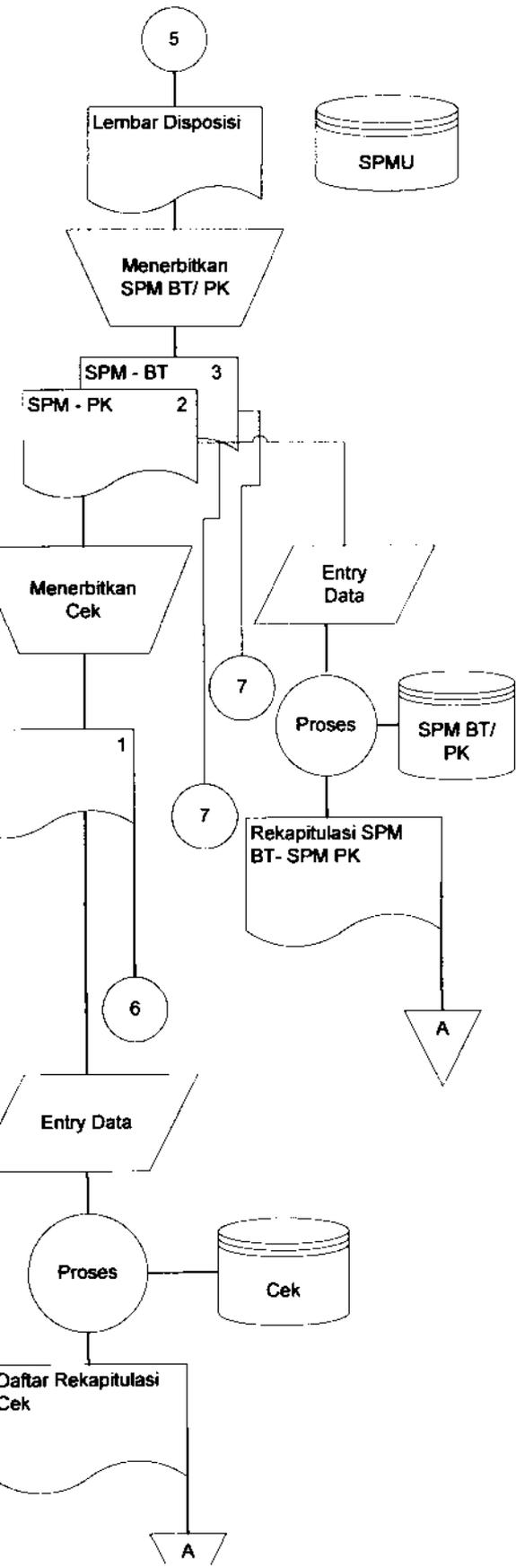
IR. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



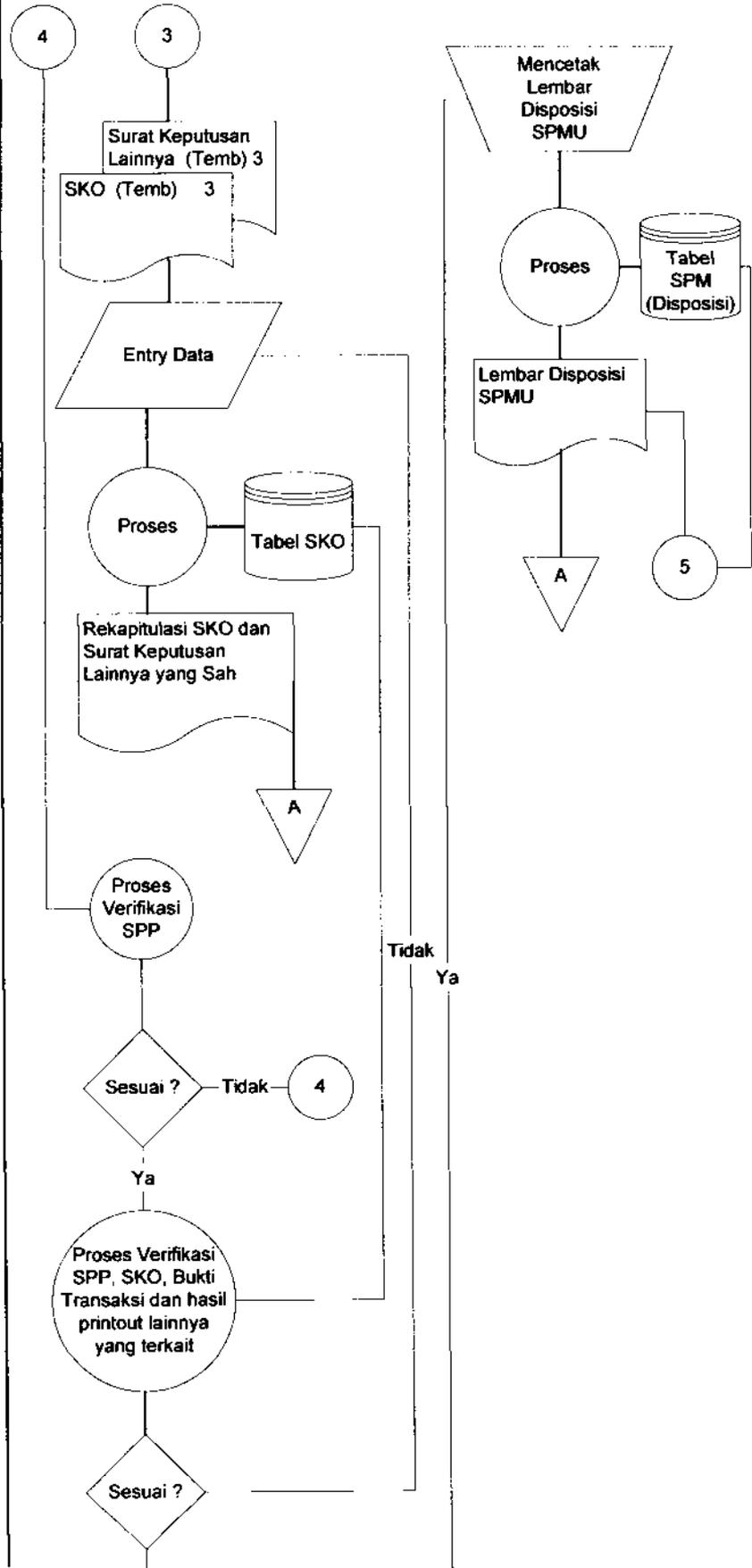
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS (Beban Tetap)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Perbendaharaan

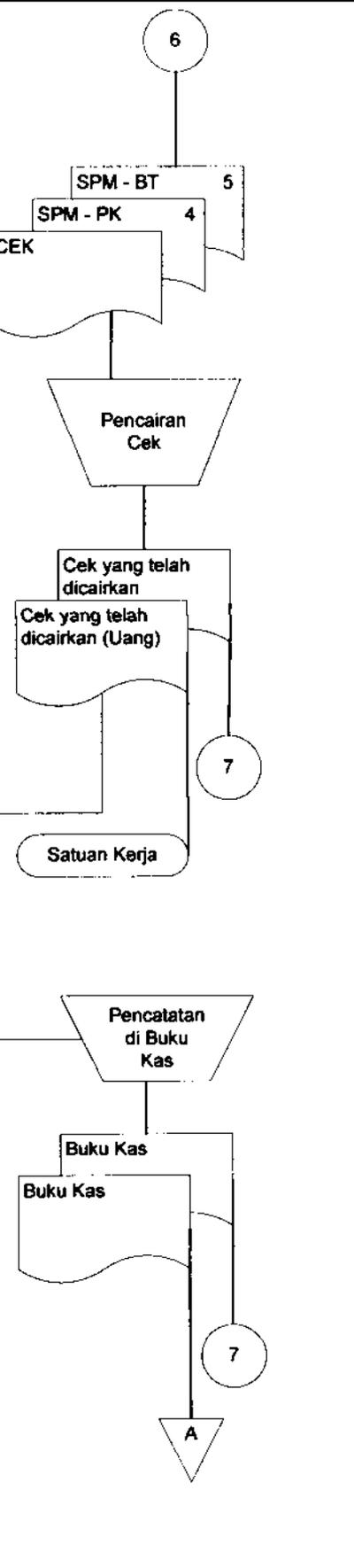


Verifikasi

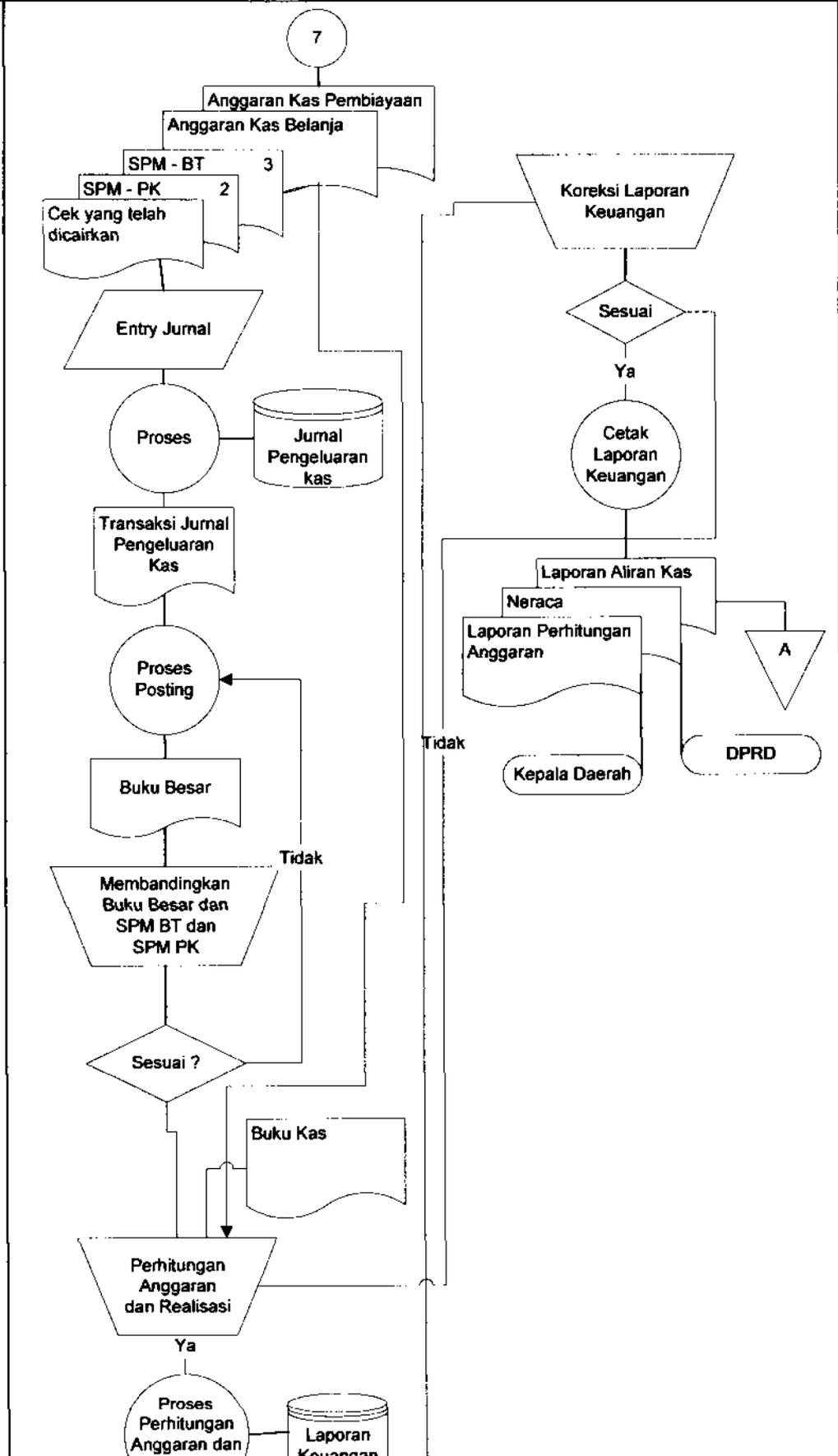


SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS (Beban Tetap)

Bendaharawan Umum Daerah

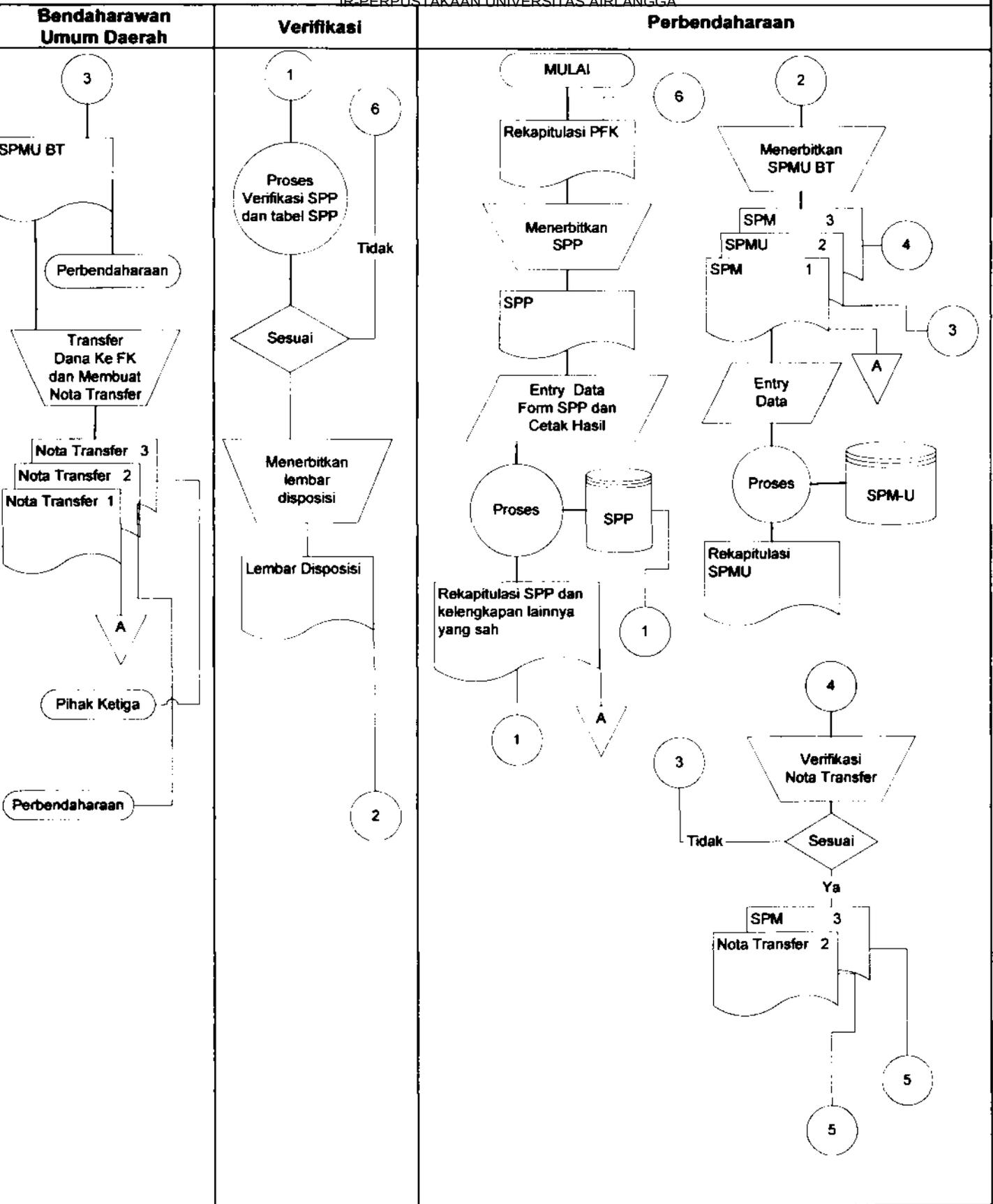


IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pembukuan



SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOUARAN (PFK) (1)

IR.PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Nama : Sistem dan Prosedur Pengeluaran PFK

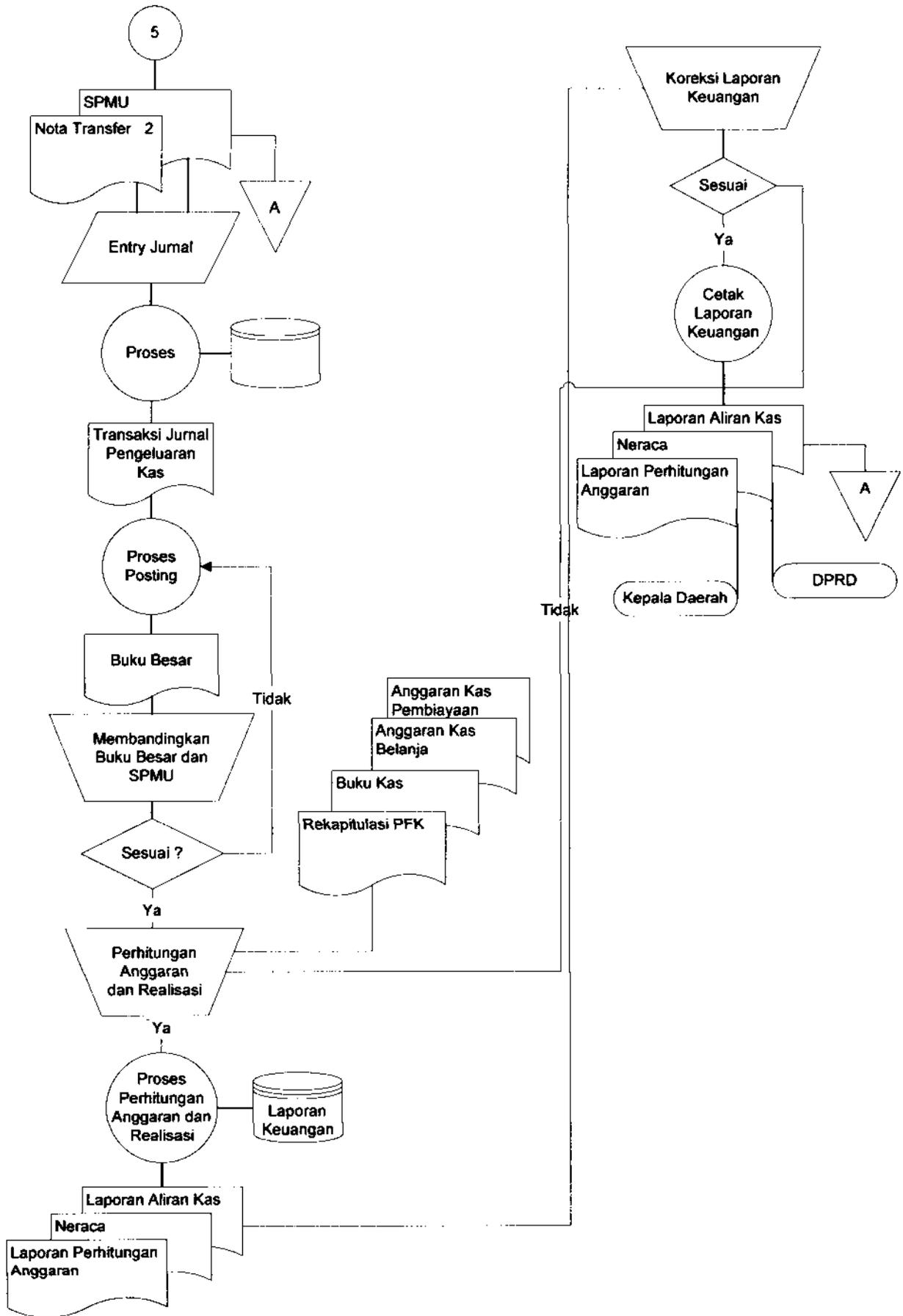
lokasi : ...

lal

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN (PFK) (2)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pembukuan



Berita Acara Ujian Tesis / Proposal

Nama : **Mahsina**
 NIM : **090114360 M**
 Tanggal Ujian : **5 Januari 2004 (09.00 - 11.00)**

No	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Tgl Persetujuan
1	Judul	<ul style="list-style-type: none"> Metodologi penelitian → batasan penelitian Mf hal 3 yg tdk dibahas / dianalisis tercapainya ? → mencapai 	Bp. Bambang S.	<i>[Signature]</i> 15/4/2004.
2	50 dll	<ul style="list-style-type: none"> BPKP sbg badan pemeriksa Internal Audit menggunakan Kepmen sbg acuan Dasar pertimbangan 4 dasar hukum di drop Kutipan kepmen yg perlu dimasukkan 	Bu. Wicak S.	<i>[Signature]</i> 20/6/04
3	Judul	<ul style="list-style-type: none"> Lihat Catatan Bu. Wicak di perbaiki Bendahara Umum daerah = Kade (?) Beda konsep perencanaan & pendptn daerah lap. alir. kas tdk lengkapnya 07 metode yg digunakan 	M. Nasih	<i>[Signature]</i> 30/6/04
		<ul style="list-style-type: none"> Proposisi lain = Daftar pustaka → diberi ^{nama} kota 	Ahmadi Bantari	<i>[Signature]</i> 2/7-2004

Sekretaris

Dosen Pembimbing

[Signature]
 (Deby R. Daniel)

NIP : 131.287.544

diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal 2002

Pembimbing